



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

MASTERPLAN PENGEMBANGAN *SMART CITY* KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2019-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Visi Kabupaten Padang Pariaman adalah Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera dengan menerapkan Padang Pariaman *Smart City*;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman menuju Padang Pariaman *Smart City* diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk *Masterplan* penerapan *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan* Pengembangan *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN* PENGEMBANGAN *SMART CITY* KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Teknologi Informasi adalah Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Padang Pariaman *Smart City* adalah Kabupaten Padang Pariaman yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
8. *Smart City* adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
9. *Masterplan* adalah Rencana Induk Pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
10. *Masterplan Smart City* adalah Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
11. *Smart Governance* adalah Tata Kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
12. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi

tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.

13. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
14. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengembangkan tiga elemen yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.
15. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
16. *Smart Living* adalah cara pandang dan pola pikir yang berlandaskan pada paradigma kenyamanan praktis dan kreatif.
17. *Less Cash Society* adalah masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan pengembangan *Masterplan Smart City* Daerah secara terpadu.
- (2) *Masterplan* pengembangan *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2019-2029 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menetapkan landasan materi dan implementasi praktis rencana pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Pengembangan *Masterplan Smart City* Daerah;
- b. menetapkan panduan perencanaan Pengembangan Daerah berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* yaitu *Smart govermance*, *smart economy*, *smart society*, *smart branding*, *smart living*, *smart environment*;
- c. menetapkan prioritas pengembangan *Smart City* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (2019-2029).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ruang lingkup program kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
 - a. pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan ekonomi;

- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pariwisata, seni dan budaya;
 - e. kesehatan, pendidikan dan kesehatan;
 - f. informasi hukum; dan
 - g. kemiskinan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.

BAB III
SASARAN
Pasal 5

Peraturan Bupati ini disusun dengan sasaran sebagai berikut :

- a. mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
- b. meningkatkan daya saing dengan mengembangkan yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota, potensi Daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan *brand value* Daerah yang berujung pada meningkatnya pendapatan daerah;
- c. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan finansial literasi masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*;
- d. menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat melalui kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang; dan
- e. mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif dan interaktif, dengan digital literasi yang tinggi.

Pasal 6

- (1) Sistematis analisis strategis *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman meliputi :
- a. Bagian I Pengantar;
 - b. Bagian II Analisis Masa Depan;
 - c. Bagian III Analisis Kesiapan Daerah;
 - d. Bagian IV Analisis Kesenjangan Daerah; dan
 - e. Bagian V Analisis Pembangunan *Smart City*.

- (2) Sistematika *Masterplan* pengembangan *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman meliputi :
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Visi *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. BAB III Strategi Pengembangan *Smart City*;
 - d. BAB IV Rencana Aksi *Smart City* Daerah;
 - e. BAB V Peta Jalan *Smart City* Daerah; dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (3) Rincian sistematika analisis strategis *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian sistematika *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
MASTERPLAN PENGEMBANGAN *SMART CITY* KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2019-2029

Bagian I
PENGANTAR

Kabupaten Padang Pariaman dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Secara luas wilayah, Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang terkecil di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan kebijakan perluasan Kota Padang pada 1980, pemisahan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 1999, dan Kota Pariaman pada 2002. Sejak 2008, Ibukota Padang Pariaman berpindah dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang. Berikut peta administratif Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki 17 kecamatan dan 103 nagari:

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Berdasarkan peta di atas, Kabupaten Pariaman secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Agam di sebelah Utara, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok di sebelah timur, Kabupaten Agam (di sebelah Utara), Kota Padang di sebelah selatan, dan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia di sebelahBarat

Gambaran di atas menunjukkan Kabupaten Pariaman memiliki letak strategis di jantung Sumatera Barat yang menyangga Kota Padang. Hal ini terbukti pada keberadaan sejumlah infrastruktur vital seperti:

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang mulai operasi pada 22 juli 2005. Pada 2006 ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai tempat embarkasi dan debarkasi haji untuk wilayah provinsi Sumatera Barat; dan Asrama Haji yang diresmikan tahun 2015.

Selain itu, sejumlah proyek besar juga akan dibangun di wilayah Kabupaten Pariaman, di antaranya adalah:

Pintu gerbang Jalan Tol Sumatera Selatan-Riau, rencana operasi tahun 2023
Kawasan Industri Padang Industrial Park seluas 84 ha di kasai kecamatan batang anai dan guguk kecamatan 2 x 11 kayu tanam;

Menjadi satu dari lima kota terpadu PASOPALA (Painan, Solok, Padang, Lubuk Alung, dan Pariaman). Telah tercantum dalam Dokumen Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019

Pembangunan Technopark seluas 2 hektar di lubuk alung

Memiliki daerah pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai yang cukup panjang membuat kabupaten ini memiliki beragam potensi industri, wisata, dan perdagangan berbasis komoditas pertanian dan perikanan. Wilayah sebelah timur yang bercorak perbukitan menghasilkan kakao dan sayuran serta pemandangan alam perbukitan yang menarik. Wilayah Barat yang berupa dataran rendah dan pantai sangat strategis untuk pengembangan sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya (air payau dan air tawar)

Tidak hanya itu, Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki berbagai destinasi wisata yang cukup beragam dan menarik untuk wisatawan, dari destinasi wisata alam hingga budaya- religi. Wisata alam-petualangan ada di Lubuk Nyarai, keindahan pantai dan kuliner ikan bisa dinikmati di Pantai Tiram, serta keindahan pegunungan di Puncak Kiambang Sicincin. Sementara Komplek Makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, menjadi pusat ziarah umat Islam tidak hanya dari penjuru nusantara, namun juga dari negeri jiran khususnya penganut Tarekat Sattariyah. Puluhan ribu orang berziarah di setiap bulan Syafar untuk memperingati haul Syekh Burhanuddin.

Potensi pembangunan tersebut juga didukung oleh tata kelola pemerintah daerah yang baik dan inovatif. Hal ini terlihat pada sejumlah penghargaan yang diperoleh Kabupaten Padang Pariaman selama 2018, yaitu:

- 1) Penghargaan Dwija Praja Nugraha, Kementerian (2018),
- 2) Anugerah Media Humas Kategori Siaran Pers, Kemen Kominfo (2018),
- 3) Innovative Government Award, Kemendagri (2018).

Namun demikian, Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi bencana yang cukup besar. Hal ini dikarenakan daerah ini terletak pada dua jalur patahan lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia serta dilalui banyak aliran sungai. Selama 20 tahun terakhir terjadi beberapa bencana alam cukup besar, diantaranya Gempa Sumatera Barat sebesar 7,6 SR pada tahun 2009 yang menewaskan 675 dan merusak 59.693 unit rumah, Menurut penelitian pakar LIPI pada Februari 2019, Padang Pariaman dan daerah Pantai Barat Sumatera lainnya masuk dalam jalur potensi gempa Mega Thrust 9 SR.

Bagian II ANALISIS MASA DEPAN

2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk



Rencana pembangunan, baik fisik, sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar lainnya menyangkut pertimbangan tentang jumlah serta karakteristik penduduk di masa mendatang, Jumlah penduduk di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 sebanyak 411.003 jiwa, yang terdiri dari 202.400 laki-laki dan 208.603 perempuan, sedangkan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 408.612 jiwa (201.130 laki-laki dan 207.482 perempuan. Kepadatan penduduk pada tahun 2017 terhitung 309 jiwa/Km² dengan laju pertumbuhan 0.59% .

Adapun proyeksi penduduk sampai tahun 2035 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Proyeksi penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2035

	Tahun				
	2017	2020	2025	2030	2035
Jumlah penduduk	441.003	418.278	430.402	449.802	474.051

2.2 Angkatan kerja

Pada 2017, jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang berumur 15 tahun keatas dan telah bekerja berjumlah 181.864 jiwa atau 41.24% dari jumlah total penduduk . Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan 2.38% dari tahun sebelumnya sebesar 38.86% dari jumlah penduduk di Kabupaten Padang Pariaman. Perhitungan proyeksi jumlah angkatan kerja Kabupaten Batang didasarkan atas tinjauan matematis secara geometri yaitu berdasarkan angka pertumbuhan tahun terakhir yaitu tahun 2017. Adapun proyeksi dan jumlah penduduk yang bekerja sampai tahun 2035 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Proyeksi penduduk Padang Pariaman 15 tahun keatas yang bekerja

	Tahun				
	2017	2020	2025	2030	2035
Jumlah penduduk bekerja	81.864	194.849	216.491	251.118	294.401
Persentase (%)	1,24	43,41	46,88	52,03	57,88

Tabel di atas menunjukkan jumlah pendidik bekerja pada 2035 diproyeksikan sebanyak 294.401 jiwa dengan persentase sebesar 75,88%. Dengan demikian, jumlah tersebut diperkirakan meningkat sebesar 112.537 jiwa atau 62% dibandingkan dengan 2017.

2.3 Proyeksi Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku maupun harga konstans setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk PDRB atas harga berlaku pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 1.672.534,2 juta rupiah dari Rp. 17.532.873,3 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi Rp. 19.205.407,5 juta rupiah pada tahun 2017. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini belum dapat mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara riil, karena kenaikan ini masih mengandung unsur inflasi. Laju pertumbuhan Nilai PDRB menurut harga konstan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 sebesar 5.59% hal ini lebih tinggi di bandingkan nilai PDRB Propinsi Sumatera Barat yang hanya 5.29%. Namun di bandingkan jika dengan kabupaten kota di Propinsi Sumatera Barat laju Pertumbuhan Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman berada urutan 8 setelah Kota Pariaman.

Tabel 2.3. Proyeksi PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2035

Proyeksi Padang Pariaman	Tahun				
	2017	2020	2025	2030	2035

PDRB atas dasar harga berlaku	19.205.407,50	24.218.019	32.572.371	45.939.335	62.648.039
PDRB atas dasar harga konstan	12.346.587,00	14.294.878	17.542.031	22.737.475	29.231.779

Dari hasil proyeksi PDRB Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 PDRB atas dasar berlaku sebesar Rp. 24.218.019 dan PDRB atas harga konstan Rp. 14.294.878 dan pada tahun 2035 jumlahnya meningkatkan menjadi PDRB atas dasara berlaku sebesar Rp. 62.648.039 dan PDRB atas harga konstan Rp. 29.231.779

Tabel 2.4 Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015

SEKTOR	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	0.93	0.91	0.91	0.91	0.92
Penggalian	1.32	1.30	4.83	4.96	1.36
Industri Pengolahan	1.19	1.19	1.22	1.22	1.24
Pengadaan Listrik & Gas	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Dan Daur Ulang Limbah	0.53	0.54	0.51	0.51	0.51
Konstruksi	0.93	0.92	0.92	0.93	0.92
Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	0.63	0.62	0.63	0.64	0.62
Transportasi Dan Pergudangan	2.10	2.10	2.01	1.99	1.96
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0.81	0.80	0.79	0.79	0.79
Informasi Dan Komunikasi	0.57	0.57	0.58	0.59	0.58
Jasa Keuangan Dan Asuransi	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53
Real Estat	0.53	0.53	0.19	0.53	0.52
Jasa Perusahaan	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial	0.82	0.85	0.90	0.90	0.90
Jasa Pendidikan	1.25	1.24	1.23	1.23	1.21
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43

Jasa Lainnya	0.75	0.76	0.76	0.77	0.76
--------------	------	------	------	------	------

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019

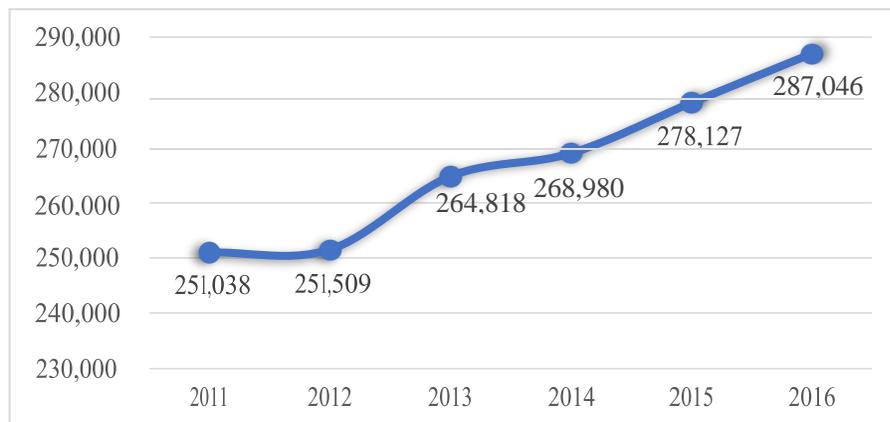
2.4 Isu Pengembangan Sektor Unggulan

Sektor yang paling dominan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar Rp 6.372.815,9 (33,2%) diikuti dengan Pertanian, Kehutanan, dan Pertanian yang berkontribusi sebesar Rp 3.731.537,4 (19,4%)

Sektor pertanian kehutanan dan perikanan di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Tanaman pangan, Hortikultura, peternakan dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan terdiri dari perhubungan darat yang meliputi kereta api, angkutan desa, angkutan dalam propinsi, perhubungan udara dan pos telekomunikasi.

Kawasan pertanian padi sawah merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional. TPLB di wilayah perencanaan dikembangkan di kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, VII Koto Sungai Sariak, 2x11 Kayu Tanam, V Koto Kampung Dalam, Sungai Geringging dan Koto Aur Malintang. Lahan pertanian sawah yang beririgasi teknis dikembangkan di Batang Anai, Lubuk Alung dan Ulakan Tapakis.

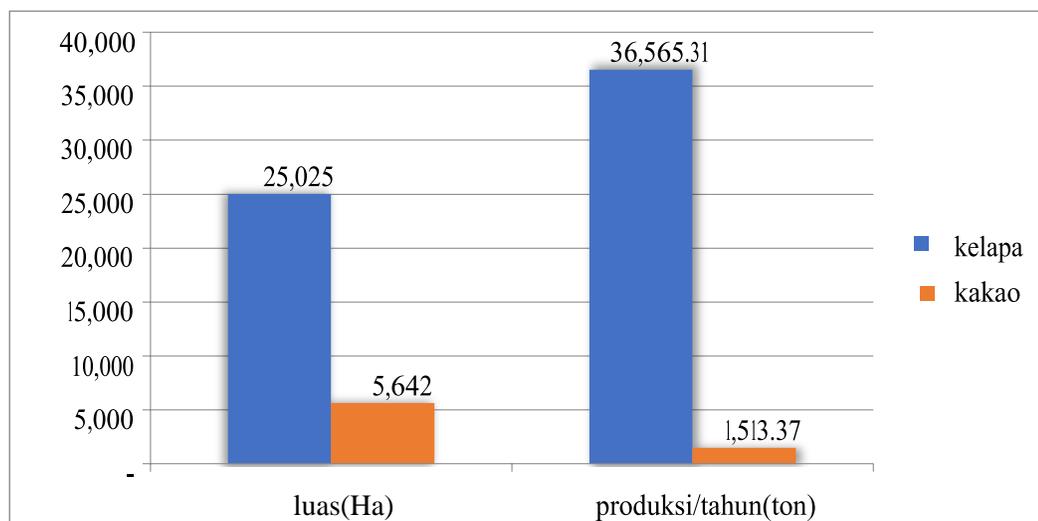
Gambar 2.1 Grafik Hasil Produksi Padi di Kabupaten Padang Pariaman



(Ton)

Sumber : Data Olahan, 2017

Gambar 2.2. Grafik Luas area dan produksi/tahun tanaman kelapa dan Kakao di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018



Terlihat dari gambar diatas Komoditas unggulan perkebunan kabupaten Padang Pariaman yang merupakan perkebunan rakyat adalah Kelapa, Kakao.

Jenis tanaman ini berkembang di wilayah utara. Kedepan direncanakan Sungai Geringging sebagai sentra pengembangan Kakao dan pengolahan kelapa. Pengembangan Kakao meliputi kecamatan Lubuk Alung, Sintoga.

Perikanan di Padang Pariaman adalah perikanan budi daya dengan luas lahan sebesar 56 Ha dengan produksi pada tahun 2017 sebesar 57.239,70 ton perikanan tangkap laut dengan hasil produksi pada tahun 2017 sebanyak 25.472,2 ton.

Gambar 2.3. Hasil Produksi Ikan Tangkap di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016



Sumber: Buku Statistik Perikanan tahun 2017

Perhubungan darat sangat dominan adalah perhubungan kereta api dimana pada tahun 2017 jumlah penumpang sebanyak 635.777 penumpang dengan pendapatan setahun pada tahun 2017 Rp. 3.178.887.000 rupiah. Kegiatan transportasi udara melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) selama tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pesawat komersial yang berangkat dan yang datang dari dan ke BIM.

Strategi pengembangan wisata di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan RIPPARDA Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Padang Pariaman

No	Kawasan Strategis	Strategi Pengembangan
1	KPSD Ulakan Tapakis – Nan Sabaris dan sekitarnya sebagai kawasan wisata religi, kuliner, dan bahari	<p>Pemantapan Kawasan Makam Syech Burhanuddin sebagai Kawasan Wisata Religi dan Edukasi Islam di Sumatera Barat.</p> <p>Pemantapan Pantai Tiram sebagai Kawasan Rekreasi Pantai Keluarga dan Kuliner.</p> <p>Mengembangkan Kawasan Pulau Pieh sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari Kabupaten Padang Pariaman.</p> <p>Pengembangan Kawasan Ulakan Tapakis-Nan Sabaris sebagai Kawasan Wisata Ziarah dan Sejarah.</p>

2	KPSD Batang Anai Lubuk Alungdan sekitarnya sebagai pintu gerbang Sumatera Barat, rekreasi alam dan water-front resort	Pemantapan Citra Kabupaten Padang Pariaman sebagai Gerbang Pintu Masuk Sumatera Barat (Minangkabau Internasional Airport) Pengembangan Adventure Tourism dan Rekreasi Wisata Alam Pegunungan Lubung Alung dan Sekitarnya Pencanangan Kawasan Pantai Gosong sebagai Kawasan Investasi Water-Front Resort berbasis Eco-lodge (ramah lingkungan dan bertanggung jawab) Dermaga Wisata
3	KPSD Kayu Tanam – Patamuandan sekitarnya sebagai kawasan rekreasi alam, tirta dan MICE	Pengembangan Kawasan Malibou Anai Resort sebagai Kawasan Rekreasi Alam dan Tirta Terpadu Pembangunan Rest Area dan Sentra Kuliner di Sekitar Kawasan Malibou Anai Resort Pencanangan Kawasan Malibou Anai Resort sebagai Kawasan MICE Mempersiapkan Kawasan Malibou Anai Resort sebagai Jalur Distribusi Cable Car yang menghubungkan Padang Pariaman-Padang Panjang-Bukittinggi. Mengembangkan desa-desa di Kawasan Gunung Tigo sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata
4	KSPD Enam Lingkung dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, pendidikan dan budaya	Pengembangan Jalur Wisata Sejarah Enam Lingkung dan Sekitarnya Pengembangan Sarana dan Fasilitas Umum, Utilitas dan Infrstruktur di Enam Lingkung yang mampu menunjang kebutuhan wisatawan selama melakukan kunjungan di Padang Pariaman Pengembangan Kawasan Enam Lingkung dan Sekitarnya sebagai Kawasan Pendidikan, Budaya dan Sejarah. Pengembangan Taman Wisata Kota di Enam Lingkung sebagai Ruang Terbuka Hijau Masyarakat
5	KPPD Sungai Limau – Batang Gasan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pesisir berbasis relaksasi keluarga	Pengembangan Pantai Arta Indah dan Pantai Arta Permai sebagai Patai Rekreasi Keluarga dan Outboound Pengembangan Pantai Baselona sebagai Kawasan Wisata Pantai berbasis Rekreasi
6	KPPD Sungai Geringging – VKoto Kampung Dalam sebagai kawasan agrowisata dan ziarah	Pengembangan Koto Aur Malintang Dalam sebagai Kawasan Agrowisata Pengembangan Jalur Wisata Ziarah dan Sejarah Sungai Geringging
7	KPPD Koto Timur Sungai sarikdan sekitarnya	Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Koto Timur - Sungai Sariak Pengembangan Kawasan Wisata Agro-Culture

2.5 Rencana Pusat Kegiatan

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman, sistem perkotaan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebagai berikut:

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Padang- Lubuk Alung – Pariaman sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;

Kawasan Perkotaan Parit Malintang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan;

Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) yang berfungsi melayani satu atau lebih kecamatan atau bagian wilayah kabupaten yaitu kawasan Sungai Geringging, Sungai Limau dan Sicincin sebagai pusat kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa dan pengolahan hasil pertanian;

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan lingkungan yang meliputi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, 2 X 11 Kayu Tanam, Patamuan, Padang Sago, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, IV Koto Aur Malintang, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sariak, Batang Gasan, dan Batang Anai.

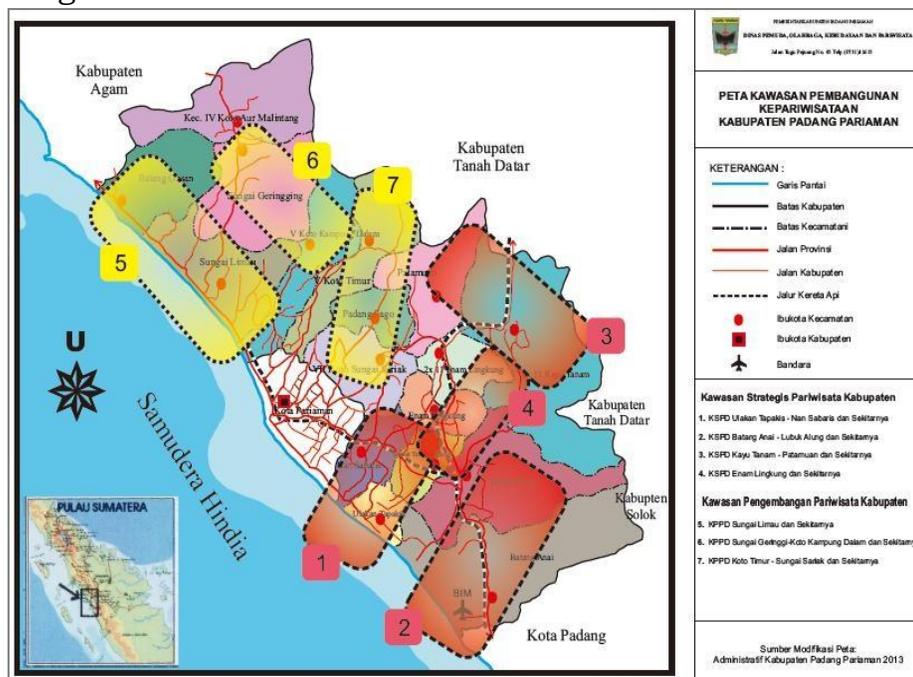
Secara lebih rinci, rencana pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada table di bawah ini:

No	Rencana Pusat Kegiatan	Lokasi Kawasan	Fungsi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kecamatan Batang Anai Kecamatan Lubuk Alung Kecamatan Ulakan Tapakis Kecamatan Nan Sabaris	Pelayanan kegiatan ekonomi kawasan Metropolitan PALAPA
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kecamatan Parit Malintang	Pusat kegiatan Pemerintahan kabupaten Pusat kegiatan sosial (pendidikan dan kesehatan) kabupaten.
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kecamatan Sungai Geringging Kecamatan Sungai Limau Kecamatan Sicincin	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan. Pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian Pusat kegiatan sosial bagian wilayah kecamatan
4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kec. Sintuk Toboh Gadang Kec. Ulakan Tapakis Kec. Nan Sabaris Kec. 2 X 11 Kayu	Pusat kegiatan sosial dalam kecamatan. Pusat kegiatan administrasi dalam kecamatan. Pusat kegiatan

Tanam
 Kec. Patamuhan
 Kec. Padang Sago
 Kec. V Koto
 Kampung Dalam
 Kec. V Koto Timur
 Kec. IV Koto Aur
 Malintang
 Kec. Enam
 Lingkung
 Kec. VII Koto
 Sungai Sariak
 Kec. Batang
 Gasan
 Kec. dan Batang
 Anai

Sumber: Hasil analisis RTRW 2018

Gambar 2.4. Peta kawasan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber RIPPDA Padang Pariaman 2014 - 2025

Bagian III ANALISIS KESIAPAN DAERAH

3.1. Analisa Kesiapan Struktur

Kesiapan struktur merupakan bagian dalam analisis kesiapan Kabupaten/ Kota menuju Smart City. Dalam hal ini, kesiapan struktur terdiri dari kesiapan sumber daya manusia (SDM), kesiapan sumber daya pemerintahan dan kemampuan anggaran. Kesiapan yang dilakukan, nantinya akan digunakan dalam melakukan analisis kesiapan untuk mendukung Smart City. Berikut adalah jabaran singkat dari masing-masing kesiapan struktur.

A Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Penduduk

Secara demografis, jumlah penduduk di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 sebanyak 411.003 jiwa, yang terdiri dari 202.400 laki-laki dan 208.603 perempuan, sedangkan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 408.612 jiwa (201.130 laki-laki dan 207.482 perempuan}. Kepadatan

penduduk pada tahun 2017 terhitung 309 jiwa/Km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Batang Anai yakni 46.883 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kecamatan Padang Sago yakni. 8.377 jiwa. Untuk jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman (jiwa) tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Persentase
1	BatangAnai	46 883	11.41
2	LubukAlung	45 214	11.0
3	SintukTobohGadang	18 751	4.56
4	UlakanTapakis	19 681	4.79
5	Nan Sabaris	28 123	6.84
6	2 x 11 EnamLingkung	19 065	4.64
7	EnamLingkung	19 973	4.86
8	2 x 11 K yuTanam	26 795	6.52
9	VII Koto sungai sariak	35 131	8.55
10	Patamuan	16 563	4.03
11	Padang Sago	8 373	2.04
12	V Koto Kampung Dalam	23 471	5.71
13	V Koto Timur	14 830	3.61
14	Sungai Limau	28 803	7.01
15	BatangGasam	10 911	2.65
16	Sungai Geringging	28 045	6.82
17	IV Koto AurMalintang	20 391	4.96
	Jumlah	411 003	

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2018

2. Penduduk Berdasarkan Umur

Selain berdasarkan sebaran tempat tinggal, komposisi penduduk juga dapat dilihat berdasarkan kelompok umur yang dapat digunakan untuk melihat Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio), yang menggambarkan beban penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Angka beban ketergantungan memberikan gambaran perbandingan antar jumlah penduduk yang produktif (15-64 tahun) dengan yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas).

Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Padang Pariaman masuk pada kategori tinggi karena angka ketergantungan berada pada tingkat 63.6, yang berarti bahwa tiap 100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung beban sekitar 63 jiwa penduduk yang tidak produktif. Rincian komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Padang Pariaman (Jiwa) Tahun 2017

No	Rentang Usia (5 tahun)	Jumlah(Jiwa)	Persentase (%)
1	0-4	40.366	10%
2	5-9	43.294	11%
3	10-14	44.664	11%
4	15-19	37.951	9%

5	20-24	26.781	7%
6	25-29	25.169	6%
7	30-34	25.112	6%
8	35-39	25.591	6%
9	40-44	25.613	6%
10	45-49	23.203	6%
11	50-54	21.852	5%
12	55-59	20.571	5%
13	60-65	19.373	5%
14	65+	31.463	8%
	Jumlah	411.003	100,00

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2018 (BPS)

3. Penduduk 15 tahun Keatas Yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah Penduduk di Kabupaten Padang Pariaman usia 15 tahun keatas yang bekerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Di Kabupaten Padang Pariaman (Jiwa) Tahun 2017

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak/Belum tamat sekolah	47.176	27,79
2	Sekolah Dasar	31.888	18,78
3	SMP /MTs	31.251	18,41
4	SMA/MA/SMK sederajat	42.152	24,83
5	Diploma	3.628	2,14
6	DIV/Si/S2/S3	13.674	8,05
	Jumlah	169.769	100,00

Sumber : Padang Pariaman dalam angka, BPS 2018.

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas penduduk Kabupaten Padang Pariaman usia 15 tahun keatas yang bekerja berlatarbelakang tidak/belum tamat sekolah, yakni sebanyak 47.176 jiwa (27.79%). Sementara pekerja dengan latarbelakang tingkat pendidikan D/IV/S1/S2/S3 hanya 13.674 jiwa (8,05%).

4. Tenaga Kerja dan Pengangguran Kabupaten Padang Pariaman

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman antara lain bisa dilihat dari indikator

rasio penduduk yang bekerja. Selama tahun 2013 sampai dengan 2017. Rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dari 38,63% di 2013 menjadi 41,24% di 2017. Di waktu yang sama, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 3.07% di tahun 2013 menjadi 2.74 % di tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Yang Bekerja Dan Persentase Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013-2017

Padang Pariaman	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penduduk yang bekerja (%)	38.63	40.92	38.90	38.86	41.24
Tingkat pengangguran terbuka (%)	3.07	3.48	2.40	2.39	2.74

5. Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Mata Pencaharian di Kabupaten Padang Pariaman Sangat beragam antara lain berusaha sendiri, berusaha di bantu buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga berikut merupakan rincian jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Berusaha sendiri	38.362	22,6
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	36.318	21,4
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5.312	3,1
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	45.515	26,8
5.	Pekerja Bebas di pertanian	16.226	9,6
6.	Pekerja Bebas di non pertanian	10.758	6,3
7.	Pekerja Keluarga	19.278	11,4
	Jumlah	169.769	100

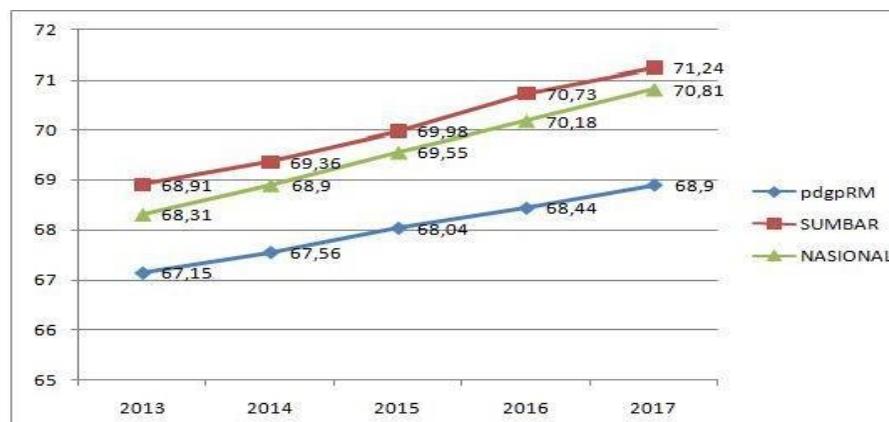
Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas jenis mata pencaharian penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja adalah buruh/karyawan/ pegawai, sebanyak 45.515 jiwa atau 26,8%. Jenis mata pencaharian terbanyak kedua adalah Berusaha Sendiri (22,6%), dan Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (21,4%).

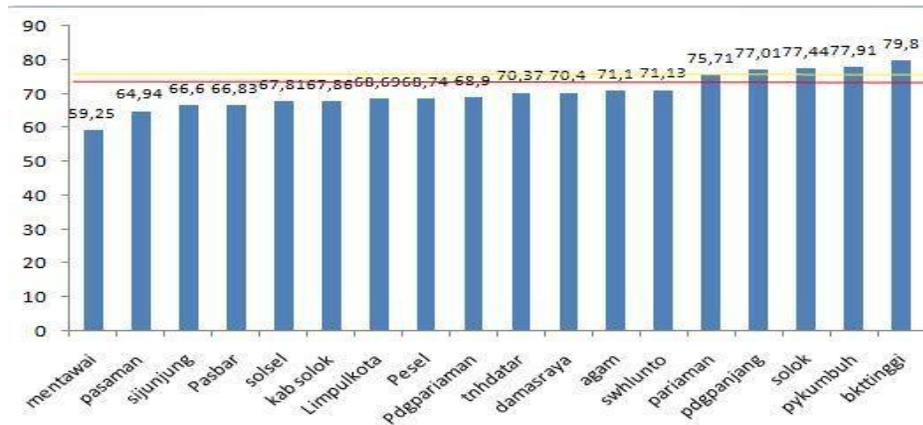
6. Indek Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman bergerak ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 67.15, lalu meningkat menjadi 67.56 pada tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 68.04 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Padang Pariaman sebesar 68.44, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 68.90. Akan tetapi, Perkembangan IPM Kabupaten Padang Pariaman selalu lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Sumatera Barat dan IPM Nasional dari tahun 2013 s.d 2017. Perkembangan IPM Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar yang tersaji dibawah ini:

Gambar 3.1 Perbandingan IPM Padang Pariaman dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2013 s.d 2017



Gambar 3.2 IPM Padang Pariaman dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017



7. Indikator Kesiapan Sumberdaya Manusia

Kesiapan SDM merupakan salah satu indikator struktur daerah yang membicarakan tentang sejumlah komponen sebagaimana dijelaskan dalam panduan penyusunan Masterplan Smart City. Komponen-komponen tersebut nantinya akan digunakan dalam melakukan analisis.

kualitas sumber daya manusia. Adapun komponen SDM yang telah diisi beserta nilai/kondisi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Analisis Kualitas SDM Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			baik	sedang	buruk
1	Jumlah komunitas minat bakat/hobi/kreatif di daerah	10 komunitas	√		
2	Adanya komunitas pengembang/developer perangkat lunak TIK di daerah	1 Komunitas	√		
3	Adanya digital startup di daerah	1	√		
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	6 perguruan Tinggi		√	
5	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi pernah ada dari pemerintah daerah	Tidak			√
6	Jumlah tindakan Pelanggaran ketertiban umum dalam satu	PEKAT, PKL DI setiap pasar			√

	tahun		
7	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	171	√
8	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satutahun	Terjadi vandalisme lampu jalan/ pencurian	√
9	jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun		√

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 10 komunitas bakat di Kabupaten Padang Pariaman, namun hanya ada 1 komunitas pengembang/ developer perangkat lunak TIK di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Relawan TIK. Selain itu, juga diketahui Padang Pariaman telah memiliki satu digital starup yaitu AJO (Antar Jemput Online). Terdapat 6 Perguruan Tinggi yang terdiri dari:

- dua Perguruan Tinggi Negeri (Politeknik Pelayaran dan Akademi Komunitas TIK),
- dua Perguruan Tinggi Swasta bidang Kesehatan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Nantongga dan STIKES Sumbar, dan
- dua Pendidikan Tinggi Keguruan Swasta yaitu STKIP YDB dan STKIP Nasional.

Kualitas sumber daya manusia, juga membahas tentang pelanggaran ketertiban umum, tindakan perusakan fasilitas umum dan kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu

tahun terakhir. Ketiga komponen tersebut tidak ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini, menunjukkan bahwa kualitas SDM Kabupaten Padang Pariaman tergolong “baik”

B. Sumber Daya Pemerintahan

1. Jumlah dan Latar Pendidikan Pegawai di Lingkup Pemerintahan.

Latar belakang pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: yang berlatar belakang Teknologi Informasi Komputer (TIK) dengan jenjang pendidikan D3, S1, S2 maupun S3 dan berlatar belakang non TIK atau jenjang pendidikan S2 keatas. Berikut merupakan data jumlah Sumber Daya Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017:

Tabel 3.7 Jumlah Pegawai Opd, Latar Pendidikan TIK Dan Jenjang Pendidikan S-2 Keatas Di Kabupaten Padang Pariaman 2017

No	Nama SKPD/ Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berlatar belakang TIK (D3/S1/S2/S 3)	Jumlah Pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas
1	Sekretariat Daerah	77		17

2	Sekretariat DPRD	27		2
3	INSPEKTORAT	41		12
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22	1	5
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28	3	5
6	Dinas Kesehatan	75	3	10
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	38	16	10
8	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	43		5
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	32	4	4
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133		8
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26		6
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	33	1	4
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	145	1	24
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	54	1	7
15	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil menengah	52		6
16	Dinas Perhubungan	34	1	2
17	Dinas Perikanan	39		3
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	146		7
19	Dinas Peternakan dan	39		6

	Kesehatan Hewan			
20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	50		2
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32		8
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53	1	9
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	1	4
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	52	2	11
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	36	2	7
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10		1
27	Kecamatan Batang Anai	18		1
28	Kecamatan Lubuk Alung	11		1
29	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12		0
30	Kecamatan Ulakan Tapakis	11	1	2
31	Kecamatan Nan Sabaris	13		1
32	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung	13		1
33	Kecamatan Enam Lingsung	17		2
34	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	9		2
35	Kecamatan VII Koto Sungai Sarik	11		0
36	Kecamatan Patamuan	13		0
37	Kecamatan	11		1

	Padang Sago			
38	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	12		0
39	Kecamatan V Koto Timur	12		1
40	Kecamatan Sungai Limau	14		1
41	Kecamatan Batang Gasan	9		0
42	Kecamatan Sungai Geringging	12		2
43	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	11	1	0
44	RSUD Padang Pariaman	128	3	12
45	UPT Dinas Kesehatan	882		9
46	UPT Dinas Pendidikan	2742		10
47	TK Se Kab. Padang Pariaman	60		0
48	SMP se Kab. Padang Pariaman	1285		12
49	PNS Lainnya	231		18
	Jumlah	6.830	42	257

Sumber Padang Pariaman dalam angka 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai berlatarbelakang TIK dari tingkat pendidikan D3/S1/S2/ S3 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman hanya sebanyak 42 orang atau 0,61%. Namun demikian, terdapat 257 pegawai (3,57%) yang berlatar belakang pendidikan S2 ke atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga TIK masih terbatas.

Indikator Kesiapan Sumber daya Pemerintahan

Dalam pedoman penyusunan Masterplan Smart City 2019, dijelaskan bahwa untuk menuju Smart City Kabupaten Padang Pariaman diperlukan data terkait dengan kesiapan sumber daya pemerintahan, dimana komponen yang dimaksudkan telah dijabarkan di dalamnya. Komponen kualitas sumber daya pemerintahan membahas tentang pegawai dengan jenjang S2 ataupun di atasnya, pegawai dengan latar belakang TI, relawan TIK, presentase jumlah komputer terhadap jumlah pegawai, presentase pegawai mulai usia 25 sampai dengan diatas 50 tahun. Selain itu juga membahas tentang ketersediaan jaringan broadband access, ketersediaan jaringan LAN/WAN di pemerintahan, serta ketersediaan berbagai sistem informasi di lingkungan pemerintahan. Komponen-komponen tersebut kemudian dilengkapi oleh OPD Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan digunakan dalam menyusun analisis kualitas sumber daya pemerintahan guna mendukung Smart City Kabupaten Padang Pariaman. Berikut merupakan tabel analisis kualitas sumber daya pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.8. Analisis Kualitas SDM Pemerintahan

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interprestasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Pegawai dengan jenjang pendidikan S2 keatas	4.02 %			√
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu Komputer/Teknik Informatika	85 orang			√
3	Jumlah relawan TIK di daerah	28 orang kota padang dan sekitarnya	√		
4	Persentase jumlah unit komputer (PC & laptop) terhadap jumlah pegawai	40,55 %	√		
5	Persentase pegawai berusia 50 tahun keatas terhadap jumlah pegawai	51,30 %	√		
6	Persentase pegawai berusia 40-50 tahun terhadap jumlah pegawai	27,54%	√		
7	Persentase pegawai berusia 25-40 tahun terhadap jumlah pegawai	28,21%		√	
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	120 daftar kengjap ada	√		
9	Persentase ketersediaan jaringan broadband	100 %	√		

	acces terhadap jumlah kantor pemerintahan				
10	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di akntor pemerintahan	100%	√		
11	Jumlah lokasi wireles internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintah	66 lokasi	√		
12	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan	1 dikelola sendiri namun belum sesuai ISO		√	
13	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Belum disahkan		√	
14	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperable	Belum ada			
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperable	Belum ada			
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperable	Belum ada			
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperable	Belum ada			
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperable	Belum ada			
19	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperable	Belum ada			
20	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperable	SimRS SIMPEL, SIPENANGKIS SIPAKEM, KOPI DARAT			

Tabel di atas menunjukkan tidak semua komponen penilaian kualitas SDM pemerintahan yang sudah memiliki penilaian. Dari 20 komponen yang dinilai, hanya terdapat 13 komponen yang sudah tersedia. Mayoritas komponen yang dinilai dalam kondisi baik, yakni terdapat 8 komponen. Sementara komponen yang dinilai sedang sebanyak 3, dan buruk sebanyak 2. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas SDM di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman cukup baik.

C. KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

1. Kondisi PDRB Kabupaten

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku maupun harga konstans setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk PDRB atas harga berlaku pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 1.672.534,2 juta rupiah dari Rp. 17.532.873,3 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi Rp. 19.205.407,5 juta rupiah pada tahun 2017. Demikian halnya jika dilihat berdasarkan nilai konstan, PDRB meningkat dari Rp 11.697.040 menjadi Rp 12.346.587.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tersebut didukung oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Sektor yang paling dominan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tersebut adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar Rp 6.372.815,9 (33,2%) diikuti dengan Pertanian, Kehutanan, dan Pertanianyangberkontribusisebesar Rp. 3.731.537,4 (19,4%).

Tabel 3.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017	
		Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans						
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.985.060,13	2.311.660,80	3.263.103,80	2.419.158,90	3.488.872,1	2.480.494,2	3.731.537,4	2.580.351,2
2	Pertambangan dan penggalan	885.625,87	613.225,75	1.004.401,00	653.664,40	1.028.331,7	668.107,7	1.097.524,8	696.430,3
3	Industri pengolahan	1.708.078,70	1.452.095,35	1.759.893,00	1.488.073,9	1.883.643,2	1.551.134,4	1.949.723,6	1.593.125,9
4	Pengadaan listrik dan gas	2.953,70	3.168,13	4.304,40	3.295,90	5.005,4	3.647,6	6.001,9	3.796,2

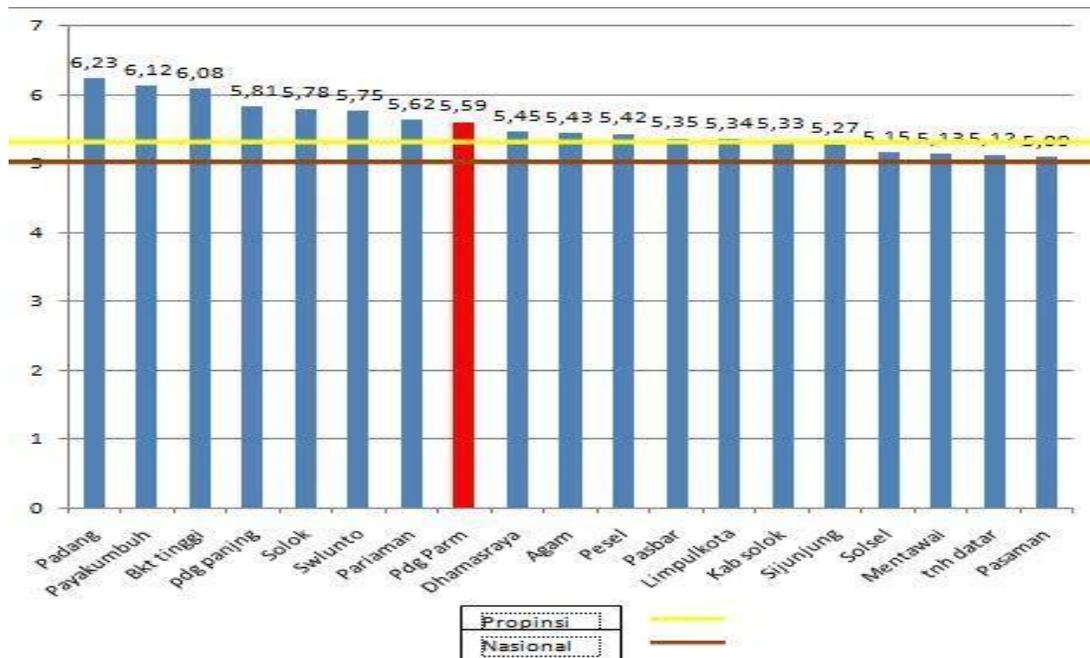
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5.670,97	5.377,28	6.467,30	5.657,40	7.253,1	6.027,2	7.843,4	6.270,9
6	Konstruksi	1.094.073,25	843.961,23	1.222.881,00	893.806,60	1.291.854,8	926.580,9	1.415.070,8	999.829,4
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	1.191.533,71	1.029.652,30	1.316.013,00	1.089.803,00	1.475.558,2	1.156.316,4	1.569.540,6	1.213.926,6
8	transportasi dan pergudangan	3.965.014,73	2.269.453,70	4.794.054,30	2.493.974,90	5.597.003,0	2.721.975,7	6.372.815,9	2.931.746,5
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	112.573,00	82.158,60	129.134,00	87.755,00	147.694,6	93.852,2	159.050,9	99.913,9
10	Informasi dan komunikasi	389.148,71	383.064,00	400.497,00	19.396,60	444.219,4	459.815,5	480.487,6	491.790,8
11	Jasa keuangan dan Asuransi	203.842,00	169.086,20	223.160,30	176.550,60	244.400,5	185.581,0	261.229,3	190.868,8
12	Real Estat	132.464,00	108.204,80	145.280,50	113.350,90	156.247,6	118.295,9	164.989,1	123.015,9
13	Jasa perusahaan	9.918,34	8.697,10	11.229,40	9.346,20	12.334,6	9.963,2	12.987,2	10.252,8
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosialwajib	653.425,85	533.095,60	669.848,90	557.291,60	737.175,7	584.431,7	778.378,6	610.200,0
15	Jasa Pendidikan	576.798,55	448.119,30	635.244,80	479.532,60	725.032,8	518.998,2	847.757,9	567.775,2
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	75.433,58	60.191,10	79.495,20	64.090,60	87.264,9	68.923,2	95.178,9	74.864,4
17	jasa lainnya	160.775,00	123.052,29	175.878,40	130.702,40	200.981,7	142.998,9	228.280,8	152.430,2
	Total PDRB	14.152.525,98	10.444.263,5	15.845.881,2	11.085.450,5	17.532.873,3	11.697.040,00	19.205.407,5	12.346.587,0

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2018

2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 sebesar 5.59. Berada di urutan ke-8 setelah kota pariaman jika dibandingkan dengan 19 Kabupaten yang berada di propinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan Propinsi dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 adalah lebih tinggi.

Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017



3. Penggunaan Anggaran Pengembangan Program Smart City Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan alokasi anggaran pembiayaan program Smart City Kabupaten Padang Pariaman diketahui bahwa total alokasi anggaran sebesar Rp. 15.292.104.400,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD 2019. Peruntukkan penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10. Alokasi Anggaran Pembiayaan Smart City

No	Sumber Anggaran	Peruntukkan Penggunaan Anggaran	Jumlah Nominal	Keterangan
1	APBD 2019	Informasi dan komunikasi publik sertapengelolaan opini publik	631.013.000	diskominfo Bag humas
2	APBD 2019	pengembangan jaringan dan komunikasi informasi	65.045.000	diskominfo
3	APBD 2019	penyediaan jasa bandwith/internet daerah	2.035.390.000	diskominfo
4	APBD 2019	pengembangan sumberdaya keamanan informasi	129.299.000	Diskominfo
5	APBD 2019	pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan jaringan	91.951.400	Diskominfo
6	APBD 2019	penyediaan colocation server	86.889.500	Diskominfo
7	APBD 2019	pengembangan sumberdaya keamanan sistem informasi	100.884.500	Diskominfo
8	APBD	pembangunan command	1.614.550.000	Diskominfo

	2019	center Padang Pariaman		
9	APBD 2019	pengembangan egov dan implementasi Smart City	1.228.650.000	Diskominfo
10	APBD 2019	pengelolaan data persandian dan statistik	262.764.800	Diskominfo
11	APBD 2019	Monitoring dan Evaluasi (Operasional Aplikasi SIgA)	21.950.000	DPPKB
12	APBD 2019	Pengadaan sarana dan Prasana (komputer BALAI penyuluh KB)	100.000.000	DPPKB
13	APBD 2019	Belanja modal CCTV	17.500.000	DKP
14	APBD 2019	operasional pelayanan satu pintuk [ops simple]	27.000.000	DPMPTP
15	APBD 2019	Monitoring dan Evaluasi (Operasional Aplikasi SIgA)	20.000.000	DPMPTP
16	APBD 2019	Operasional BKOL [BKOL ONLINE]	50.000.000	Koperindag
17	APBD 2019	peltihan kewirausahaan, manajemen koperasi	385.000.000	Koperindag
18	APBD 2019	penyelenggaraan koordnasi budaya baca [pustaka keliling]	95.500.000	Arsip pustaka
19	APBD 2019	admoimistrasi perkantoran [operasional simda keuangan gaji dan aset	16.200.000	arsip pustaka
20	APBD 2019	pengembangan minat budaya baca	33.700.000	Arsippustaka
21	APBD 2019	revitalisasi pju [smart pju]	1.249.000.000	Dishub
22	APBD 2019	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	1.052.000.000	Disos
23	APBD 2019	program penataan administrasi kependudukan [Pengelolaan SIAK]	2.443.430.200	Disdukcapil
24	APBD 2019	Pengelolaan e planing, simda online dan LAKIP online	1.384.387.000	seluruh opd
25	APBD 2019	pengelolaan e puskesmas	300.000.000	PUSKESMAS
26	APBD 2019	pengelolaan PSC 119 dan belanja TIK	1.000.000.000	DINKES
27	APBD 2019	Pengelolaan SIM RS	350.000.000	RSUD
28	APBD 2019	Belanja TIK RSUD	500.000.000	RSUD
29	APBD 2019	Call center 112	225.000.000	BPBD
		Jumlah	15.517.104.400	

Sumber : APBD Padang Pariaman 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran pembiayaan Smart City akan diperuntukan untuk 30 item kegiatan dan dikelola oleh sejumlah SKPD/ Unit Kerja. Program penataan administrasi kependudukan dan penyediaan jasa bandwidth/internet daerah merupakan dua item kegiatan dengan rencana anggaran terbesar, masing-masing Rp 2.443.430.200 dan Rp 2.035.390.000. Adanya rencana kegiatan dan anggaran ini menunjukkan komitmen yang kuat pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengembangkan Smart City.

4. Indikator Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan anggaran dalam pedoman penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Padang Pariaman merupakan input dalam analisa kapasitas keuangan daerah. Dalam hal ini, terdapat beberapa komponen yang dibutuhkan dalam mendukung Smart City Kabupaten Padang Pariaman, di antaranya digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 3.11. Analisis Kapsistas Keuangan Daerah

NO	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interprestasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	16,0%		√	
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	0 M	√		
3	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah	43%	√		
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah	20%	√		
5	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2019	15,29 M	√		
6	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2018	6 M	√		
7	Jumlah program pembangunan untuk mendukung Smart City di daerah	29	√		
8	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah				√

9	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung Smart City	CSR	√
---	---	-----	---

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai kapasitas keuangan daerah masuk dalam kondisi baik. Hanya ada satu komponen yang masuk dalam kondisi buruk yaitu 'nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah'. Dikatakan buruk karena belum diketahui berapa nilai investasi yang masuk untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

3.2. Analisa Kesiapan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara Kabupaten/kotayang meliputi fasilitas transportasi (jalan dan jembatan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota/kabupaten.

Kesiapan infrastruktur merupakan salah satu dari tiga kesiapan dalam mendukung Smart City Kabupaten Padang Pariaman Kesiapan infrastruktur terdiri dari kesiapan infrastruktur fisik, infrastruktur digital serta infrastruktur sosial. Ketiga kesiapan infrastruktur tersebut memiliki komponen yang telah dijelaskan dalam pedoman penyusunan masterplan Smart City tahun 2019.

A. Infrastruktur Fisik

Ditinjau dari infrastruktur daerah, jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Sarana jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu tempat ke tempat lain. Menurut panjangnya, jalan raya di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2017 adalah 2.251,74 Km, dengan rincian status Jalan Negara 83,57 Km, Jalan Propinsi 95,77 Km dan Jalan Kabupaten 2.072,40 Km. Di sektor pendidikan, Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 memiliki 3 unit TK Negeri dan 114 TK swasta. Untuk tingkat pendidikan dasar, terdapat SD negeri dan swasta pada tahun 2017 sebanyak 408 unit, sementara jumlah sarana pendidikan dasar Islam Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 9 unit. Pada pendidikan tingkat menengah pertama terdapat 58 unit SLTP negeri, 2 unit SLTP swasta, dan 28 unit Madrasah Tsanawiyah. Untuk tingkat pendidikan menengah, telah tersedia 25 unit SMA, serta 12 unit Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta. Tidak hanya itu, Kabupaten Padang Pariaman juga telah memiliki 4 perguruan tinggi swasta (STKIP YDB, STIKES Nan Tongga, AKBID Sumbar dan STKIP Nasional), dan 2 unit Perguruan Tinggi negeri, yaitu AKPER UNP dan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.

Di sektor kesehatan, Seluruh kecamatan yang di Kabupaten Padang Pariaman sudah memiliki Puskesmas. Beberapa kecamatan bahkan memiliki Puskesmas lebih dari 1 unit, yaitu di Kec. Lubuk Alung, Kec. Batang Anai, Kec. 2 x 11 Enam Lingkung, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kec. VII Koto Sei Sariak, Kec. V Koto Timur, Kec. V Koto Kampung Dalam dan Kec. Sungai Geringging. Selain Puskesmas, Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki 1 unit Rumah Sakit milik Pemda Kabupaten Padang Pariaman dan 1 unit Rumah Sakit Paru milik Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Sarana kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman adalah 1 unit

sarana Instalasi Farmasi dan 1 unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang keduanya merupakan UPTD Type A dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu di Kabupaten Padang Pariaman Juga telah memiliki Gedung PSC 119 yang di bangun tahun 2017.

Tabel 3.12. Analisis Kapasitas Infrastruktur Fisik Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interprestasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	63.8% Diaspal 1.248,90		√	
2	persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	63,8%		√	
3	persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	80%	√		
4	persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	95%	√		
5	adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Belum ada			√
6	adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	52 pasar	√		
7	persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	100	√		
8	persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	100	√		

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai kapasitas Infrastruktur daerah masuk dalam kondisi Baik. Hanya ada dua komponen yang masuk dalam kondisi sedang, yaitu persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik dan persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal. Satu komponen masih dinilai buruk karena belum tersedia.

B. Infrastruktur TIK

Salah satu komponen yang sangat penting dalam penerapan Smart City adalah Infrastruktur Teknologi Informatika Komputer (TIK). Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah membangun dan mengembangkan beberapa infrastruktur sebagai berikut :

1. Di wilayah Kabupaten Padang Pariaman telah tersedia jaringan 4G/3G dari berbagai operator seperti Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren dan lain-lain. Hampir semua wilayah di Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 103 Nagari/Desa telah terjangkau dan dapat memanfaatkan akses jaringan internet ini dengan baik. Hanya ada beberapa tempat yang masih masuk dalam blank spot.

2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menyediakan Broadband Acces Internet dengan kapasitas 500 Mbps dan Kapasitas Metro sebesar 980 Mbps untuk melayani 24 OPD, 17 Kecamatan, 1 Rumah Sakit, 25 Puskesmas

serta beberapa unit layanan di Pemerintah Daerah Padang Pariaman.

3. Pada saat ini, kapasitas akses internet terpusat di Dinas Kominfo dan untuk pengembangannya pada tahun 2019 ini, akan ditambah sebesar 1030 Mbps untuk didistribusikan pada 103 Nagari/Desa.

4. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Program Dinas Kominfo telah membangun jaringan antar SKPD (Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan) yang terkoneksi dengan kabel FO sepanjang 132 km bekerjasama dengan pihak ke 3. Kemudian dalam pengembangan infrastruktur jaringan, sekarang juga sedang dibangun jaringan yang terkoneksi sampai ke 103 Nagari dengan panjang rentangan kabel FO sepanjang 269 km. Terkait dengan jaringan ini, juga telah terkoneksi jaringan internet antara OPD dan Kecamatan dengan 25 Puskesmas dalam rangka penerapan program e-Puskesmas.

5. Di wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga telah tersedia Hotspot untuk internal Pemerintah sebanyak 70 titik yang berada di area perkantoran OPD, Kecamatan dan Puskesmas. Sedangkan untuk publik juga telah disediakan Hotspot sebanyak 120 titik yang berada pada 103 Taman Digital Nagari dan 17 Taman Digital kawasan Pariwisata.

6. Data Centre Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berada pada 2 tempat yaitu pada Dinas Kominfo dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Kapasitas Data Centre tersebut adalah 4 Server, masing-masing server menggunakan sistem virtual dan firewall. Kapasitas dari Server yang ada tersebut adalah 8,5 Tb.

7. Untuk pengamanan data juga telah disediakan Data Recovery Pemerintah Daerah yang berada di 2 (dua) tempat yaitu Server Dinas Kominfo dan Colocation di Jakarta.

8. Infrastruktur pendukung lainnya, pada Dinas Kominfo juga telah ada Server Location, Network Operation Centre (NOC), Media Centre dan Command Centre mini

Tabel 3.13 Ketersediaan Infrastruktur TIK Daerah Tahun 2019

No	Ketersediaan infrastruktur TIK	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
1	Ketersediaan jaringan 4G/3G	Wilayah Padang Pariaman
2	Ketersediaan Broadband Access	500 Mbps untuk Pemda 210 Mbps untuk Puskesmas
3	Akses internet terpusat (didistribusikan)	Kapasitas: 400 Mbps
4	Jaringan antar SKPD (Instansi pemerintah) (gambar pada lampiran I)	28 OPD 17 Kecamatan 25 Puskesmas 103 Nagari/Desa Jarak Sebaran 132 Km utk OPD dg kabel FO Pihak Ke tiga Icon + Jarak sebaran 269 Km utk Nagari dg kabel FO Pihak Ke tiga Icon +
5	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk publik (gambar pada lampiran 2)	Lingkup Pemerintah Daerah sebanyak 45 Titik Lingkup Publik Area sebanyak 120 Titik
6	Data Center Pemerintah	Terdiri dari 4 server, masing-masing server dg sistim virtual, ferewall, perangkat pendukung jaringan terletak di Kominfo dan BPKD dg Kapasitas 8,5 Tb

7	Data Recovery Center Pemerintah	Kominfo dan Colocation terletak di Jakarta
8	Infrastuktur TIK lain nya (gambar pada lampiran 3)	Server Location, NOC, Media Center, Command Center

Tabel 3.14. Analisis Kapasitas Infrastruktur Fisik Daerah

No	Komponen	Nilai/Kon disi	Interprestasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	100 %	√		
2	Tersedianya jaringan broadband acces untuk masyarakat	70 titik	√		
3	Jumlah lokasi wireless untuk publik	120	√		
4	Persentase rumah tangga yang terlayani	Hampir seluruh	√		
5	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	4 Jam	√		
6	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	50 sekolah		√	
7	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	2	√		

Dari tabel analisis kesiapan infrastruktur digital daerah Kabupaten Padang Pariaman, secara garis besar bahwa untuk jaringan telekomunikasi/internet sudah tersedia di Kabupaten Padang Pariaman dengan kondisi baik. Namun kondisi tersebut masih harus ditingkatkan agar seluruh komponen dapat mencapai target maksimal. Selain itu, internet Kabupaten Padang Pariaman sudah menjangkau sebagian sekolah.

a. Analisa Kesiapan Supra-Struktur (Regulasi dan Kelembagaan)

A. Regulasi

1. Regulasi Yang mendukung Smart City

Regulasi yang mendukung dalam pembangunan Smart City di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 11 peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, 22 Peraturan Bupati Padang Pariaman dan 11 Keputusan Bupati Padang Pariaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5.

2. Indikator Kesiapan Kebijakan Daerah

Kesiapan kebijakan yang dimaksudkan adalah peraturan daerah dalam mendukung program Smart City Kabupaten Padang Pariaman, terdiri tentang

peraturan daerah terkait dengan Dewan Smart City, tim pelaksana, Masterplan Smart City, Program Smart City serta evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi dalam mendukung program Smart City Kabupaten Padang Pariaman. Berikut adalah komponen dari kesiapan kebijakan daerah Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 3.15. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interprestasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	adanya Peraturan Daerah tentang Dewan Smart City Daerah	Belum ada Baru keputusan bupati		√	
2	adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana Smart City Daerah	Belum ada baru keputusan bupati		√	
3	adanya masterplan Smart City daerah				√
4	adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan Smart City Daerah	belum			√
5	adanya visi pembangunan Smart City yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	belum			√
6	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan Program Smart City dalam jangka panjang	belum			√
7	adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program Smart City	belum			√

Berdasarkan komponen kesiapan kebijakan daerah, Peraturan daerah tentang Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City belum tersedia. Keduanya baru diatur dalam Keputusan Bupati Padang Pariaman. Komponen mengenai masterplan Smart City daerah juga baru tahap penyusunan.

B. Kelembagaan

1. Dewan Smart City

Dewan Smart City Daerah merupakan lembaga multipihak yang berfungsi sebagai wujud partisipasi multi-sektor dan multi-elemen terhadap pembangunan Smart City di daerah. Oleh karena itu, Dewan Smart City Daerah haruslah terdiri dari unsur-unsur yang dapat mewakili beberapa elemen, Berikut ini susunan Kedudukan Dewan Smart City Kabupaten Batang sesuai dengan Keputusan Bupati No 316 /KEP/BPP/2019 Tentang Pembentukan Dewan Smart City. Susunan Dewan Smart City Padang Pariaman dapat dilihat pada lampiran 6 tentang susunan Keanggotaan

Dewan Smart City

2. Tim Pelaksana Smart City

Tim Pelaksana Smart City Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah multi-sektor yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan program dan kegiatan Smart City di daerah. Tim Pelaksana Smart City Daerah berasal dari OPD-OPD yang terkait dengan pelaksanaan Smart City di daerah. Struktur Tim Pelaksana Smart City Daerah dari Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 317/KEP/BPP/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Padang Pariaman. Susunan Tim Pelaksana Smart City Padang Pariaman dapat dilihat pada lampiran 7 tentang susunan Keanggotaan Tim pelaksana Smart City.

3. Kesiapan Kelembagaan Daerah

Analisis terhadap kesiapan kelembagaan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.16. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah Daerah

No	Komponen	Nilai / Kondisi	Interprestasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Dewan Smart City Daerah	Ada	√		
2	Adanya Tim Pelaksana Smart City Daerah	Ada	√		
3	Adanya SOP Smart City daerah	Belum			√
4	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana Smart City di setiap OPD	Belum			√

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kesiapan kelembagaan daerah Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam kategori baik. meskipun demikian, Tata Pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana Smart City di setiap OPD belum tersedia, dan SOP Smart City daerah saat ini sedang tahap penyusunan.

C. Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Analisis terhadap kesiapan organisasi masyarakat daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.17. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interprestasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	0			
2	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung Smart City	0			

3	jumlah forum swadaya masyarakat pendukung Smart City	0
4	dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung Smart City	ada
5	jumlah forum pendukung Smart City yang memiliki sekretariat definitif	0
6	adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan Smart City Daerah	0

Sumber : Diolah dari berbagai data dan observasi, 2019

Dari tabel diatas, diketahui bahwa untuk kesiapan organisasi masyarakat daerah masih jauh dari kondisi baik. Dari 6 komponen yang dinilai hanya ada satu komponen yang dapat diisi, yakni dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung Smart City. Untuk komponen lainnya belum dapat terisi karena belum tersedia.

Bagian IV

ANALISIS KESENJANGAN DAERAH

4.1. Smart Governance

A. Kekuatan

1. Komitmen kuat pemerintah daerah dalam pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, efektif efisien dan transparan; dengan adanya regulasi, Peraturan Bupati No. 20 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (dalam Pengembangan menjadi SPBE);
2. Tersedianya kelembagaan Dewan Smart City yang diatur melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 316/KEP/BPP/2019 tentang Dewan Smart City dan Keputusan Bupati Nomor 317/KEP/BPP/2019 tentang Tim Pelaksana Smart City;
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), dari 6.830 pegawai pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar mempunyai jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 2.747 (40.22%) dan sebanyak 257 (3,76%) orang dengan jenjang pendidikan Strata Dua (S2);
4. Terpilihnya kabupaten Padang Pariaman dalam program gerakan 100 Smart City sehingga memperoleh pendampingan langsung dari Kementerian untuk menyusun masterplan Smart City;
5. Komitmen dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan motto yang selalu digaungkan “Tiada hari tanpa inovasi”, dibuktikan dengan didapatnya Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman INOVASI Award pada tahun 2018;
6. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang sudah memadai dimana di wilayah Padang Pariaman sudah memiliki jaringan 4G dan 3G, ketersediaan Broadband Access Fiber Optik untuk Pemerintahan 610 Mbps dengan pendistribusian jaringan ke 28 OPD, 17 Kecamatan dan 25 Puskesmas;
7. Sistem pelayanan publik di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sudah mengadopsi SPBE yang terintegrasi. Seperti E-Planning dengan

keuangan, dukcapil dengan sosial.

B. Kelemahan

1. Pemahaman Smart City yang komprehensif masih perlu dibangun baik internal maupun eksternal;
2. Kemitraan atau kolaborasi penganggaran dalam implementasi Smart City masih terbatas hanya melalui APBD saja. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi tentang CSR; Digital Divide (gap penguasaan digital) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang masih tinggi. Sehingga memperlambat administrasi eksternal maupun internal;
3. Perencanaan dan pelaksanaan program TIK setiap OPD belum sinkron dan masih belum terkoordinir dengan baik;
4. Jumlah SDM TIK yang hanya 42 orang dan pendistribusiannya belum merata di seluruh OPD;
5. Ego sektoral OPD dalam melakukan investasi TIK yang tidak selaras dengan konsep pengembangan e-government.

C. Peluang

1. Adanya kebijakan nasional terkait keterbukaan data kependudukan dimanfaatkan dalam pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif dan juga untuk ketepatan sasaran penerima manfaat dari pelayanan tersebut;
2. Adanya Dana Insentif Daerah dari kementerian yang dapat digunakan bagi pemerintah daerah yang mengikuti program menuju 100 Smart City;
3. Terdapatnya beberapa perguruan tinggi bidang TIK di propinsi Sumatera Barat yang bisa diajak sebagai mitra dalam membantu pengembangan TIK;
4. Keinginan dari tokoh-tokoh masyarakat dan Wali Nagari untuk meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi berbasis TIK di wilayahnya masing-masing;
5. Kebijakan pemerintah pusat terkait implementasi Smart City [seperti: Perpres SPBE, PP tentang OSS, dan PP tentang Satu Data] yang bisa di pakai oleh pemerintah daerah;
6. Tersedianya aplikasi dan framework aplikasi open source yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan aplikasi penunjang Smart Governance

D. Ancaman

1. Perubahan kepemimpinan daerah yang dapat mempengaruhi proses implementasi dan keterlanjutan program Smart City yang sedang dilaksanakan;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik masih dibayangi stigma kerumitan birokrasi, pungutan liar, dan mindset yang belum berubah;
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan yang membangun terhadap kinerja pemerintahan;
4. Wilayah kabupaten Padang Pariaman yang rawan bencana;
5. Perubahan kebijakan nasional.

4.2. Smart Branding

A. Kekuatan

1. Memiliki destinasi wisata unggulan dan yang populer saat ini di Sumatera Barat adalah Malibou Anai Resort yang berdekatan dengan air terjun lembah Anai. Objek Destinasi Tujuan Wisata yang dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi wisata alam, budaya, minat khusus seperti Lubuk Nyarai, Pantai Arta, Pemandian Tirta Alami, Panorama Gunung Tigo, dan Lubuk Bonta. Ada juga makam Syeh Burhanuddin yang merupakan salah satu wisata religi yang sudah dikenal sampai ke mancanegara;
2. Ada 14 POKDARWIS aktif yang terlibat dalam pengelolaan wisata di kabupaten Padang Pariaman;
3. Perkebunan rakyat yang menghasilkan produk unggulan antara lain :

- Pusat penghasil kelapa terbesar di Sumatera Barat dengan luas lahan produktif
- 25.033 Ha;
- Sebagai daerah pusat kakao wilayah barat Indonesia dengan luas lahan produktif pada tahun 2015 sebesar 8.550 Ha, dengan hasil 8.290.40 ton;
- Perkebunan Pinang dengan Luas lahan 1.238 Ha dimana hasil produksi pada tahun 2017 sebesar 359.27 ton

Termasuk dalam Kawasan Strategis Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2014-2019 dengan istilah PASOPALAPA (Painan - Solok - Padang - Lubuk Alung - Pariaman). Sebuah wilayah metropolitan di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam pengembangan kawasan baru metropolitan;

Termasuk dalam Jalur lalu lintas utama yang menghubungkan seluruh Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dan Sumatera;

Memiliki Bandara International dan menjadi pintu gerbang Sumatera Barat yang merupakan salah satu bagian dari 9 kawasan strategis di Padang Pariaman;

Tersedia stadion besar milik Propinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Alung kenagarian Sikabu yang bisa dipakai olah raga, konser, dan kegiatan lainnya;

4. Sedang dikembangkannya kawasan terpadu sebagai pusat pendidikan di kawasan Tarok;

5. Layanan Perizinan yang terintegrasi dengan OSS dan terinovasi dengan sistem yang telah memiliki sertifikat elektronik.

B. Kelemahan

1. Belum tersedianya tempat Hunian/Hotel yang representatif di Kabupaten Padang Pariaman sehingga tidak banyak pilihan pengunjung wisata;

2. Ketersediaan paket informasi dan profil tentang investasi daerah konperhensif belum menarik;

3. Moda transportasi umum untuk menjangkau objek wisata masih terbatas;

4. Amenitas di destinasi wisata yang masih kurang, seperti toilet, tempat ibadah, kuliner, sarana air bersih, dan homestay;

5. Belum teridentifikasinya serta kurangnya pelaksanaan even-even baik lokal, nasional dan internasional yang diadakan di Kabupaten Padang Pariaman;

6. Belum adanya skala produksi besar untuk ekonomi kreatif;

7. Belum adanya landmark khusus untuk penanda kota yang tematik;

8. Kurangnya penataan pada fasilitas publik seperti taman bermain tempat wisata, restoran yang bisa menjadi sentral kegiatan masyarakat baik untuk hiburan maupun wisata kuliner, yang dapat mengukuhkan smart branding daerah dan mengembangkan sistem informasi pada destinasi wisata daerah yang mudah diakses;

9. Belum adanya ekosistem investasi yang mudah dan efektif untuk menarik para pelaku pariwisata/ bisnis agar menanamkan modalnya;

C. Peluang

Penetrasi dan pemanfaatan TIK untuk mengembangkan investasi dan bisnis di daerah, dan juga sebagai media promosi daerah;

Mengoptimalkan Dana Desa dalam pengembangan wisata dan promosi sesuai dengan kearifan lokal nagari masing-masing, dan juga pengembangan perekonomian lokal melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);

1. Kunjungan wisata ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minang Kabau yang semakin meningkat, sehingga berdampak terhadap kemudahan promosi daerah;

2. Menjamurnya industri kreatif, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), sehingga menjadi media promosi daerah yang efektif;

D. Ancaman

1. Perkembangan informasi hoax yang by design ditambah interaksi media sosial

2. dengan konten negatif yang mendorong terjadinya disharmonisasi;
3. Kabupaten Padang Pariaman berada di zona rawan bencana;
4. Resistensi masyarakat terhadap perubahan.

4.3. Smart Ekonomi

A. Kekuatan

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 sebesar 5.59, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Propinsi sebesar 5.29 dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.07;
2. Tingkat Penggaguran Terbuka di Kabupaten Padang Pariaman yang tergolong rendah yaitu 2,86%;
3. Index Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Padang masuk dalam kategori tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh United Nations Development Program (UNDP);
4. Nilai realisasi investasi PMDN dan Nilai Realisasi Investasi PMA yang selalu meningkat setiap tahun;
5. Pengurusan izin berusaha yang member kemudahan, serta regulasi daerah yang mendukung iklim investasi;
6. Jalur transportasi darat, laut, dan udara yang sangat mendukung;
7. Pengembangan kawasan Tarok City sebagai kawasan pendidikan yang akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat;
8. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 80 perusahaan dengan nilai investasi Rp.165 Milyar;
9. Tersedianya bahan baku yang memadai, seperti untuk industri pengolahan Pangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya.

B. Kelemahan

1. Ketersediaan lahan yang sebagian besar merupakan tanah ulayat, sehingga proses pembebasan dan pemanfaatan lahan memakan waktu cukup lama, dan menghambat pelaku usaha untuk berinvestasi;
2. Belum adanya pemetaan lokasi investasi yang menjadi panduan bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Padang Pariaman;
3. Minimnya proyek strategis nasional di Kabupaten Padang Pariaman
4. Kurangnya pembinaan terhadap pelaku UMKM dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0;
5. Letak wilayah yang berada di jalur pantai barat yang merupakan daerah rawan terjadi bencana alam.

C. Peluang

1. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perawatan kesehatan (health care), turisme (tourism), jasa logistik (logistic services), e-ASEAN, jasa angkutan
2. udara (air travel transport), produk berbasis agro (agrobased products), barang-barang elektronik (electronics), perikanan (fisheries) membuat kondisi saling terkoneksi ke semua sektor tersebut;
3. Meningkatnya intensitas usaha e-commerce dan industri ekonomi kreatif dan pengembangan start up oleh pelaku usaha dan generasi muda;
4. Kebijakan transaksi dengan menggunakan uang digital;
5. Revolusi Industri 4.0 dengan pengaplikasian kecerdasan buatan (artificial intelligence) berpotensi meningkatkan pendapatan global dan kualitas hidup bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
6. Dukungan perantau yang juga ingin membuka usaha di kampung halaman.

D. Ancaman

1. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor free flow of skilled labour (arusbebas tenaga kerja terampil);
2. Revolusi industri 4.0 dengan pemanfaatan teknologi canggih otomatisasi

akan berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja dan dikawatirkan akan meningkatkan jumlah pengangguran

3. UMKM lokal akan kesulitan bersaing dengan investor-investor luar yang lebih kuat dalam permodalan dan penguasaan pasar

4. Kecenderungan budaya merantau bagi usia produktif di kabupaten Padang Pariaman mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia trampil di daerah.

4.4. Smart Living

A. Kekuatan

1. Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 yang pada saat sekarang dalam proses revisi;

2. Telah tersedianya sarana pelayanan kesehatan berupa 25 unit puskesmas di 17 Kecamatan, dan 2 unit rumah sakit;

3. Adanya Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk pelaksanaan Operasional Puskesmas;

4. Tersedianya moda transportasi darat yang memudahkan akses lalu lintas barang dari satu tempat ke tempat lain;

5. Terdapat jumlah daerah irigasi sebanyak 415 titik dengan luas keseluruhan sebesar 25.611 hektar;

6. Pasar nagari dan pasar adat yang tersebar cukup merata di seluruh kecamatan atau nagari;

7. Rumah tangga yang bersanitasi baik sudah mencapai 90%, tidak adanya pemukiman kumuh, dan rumah layak huni mencapai 99.6%;

8. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat mencapai angka 77.32%, cukup baik;

9. Ruang terbuka hijau yang cukup luas, mencapai sebesar 943,99 Ha per HPL/HGB;

10. Polsek dan Satpol PP tersebar di setiap wilayah kecamatan dengan Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2,03 angka/sepuluh ribu;

B. Kelemahan

1. Belum ada lembaga khusus yang menangani permasalahan drainase;

2. Masih terbatasnya jaringan drainase primer, sekunder dan tersier sehingga belum dapat menekan potensi dan rawan banjir;

3. Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dan distribusinya yang belum merata;

4. Belum ada Perda yang mengatur tentang retribusi penyedotan kakus dan atau pemusnahan tinja;

5. Masih kecilnya rasio nagari yang tidak rawan sanitasi (27%) karena pengolahan PLT dan IPAL belum tersedia;

6. Belum tersedianya Pengaturan kemacetan melalui rekayasa lalu lintas memanfaatkan Automatic Traffic Control System (ATCS);

7. Belum mengembangkan pelayanan kegawatdaruratan bencana yang terpadu dan terintegrasi serta dilengkapi early warning system;

8. Belum tersedianya moda transportasi publik yang terintegrasi;

C. Peluang

1. Perkembangan teknologi Informasi yang bisa di manfaatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan, transportasi dan lainnya;

2. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan Sustainable Development Goal's (SDG's) yang dapat dikolaborasikan dengan program daerah;

3. Adanya Program dari Kementerian Kesehatan tentang Nusantara Sehat Individu untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan;

4. Alokasi Anggaran Nagari yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan nagari, akses jalan, irigasi, dan penyelesaian masalah limbah;

5. Dukungan perantau yang selalu memberikan kontribusi untuk kemajuan nagari.

D. Ancaman

1. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami karena secara geografis Kabupaten Padang Pariaman berada di jalur pantai barat sumatera;
2. Disharmonisasi penataan ruang antara daerah, provinsi, dan nasional;
3. Pengaruh globalisasi yang berpotensi akan menggerus tradisi-tradisi dan kearifan lokal Kabupaten Padang Pariaman;

4.5. Smart Society

A. Kekuatan

1. Tersedianya broadband acces di hampir seluruh pelosok nagari, dan fasilitas publik, seperti sarana olah raga, kelompok seni ruang terbuka hijau, dan warung-warung sebagai tempat berinteraksi warga masyarakat;
2. Sarana pendidikan yang mendukung, terdiri dari 329 PAUD, 408 SD/MI, 88 SLTP/MTs dan 27 SMA/MA/SMK, serta Perguruan Tinggi;
3. Adanya dukungan Dana BOS untuk pelaksanaan operasional sekolah;
4. Peran dari ulama, ninik mamak, pemuka masyarakat dan keluarga dalam pengawasan dan pembinaan generasi muda yang masih kuat;
5. Adat istiadat dan agama yang kuat dalam membentengi pengaruh negatif yang masuk.

B. Kelemahan

1. Pengawasan penggunaan internet cenderung lemah, terutama untuk internet di fasilitas publik;
2. Tidak tersedianya sarana komunikasi interaktif digital (forum diskusi) baik antara sesama warga masyarakat maupun antara warga dengan pemerintah daerah;
3. Belum tersedia regulasi tentang Call Center 112.

C. Peluang

1. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan SDG'S pada goal pendidikan didukung Basis Data Terpadu (BDT) untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan bantuan pendidikan;
2. Ketunggalan Identitas Penduduk Berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dapat mengintegrasikan data penerima manfaat dengan pembatasan akses tertentu.
3. Pengabdian masyarakat oleh Perguruan tinggi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui transfer of knowledge;
4. Pemanfaatan alokasi anggaran desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Dana CSR untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan fasilitas umum;
5. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk interaksi sosial;
6. Adanya kelompok sadar bencana sebagai mitra dalam penanggulangan siaga bencana.

D. Ancaman

1. Interaksi Media sosial dengan konten negatif, dan informasi hoax yang akan memicu munculnya masalah sosial di tengah tengah masyarakat;
2. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dengan data penerima manfaat program-program pembangunan lintas sektoral;
3. Bencana alam dan wabah penyakit menular.

4.6 Smart Environment

A. Kekuatan

1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih sudah mencapai 85%;
2. Adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk yang terkelola dengan baik;
3. Komitmen yang kuat pemerintah daerah dalam pengawasan dan penindakan permasalahan pelanggaran hukum terkait perusakan lingkungan;
4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal atau UKL-UPL yang meningkat setiap tahunnya;

5. Adanya regulasi tentang kawasan kumuh melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman nomor 40/KEP/BPP/2018;
6. Telah adanya bank sampah yang di kelola nagari melalui kerja sama KWT dengan BUMNAG di kenagarian pakandangan.

B. Kelemahan

1. Aksesibilitas informasi tentang kualitas lingkungan hidup belum tersedia;
2. Keterbatasan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan energi alternatif dan pelestarian lingkungan;
3. Kurangnya sosialisasi pengelolaan limbah rumah dan tangga dan industri;
4. Tidak tersedianya sarana industri pengelolaan sampah dan limbah, sehingga sampah dan limbah tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik;
5. Tidak tersedianya laboratorium lingkungan hidup dengan sertifikasi ISO dari Komisi Akreditasi Nasional bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup;

C. Peluang

1. Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program sektoral yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup seperti a) kebijakan sektoral 100 0 100 (sanitasi, kumuh, air bersih) dan b) program Kota Tanpa Kumuh [KOTAKU] yang berlokasi di lubuk alung;
2. Alokasi anggaran Nagari (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Dana CSR yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) per desa, Pengelolaan Bank Sampah Desa, dan pemanfaatan energi alternatif;
3. Perkembangan digital yang mendorong pengembangan sensor lingkungan.

D. Ancaman

1. Alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan limbah domestik;
3. Padang Pariaman rawan bencana alam.

Bagian V

ANALISA VISI PEMBANGUNAN SMART CITY

5.1. Analisis Sasaran Smart City

Sasaran Smart City Kabupaten Padang Pariaman dibuat berdasarkan keadaan atau kondisi dari Kabupaten Padang Pariaman, potensi yang ada, serta peluang dan tantangan yang saat ini maupun ke depan akan dihadapi oleh Kabupaten Padang Pariaman. Analisis sasaran Smart City dilakukan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang harus dikerjakan atau direncanakan, seperti perumusan visi misi, pembuatan strategi, hingga program kerja. Oleh karena itu, tahapan analisis sasaran Smart City menjadi penting karena akan menentukan perencanaan di tahap selanjutnya. Berikut adalah sasaran Smart City Kabupaten Padang Pariaman yang dikelompokkan berdasarkan elemen atau dimensi dari Smart City.

1. Smart Governance

Smart governance dapat diartikan sebagai tata kelola yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga smart governance di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari smart governance Kabupaten Padang Pariaman adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi

melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Perbaiki pelayanan antara Government to Government, Government to Business, dan Government to Citizen.

2. Smart Branding

Dimensi kedua dalam Smart City adalah smart branding, yaitu branding daerah yang pintar. Smart branding menjadi salah satu dimensi dalam Smart City karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokalnya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sasaran smart branding Kabupaten Padang Pariaman adalah terwujudnya smart tourism branding yang mampu meningkatkan sektor pariwisata Kabupaten Padang Pariaman. Sektor pariwisata Kabupaten Padang Pariaman merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Geliat wisata di Kabupaten Padang Pariaman sudah sejak lama terjadi, namun belum terdapat pengelolaan yang baik dari seluruh pemangku kepentingan.

Perlahan, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai fokus mengelola pariwisata yang ada. Target yang ingin dicapai dari pengelolaan pariwisata ialah tersusunnya berbagai tema pariwisata sekaligus jenis kegiatan. Pengembangan kegiatan pariwisata dilakukan secara terpadu sehingga wisatawan dapat dengan mudah mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk berwisata ke Kabupaten Padang Pariaman. Smart promotion dengan memanfaatkan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu cara mempromosikan pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman yang dikemas dalam smart tourism branding.

3. Smart Economy

Dimensi ketiga dalam Smart City adalah smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi smart economy Kabupaten Padang Pariaman adalah peningkatan sektor usaha kecil dan menengah dan investasi. Sektor usaha kecil dan menengah belum berkembang secara maksimal di Kabupaten Padang Pariaman. Di lain sisi, sektor tersebut dapat menjadi penggerak perekonomian kota jika dikembangkan bersama sektor perdagangan besar yang telah lama menjadi sektor unggulan Kabupaten Padang Pariaman.

4. Smart Living

Smart Living dapat diartikan secara sederhana sebagai gaya hidup cerdas, cara pandang pola pikir yang berujung pada kreativitas, praktis, dan paradigma kecermatan. Smart living mewakili pandangan orang hidup mengenai semakin perlunya efisiensi, efektivitas, dan kepraktisan dalam gaya hidup. Solusi ini merupakan langkah yang tepat untuk gaya hidup modern saat ini dan akan menjadi hal yang paling mudah dan efisien bagi kehidupan seterusnya. Sasaran smart living Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada tiga aspek sasaran smart living, yakni mewujudkan prasarana kesehatan (health), harmonisasi tata ruang wilayah (harmony), dan menjamin ketersediaan sarana transportasi (mobility).

5. Smart Society

Smart society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran smart society Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari tiga indikator, yakni mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (community), mewujudkan keamanan masyarakat (security), dan membangun ekosistem belajar yang efisien (learning).

6. Smart Environment

Ide dasar dari smart environment di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Sasaran smart environment Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari tiga indikator, yakni mengembangkan program proteksi lingkungan (protection), mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (waste), dan mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan (energy).

5.2. Analisa Visi Pembangunan Daerah

Analisis visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan meninjau keterkaitan dokumen-dokumen perencanaan dengan dimensi Smart City. Keterkaitan tersebut digunakan untuk melihat apakah rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan konsep Smart City atau masih belum mengakomodasi dimensi-dimensi Smart City.

Visi Padang Pariaman Smart City selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG BARU, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA.”

Visi di atas memiliki lima kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Adapun pengertian empat kunci tersebut adalah:

1. Baru memiliki arti suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman.
2. Religius memiliki makna masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sejahtera memiliki arti sebuah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
4. Cerdas memiliki arti sebagai suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.

Tabel 5.1 Misi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

MISI PERTAMA	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI KEDUA	Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Melalui Daya Dukung Sektor Primer Dan Jasa
MISI KETIGA	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Dan Terampil Melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dan Kualitas Tenaga Pendidik
MISI KEEMPAT	Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan

MISI KELIMA	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan
MISI KE ENAM	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur Dan Pelayanan Publik
MISI KETUJUH	Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

Tujuan pada pelaksanaan masing-masing misi dijabarkan berikut:
Tabel 5.2 Tujuan Pelaksanaan Misi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Misi ke 1	Tujuan Pertama	Peningkatan Pengamalan Agama
Misi ke-2	Tujuan Kedua	Meningkatkan Perekonomian Sektor Primer Dan Jasa
Misi ke-3	Tujuan Ketiga	Terwujudnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan
	Tujuan Keempat	Terwujudnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan
Misi ke-4	Tujuan Kelima	Terwujudnya Padang Pariaman Sebagai Daerah Tujuan Wisata
	Tujuan Keenam	Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas
	Tujuan Ketujuh	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
	Tujuan Kedelapan	Terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Yang Aman, Nyaman, Dan Berkelanjutan
	Tujuan Kesembilan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Dan Transportasi
Misi ke-5	Tujuan Kesepuluh	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Misi ke-6	Tujuan Kesebelas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel
	Tujuan Keduabelas	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas
Misi ke-7	Tujuan Ketiga belas	Mewujudkan Ketahanan Bencana

Tabel 5.3 Sinkronisasi Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dengan dimensi Smart City.

Misi	Tujuan	Sasaran	Dimensi Smart City					
			Smart Governance	Smart Branding	Smart Ekonomy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	Peningkatan Pengamalan Agama	Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca al-quran					x	
		Meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang aktif					x	

Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa	Meningkatkan perekonomian sektor primer dan jasa	Meningkatnya Kontribusi Sektor Primer Thdp PDRB							
		Meningkatnya kesejahteraan petani							
		Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap PDRB							
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan						x	
		Meningkatnya mutu pendidikan							
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga daerah							
	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan	Meningkatnya akses kesehatan							
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat							
Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata	Meningkatnya daya saing Wisata							
		Meningkatnya kualitas destinasi Wisata							
	Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi							
		Meningkatnya kualitas infrastuktur pengairan							
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman							
	Terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup							

		Meningkatnya Kualitas pengawasan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, dan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang							
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan tata ruang							
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, dan transportasi	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan, perindustrian dan transportasi terhadap PDRB							
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi							
		Meningkatnya jumlah investor							
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya jumlah penduduk miskin							
		Menurunnya tingkat pengangguran							
		Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan cakupan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
		Meningkatnya tingkat pendapatan							

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel							
	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif							
Mewujudkan ketahanan bencana	Mewujudkan ketahanan bencana	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana							
		Meningkatnya sarana prasarana ramah bencana							

Tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dituangkan dalam RPJMD memiliki kesesuaian dengan dimensi-dimensi Smart City. Hal ini tentu akan memudahkan implementasi rencana aksi Smart City di Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini adalah daftar Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang disinkronisasikan dengan dimensi Smart City:

Tabel 5.4 Sinkronisasi Indikator Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016- 2021 dengan dimensi Smart City

No	Indikator Kinerja Utama	Dimensi Smart City					
		Smart Governance	Smart Branding	Smart Ekonomy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	Misi I Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah						
1	Peringkat MTQ Tingkat Propinsi					x	
	Misi 2 Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa						
2	Nilai PDRB sektor Pertanian			x			
3	Nilai tukar petani			x	x		
	Misi 3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik						
4	Angka harapan lama sekolah					x	
5	Persentase pendidikan dasar minimal Terakreditasi B					x	
6	Angka usia harapan hidup				x	x	
	Misi 4 Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan						
7	Jumlah kunjungan Wisata		x				
8	Persentase Jalan mantap			x	x	x	
9	Ratio jaringan irigasi			x	x	x	
10	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak				x	x	x

11	Jumlah Kawasan Strategis yang Cepat Tumbuh							x
12	Jumlah investor				x			
Misi 5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan								
13	Angka kemiskinan				x	x		
14	Angka pengangguran terbuka				x	x		
15	Pendapatan perkapita			x	x	x		
Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik								
16	Opini laporan keuangan	x						
17	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	x						
18	Nilai LPPD	x						
19	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	x						
Misi 7 Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana								
20	Nagari Tangguh Bencana				x	x	x	

Sasaran Padang Pariaman Smart City

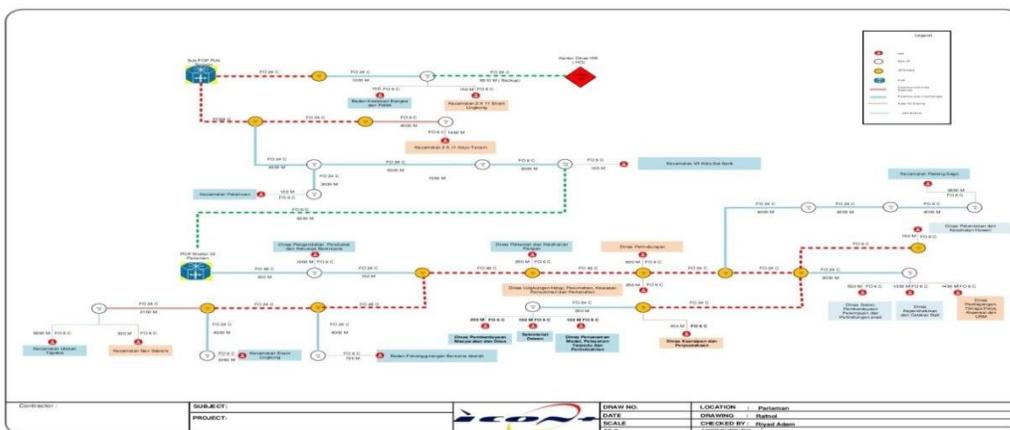
Perumusan sasaran Padang Pariaman Smart City dijabarkan berdasarkan pilar dan sub pilar yang terdiri dari 6 (enam) dimensi yang meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment). Perumusan sasaran Padang Pariaman Smart City dijabarkan sebagaimana berikut:

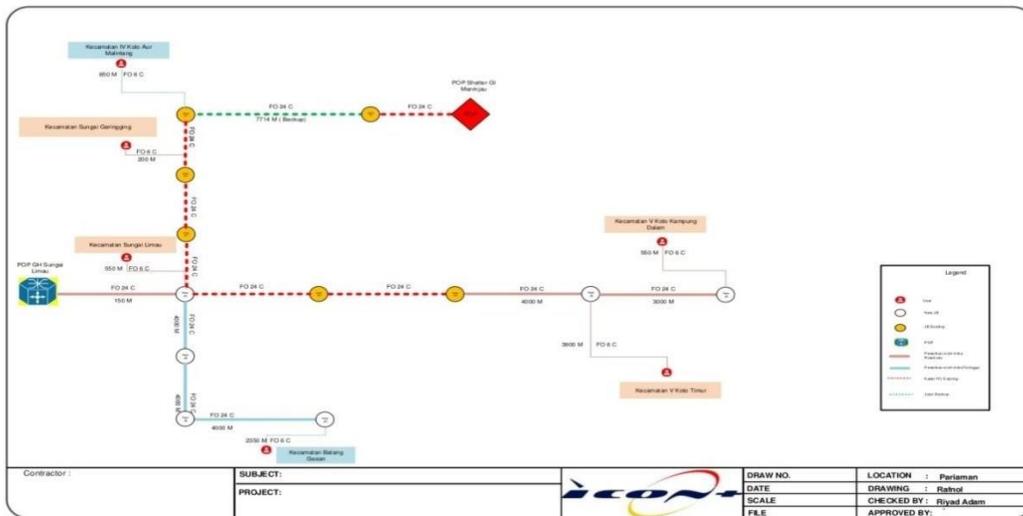
Dimensi	Sub Pilar Dimensi	Sasaran
Smart Governance	Pelayanan Publik (Publik Service)	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima, Aspiratif Dan Partisipatif
	Manajemen Birokrasi yang Efisiensi (Bureaucracy)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel
Smart Branding	Tourism branding	Meningkatkan Daya Destinasi Wisata Dan Meningkatkan Daya Saing Wisata

	Bussines Branding	Meningkatnya Daya Saing Wisata
Smart Economy	Industri Berdaya Saing	Meningkatnya Kesejahteraan Petani
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Tingkat Pendapatan
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi
	Prasarana Kesehatan	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Ketersediaan Sarana Transportasi	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi
Smart Society	Ekosistem Belajar Yang Efisien	Meningkatnya Akses Pendidikan Dan Meningkatkan Mutu Pendidikan
	Sistem Keamanan Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana
Smart Environment	Program Proteksi Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Daftar Lampiran
Lampiran I

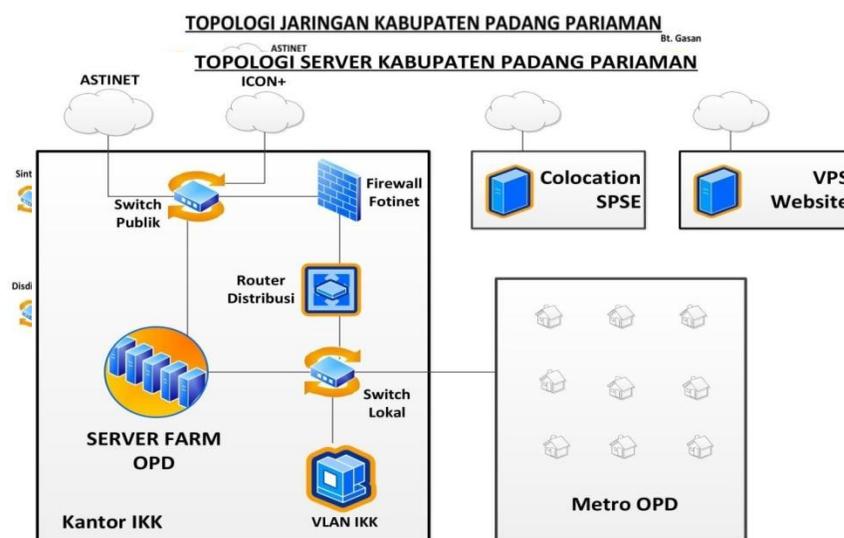
Gambar jaringan antar SKPD (Instansi pemerintah) Kabupaten Padang Pariaman





Lampiran II

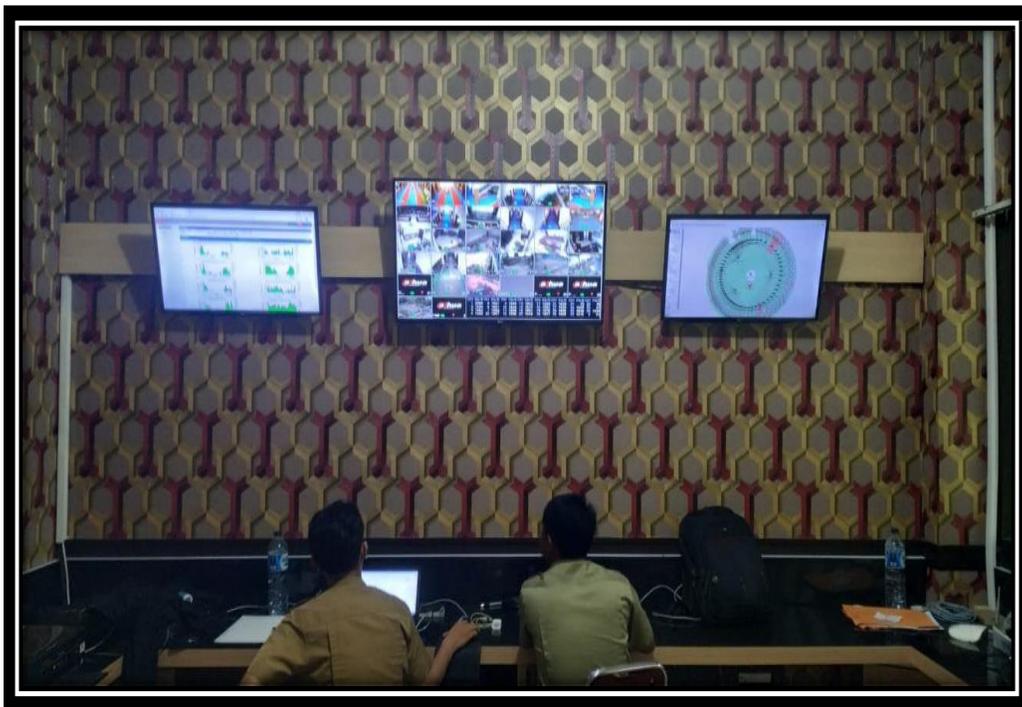
Gambar topologi Jaringan dan SERVER kabupaten Padang Pariaman



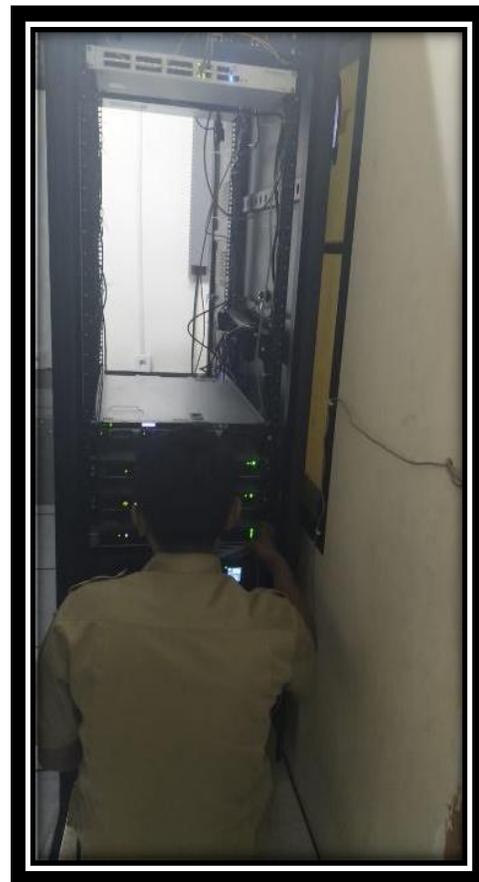
Lampiran III



Gambar peralatan TIK dan ruangan NOC RUANGAN NOC



SERVER DISKOMINFO PADANG PARIAMAN



SERVER collocation DISKOMINFO PADANG PARIAMAN di Jakarta



RUANG Command Center Mini di Ruang Bupati



Lampiran IV

Ketersediaan Aplikasi di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019

No	Aplikasi Yang Mempunyai Fungsi	Daftar Aplikasi	(aktif /pasif)	Open Source/ tidak
A	Pelayanan Publik			
1	Sektor Pendidikan			
	Dapodik	dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/	Aktif	PUSAT
2	Sektor Kesehatan			
a	E-Puskesmas	/aplikasi-puskesmas.com/padangpariaman		CLOUD
b	Sistem Informasi Rekam Medik Dan Pelayanan Kesehatan Puskesmas	siak.padangpariamankab.go.id:81/saya_sehat/	Aktif	Oss
c	Esurenggarkes	esurenggarkes.dinkes.padangpariamankab.go.id	Aktif	Oss
d	Papa Tangkas Gada 119	PSC 119	Aktif	lokal
e	Padang Pariaman Sehat Online	papasehat.padangpariamankab.go.id	Aktif	Oss
f	BPJS Online	pcare.bpjskesehatan.go.id	Aktif	Pusat
g	Aplikasi Rencana Kebutuhan Sdm Kesehatan	renbut.kemkes.go.id/abk/index.php/config/login	Aktif	Pusat
h	Sistim Informasi Gizi Terpadu	sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id	Aktif	Pusat
3	Sektor Sosial			
a	PKH	pkh.kemsos.go.id		Pusat
b	SIKS (Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial)	siks.kemsos.go.id		Pusat
4	Sektor Ketenagakerjaan			
	Informasi Pasar Kerja	ayokitakerja.kemenaker.go.id	Aktif	Pusat
5	Sektor Pertanian			
	E-Proposal Kementerian Pertanian RI	eproposal.pertanian.go.id	aktif	Pusat
	Monev DAK Pertanian	app2.pertanian.go.id/emonevdakk	aktif	Pusat
	E-Rencana Defenitik Kebutuhan Kelompok	erdkk.go.id	aktif	Pusat
	Serah Alat Mesin Mesin Pertanian	bastonline.go.id	aktif	Pusat
6	Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Sistim Aplikasi Siak	siak.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Anjungan Data Informasi Kependudukan	siak.padangpariamankab.go.id:81/dukcapil/	Aktif	OSS
	Media Informasi Kependudukan	siak.padangpariamankab.go.id:8080/media/	Aktif	OSS
	Cek KTP	siak.padangpariamankab.go.id:81/cek_ktp	Aktif	OSS

	Tempat Mengadu Masyarakat [Tamasya]	siak.padangpariamankab.go.id:81/tamasya	Aktif	OSS
	Aplikasi Faktur	siak.padangpariamankab.go.id:81/faktur/login.php	Aktif	OSS
	Pesan Antrian	siak.padangpariamankab.go.id:81/s	Aktif	OSS

No	Aplikasi Yang Mempunyai Fungsi	Daftar Aplikasi	(aktif/pasif)	Open Source/tidak
		ms_satria/		
	Aplikasi Pencocokan Data	siak.padangpariamankab.go.id:81/coklit/	Aktif	OSS
7	Sektor Komunikasi Dan Informatika			
	Website Padang Pariaman	padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website DPRD Padang Pariaman	dprd.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Kesehatan	dinkes.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Pemuda Dan Olahraga	disparpora.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil	dukcapil.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website DPMPTP	perizinan.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Badan Penanggulangan Bencana	bpbd.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Pendidikan	disdikbud.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Perikanan Dan Kelautan	dkp.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	RSUD Padang Pariaman	rsud.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Lingkungan Hidup Dan Perumahan	dlh.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Pengendalian Dan Keluarga Berencana	dpkb.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Kearsipan Dan Pustaka	arsippustaka.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM	dagnakerkop.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Perhubungan	dishub.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Pertanian	dispertan.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS

	Dan Ketahanan Pangan			
	Website Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dpu.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Pemberdayaan Masyarakat Desa	dpmd.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Peternakan Dan Ketahan Hewan	peternakan.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	dinsospapa.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Badan Kepegawian Dan Pengembangan Sumberdyaa Manusia	bkpsdm.padangpariamankab.go.id	Aktif	Oss
	Website Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	dpkd.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	Website Dinas Pamong Praja Dan Pemadam kebakaran	polppdamkar.padangpariamankab.go.id	Aktif	Oss
	Website PPID	ppid.padangpariamankab.go.id	Aktif	Oss

No	Aplikasi Yang Mempunyai Fungsi	Daftar Aplikasi	(aktif/pasif)	Open Source/ tidak
8	Sektor Pemberdayaan Masyarakat Desa			
a	Aplikasi Sistim Tatakelola Keuangan Desa (Siskeudes)	siskeudes BPKP dekstop		Lokal
b	Sistim Informasi Posyandu	sistem informasi posyandu dekstop		Lokal
c	Sistim Informasi Desa Dan Kelurahan	sideka dekstop		Lokal
9	Sektor Perpustakaan Dan Kearsipan			
	E Pustaka	E-Pustaka desktop	Aktif	Lokal
	Inlislite Versi 3	Website Utama/ INLIS Lite deesktop	Aktif	Lokal
10	Sektor Penanaman Modal			
	Online Single Sub Misiion	oss.go.id	Aktif	
	Spipise	nsw.bkpm.go.id	Aktif	

	Sistem Informasi Perizinan Elektronik [Simpel Android]	simpel.padangpariamankab.go.id	Aktif	
11	Sektor Statistik Data			
	Data(Lambung Data)	data.padangpariamankab.go.id	Aktif	Oss
B	Administrasi Dan Manajemen Umum			
	Simaya	simaya.go.id	Aktif	Pusat
	E-Lapor	elapor.go.id	Aktif	Pusat
C	Administrasi Legislasi			
	Perpustakaan Regulasi/JDIH	jdih.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
D	Manajemen Pembangunan			
	LPSE		Aktif	Pusat
	SIRUP		Aktif	Pusat
	E-Monev		Aktif	Pusat
E	Manajemen Keuangan (Siklus Yang Dimulai Dari E-Planning, E-Budgeting, E-Procurement, E-Monitoring)			
	E-Planning	eplanning.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	E Musrenbang	musrenbang.padangpariamankab.go.id	Aktif	OSS
	E RKPD	rkpd.padangpariamankab.go.id	Aktif	Open Source
	Simda Keuangan	SIMDA KEUANGAN desktop	Aktif	Close
	Simda Bmd	SIMDA BMD desktop	Aktif	Close
	Simda Gaji	SIMDA GAJI desktop	Aktif	Close
	Simda Pendapatan	SIMDA PENDAPATAN desktop	Aktif	Close
	Simda Aset	SIMDA ASET desktop	Aktif	Close
	Sim Pbb	SIM PBB desktop	Aktif	Close
	Standar Satuan Harga	ssh.padangpariamankab.go.id	Aktif	Open Source
	Kinerja Pemerintah [SAKIP]	sakip.padangpariamankab.go.id	Aktif	Open Source
	Aplikasi Dak Bidang Kb	morena.bkkbn.go.id	Aktif	apk pusat
	Kolaborasi Perencanaan Dan Informasi Kinerja Anggaran DAK	padangpariamankab.krisna.systems/dak/2019/dak-home	Aktif	Apk pusat
F	Manajemen Kepegawaian			
	Simpeg	simpeg.padangpariamankab.go.id	Aktif	Open Source
	Sapk	sapk.bkn.go.id	Aktif	apk pusat
	Anjab	Anjab desktop	Aktif	Close

	Aplikasi Finger Print	Aplikasi Finger Print desktop	Aktif	Lokal
--	-----------------------	-------------------------------	-------	-------

Lampiran V

Regulasi Yang Mendukung Pengembangan Smart City

No	Nomor Referensi Kebijakan	Tentang/ Ruang Lingkup	Sudah/ Belum Diterapkan	Jenis Kebijakan
A	Peraturan daerah			
1	15 tahun 2010	Bangunan Gedung	Sudah	perda
2	5 tahun 2011	RPJP Kab Padang Pariaman 2005-2025	Sudah	perda
3	1 tahun 2014	Pengelolaan Zakat Di kabupaten Padang Pariaman	Sudah	perda
4	3 tahun 2014	Lembaga keuangan mikro Di kabupaten Padang Pariaman	Sudah	perda
5	1 tahun 2016	RPJMD kab Padang Pariaman 2016-2021	Sudah	perda
6	1 tahun 2017	Penyelenggaraan bantuan hukum	Sudah	perda
7	2 tahun 2017	Penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran	Sudah	perda
8	4 tahun 2017	Kawasan Tanpa Asap Rokok	Sudah	perda
9	5 tahun 2017	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman	Sudah	perda
10	6 tahun 2017	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Sudah	perda
11	tahun 2019	Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030	Dlmproses	Ranperda

No	Nomor Referensi Kebijakan	Tentang/ Ruang Lingkup	Sudah/ Belum Diterapkan	Jenis Kebijakan
1	33 tahun 2015	Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
2	12 tahun 2016	Mekanisme Koordinasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab. Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
3	22 tahun 2016	Penetapan Destinasi Perwisata Daerah kab. Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
4	59 tahun 2016	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	sudah	Peraturan Bupati
5	2 tahun 2017	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
6	4 tahun 2017	Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	sudah	Peraturan Bupati
7	6 tahun 2017	Perubahan Perbup no. 18 tahun 2014 tentang Standar Operasional PPID Pemkab. Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
8	10 tahun 2017	Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemkab. Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
9	20 Tahun 2017	Sistim dan prosedur pengelolaan satu data Kabupaten Padang Pariaman	Sudah	Peraturan Bupati

10	22 tahun 2017	Standar Kompetensi Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemkab. Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
11	24 tahun 2017	Roadmap Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab. Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
12	26 tahun 2017	Kode Etik dan Perilaku ASN di lingkungan Pemkab. Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
13	39 tahun 2017	Sistem Transaksi Non Tunaidalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman	sudah	Peraturan Bupati
14	40 tahun 2017	Pembentukan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	sudah	Peraturan Bupati
15	15 tahun 2018	Pedoman Penyampaian Pengaduan Oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau Pejabat Lain (Whistleblower System) Di LingkunganPemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Sudah	Peraturan Bupati
16	5 tahun 2018	Standar Biaya Umum Nagari	Sudah	Peraturan Bupati
17	20 tahun 2018	Penyelenggaraan dan pengembangan E-Govermen di lingkungan pemerintah kabupaten Padang Pariaman (dalam Pengembangan menjadi SPBE)	Sudah	Peraturan Bupati
18	21 tahun 2018	Pemanfaatan website di lingkungan pemerintah kabupaten Padang Pariaman	Sudah	Peraturan Bupati
19	28 tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame	Sudah	Peraturan Bupati
20	30 Tahun 2018	Kawasan Tertib Lalulintas	Sudah	Peraturan Bupati

21	Tahun 2019	Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi	Dlm proses	Ranperbub
----	------------	--------------------------------------	------------	-----------

No	Nomor Referensi Kebijakan	Tentang/ Ruang Lingkup	Sudah/ Belum Diterapkan	Jenis Kebijakan
1	No. 118/KEP/BPP/2017	Pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan Kab. Padang Pariaman	Sudah	Keputusan Bupati
2	No. 458/KEP/BPP/2017	Pembentukan Tim Penyusunan e-Planning Kab. Padang Pariaman	Sudah	Keputusan Bupati
3	No.374/KEP/BPP/2017	Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan, Petugas Adm Pengelola dan Pejabat Penghubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kab. Padang Pariaman Tahun 2017	Sudah	Keputusan Bupati
4	No 162/KEP/BPP/2018	Pembentukan TIM Penyusunan masterplan Smart City Kabupaten Padang Pariaman	Sudah	Keputusan Bupati
5	No 165/KEP/BPP/2018	Pembentukan Tim Evaluator Internal Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	Sudah	Keputusan Bupati
6	No 285/KEP/BPP/2018	Pembentukan Forum Data Dan Informasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	Sudah	Keputusan Bupati
7	No 361/KEP/BPP/2018	Pembentukan Tim Stering Comite Smart City Kabupaten Padang Pariaman	Sudah	Keputusan Bupati
8	No 317/KEP/BPP/2018	Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018	Sudah	Keputusan Bupati

9	No 20/KEP/BPP/2019	Penetapan Jabatan, Uraian Tugas Dan Honorarium Tenaga Ahli Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Sudah	Keputusan Bupati
10	316 /KEP/BPP/2019	Dewan Smart City Daerah	Sudah	Keputusan Bupati
11	317/KEP/BPP/2019	Tim Pelaksana Smart City Daerah	Sudah	Keputusan Bupati

Lampiran VI

Susunan Keanggotaan Dewan Smart City Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 316 /KEP/BPP/2019

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Padang Pariaman	Ketua Dewan
2	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua II
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	Sekretaris
5	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Sekretaris I
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Sekretaris II
7	Surfa Yondri ST. SST . M. Kom(Direktur Politeknik Negeri Padang)	Anggota Pakar Praktisi
8	Ir. H. Krismadinata, MT.Ph.D (Dosen Universitas Negeri Padang)	Anggota Pakar Praktisi
9	Dr. Yuhandri. M.Kom (Dosen Universitas Putra Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang)	Anggota Pakar Praktisi
10	Dr. Yuhefizar. M.Kom (Dosen Politeknik Negeri Padang)	Anggota Pakar Praktisi
11	Prof. Dr. Duski Samad (Dosen UIN Imam Bonjol Padang)	Anggota Pakar Praktisi
12	Prof. Dr. Elfiendri. SE.MA (Dosen fakultas Ekonomi UNAND Padang)	Anggota Pakar Praktisi
13	Dr. Asrinaldi. M.Si (Dosen Fakultas Fisipol UNAND Padang)	Anggota Pakar Praktisi
14	General Manager PT icon + Sumatera Barat	Anggota Pakar Praktisi
15	KEPALA cabang bank BNI lubuk alung	Anggota Pakar Praktisi
16	KEPALA cabang bank Nagari lubuk alung	Anggota Pakar Praktisi
17	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah

18	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
19	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
20	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
21	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
22	Kepala Dinas pendudukan dan catatan sipil Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
23	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
24	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
25	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
26	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
27	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
28	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
29	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
30	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
31	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
32	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
33	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
34	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
35	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
36	Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
37	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah

38	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
39	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
40	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
41	Kepala Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
42	Kepala Bagian PBJ Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
43	Kepala Bagian Organisasi dan RB Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
44	Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
45	Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
46	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
47	Kepala Bagian Pembangunan fisik dan prasarana Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
48	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
49	Kepala Bagian Pembangunan ekonomi Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah
50	Direktur RSUD Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Perangkat Daerah

Lampiran VII

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Smart City Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman nomor 317 /KEP/BPP/2019

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
2	Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua I
3	Sekretaris BPKD Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua II
4	Kepala Bidang Pelayanan E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman	Sekretaris
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Sekretaris I

TIM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SMART CITY		
6	Kepala Bidang TIK Dinas Kominfo Kab. Padang Pariaman	Koordinator
7	KasubagPerencanaan Dan Pelaporan Bapelitbangda	Sekretaris
8	Kepala Bidang Perencanaan DISDIKBUD	Anggota
9	KasubagPerencanaan Monitoring Dan EvaluasiPelaporan DPUPR	Anggota
10	KasubagPerencanaan Dan Program DinasLingkunganHidup PKPP	Anggota
11	KasubagPerencanan, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Anggota
12	KasubagPerencanan, Evaluasi Dan PelaporanDiskominfo	Anggota
13	Kasubag Program BPBD	Anggota
14	Kasubag Program Informasi Dan Humas Dinkes	Anggota
15	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan DPMD	Anggota
16	Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan DPPKB	Anggota
17	Kasi Tata Kelola Sdm Teknologi Informasi Dan Komunikasi Disdukcapil	Anggota
18	Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan Rsud	Anggota
19	Kasubag Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan BKPSDM	Anggota
21	Kasubag Perencanaan Perpustakaan dan Arsip	Anggota
22	Kasubag Program POL PP dan Damkar	Anggota
23	Kasubag Perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
24	Kasubag Perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi & UKM	Anggota
25	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan DPMPTP	Anggota
26	Kasubag perencanaan dan penganggaran bagian Keuangan SETDA Kab	Anggota
27	Kasubag Perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
28	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelapora Dinas Perikanan	Anggota
29	Kasubag Perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga	Anggota

30	Kasubag Perencanaan evaluasi dan pelaporan BPKD	Anggota
31	Kasi Pengolahan data Dinas KOMINFO	Anggota
32	Kasi Persandian Dinas Kominfo	Anggota
33	Kasi Pengembangan teknologi dan Informasi Diskominfo	Anggota
	TIM PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN SMART CITY	
34	Kepala bidang Statistik dan Persandian Diskominfo	Koordinator
35	Kasi Pengembangan aplikasi diskominfo	Sekretaris
36	Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo	Anggota
37	Kabid Fisik dan Prasarana Bapelitbangda	Anggota
38	Kasi tata kelola E government diskominfo	Anggota
39	Kasi pengembangan ekosistem E-government diskominfo	Anggota
40	Kasi Keamanan Informasi	Anggota
41	Kasi Pemeliharaan teknologi Informasi	Anggota
42	Rezky Mubarak.S.Kom (Diskominfo)	Anggota
43	Reszky Kristian.S.Kom (Diskominfo)	Anggota
44	Andhika Pratama.S.Kom (Diskominfo)	Anggota
45	Lidya Febrina Spt MP(Bapelitbangda)	Anggota
46	Ivo srimeidani ST (Bapelitbangda)	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG
PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
MASTERPLAN PENGEMBANGAN
SMART CITY KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2019-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Padang Pariaman, menurut narasi tambo Minangkabau merupakan salah satu daerah tujuan rantau penduduk Pagaruyung, Tanah Datar. Rantau Pariaman atau sering disingkat “Piaman” dibangun oleh perantau dari Batipuah, yang memiliki landasan kerajaan sejak tahun 1300. Nama Pariaman sendiri menurut Hamka dalam buku suryadi, 2004 berasal dari kata Bahasa Arab, “barri aman” yang berarti tanah daratan yang aman sentosa.

Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Pada tahun 1957, Provinsi ini terbagi menjadi Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Dengan luas lahan 1.328 km², Padang Pariaman merupakan kabupaten terkecil di Sumatera Barat. Padahal, dahulu kabupaten ini salah satu yang terluas, yang terkenal dengan sebutan Piaman Laweh (Pariaman Luas). Namun, wilayahnya mengecil setelah perluasan Kota Padang (tahun 1980), berpisahannya Kabupaten Kepulauan Mentawai (tahun 1999) dan Kota Pariaman (tahun 2002). Sejak 2008, Ibukota Padang Pariaman berpindah dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang. Berikut peta administratif Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki 17 kecamatan dan 103 nagari

Terletak di jantung Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman memiliki letak geografis yang strategis karena menjadi pintu gerbang jalur udara Sumatera Barat dan dilalui jalur jalan Trans Sumatera. Padang Pariaman juga berfungsi sebagai daerah penyangga Kota Padang. Ini terlihat dari beberapa proyek infrastruktur strategis, baik yang sudah dibuat atau masih dalam perencanaan, antara lain:

- Bandara Internasional Minangkabau (BIM), mulai operasi 22 juli 2005 dan tahun 2006 ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai tempat embarkasi dan debarkasi haji untuk wilayah provinsi Sumatra Barat
- Asrama Haji, diresmikan tahun 2015
- 5 Kota terpadu PASOPAPALA (Painan, Solok, Padang, Lubuk Alung, dan Pariaman), tercantum dalam Dokumen Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019
- Pintu gerbang Jalan Tol Sumatera Selatan-Riau, rencana operasi tahun 2023

- Kawasan Industri Padang Industrial Park seluas 84 ha di kasai kecamatan Padang Pariaman anai dan guguk kecamatan 2 x 11 kayu tanam
- Rencana Pembangunan Technopark seluas 2 hektar di lubuk alung

Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia serta dilalui banyak aliran sungai menjadikannya kawasan rawan bencana. Selama 20 tahun terakhir terjadi beberapa bencana alam cukup besar, diantaranya Gempa Sumatera Barat sebesar 7,6 SR pada tahun 2009 yang menewaskan 675 dan merusak 59.693 unit rumah, Menurut penelitian pakar LIPI pada Februari 2019, Padang Pariaman dan daerah Pantai Barat Sumatera lainnya masuk dalam jalur potensi gempa Mega Thrust 9 SR.

Memiliki daerah pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai yang cukup panjang membuat kabupaten ini memiliki beragam potensi industri, wisata, dan perdagangan berbasis komoditas pertanian dan perikanan. Wilayah sebelah timur yang bercorak perbukitan menghasilkan kakao dan sayuran serta pemandangan alam perbukitan yang menarik. Wilayah Barat yang berupa dataran rendah dan pantai sangat strategis untuk pengembangan sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya (air payau dan air tawar)

Padang Pariaman memiliki berbagai destinasi wisata yang cukup beragam dan menarik untuk wisatawan, dari destinasi wisata alam hingga budaya-religi. Wisata alam-petualangan ada di Lubuk Nyarai, keindahan pantai dan kuliner ikan bisa dinikmati di Pantai Tiram, serta keindahan pegunungan di Puncak Kiambang Sicincin. Sementara Komplek Makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, menjadi pusat ziarah umat Islam tidak hanya dari penjuru nusantara, namun juga dari negeri jiran khususnya penganut Tarekat Sattariyah. Puluhan ribu orang berziarah di setiap bulan Syafar untuk memperingati haul Syekh Burhanuddin.

Untuk mencapai kabupaten yang sejahtera dan nyaman bagi penduduknya, tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan pelayanan, tetapi juga harus memikirkan daya saing dengan daerah lain melalui kesiapan masyarakat dan pemerintah untuk menyikapi isu strategis dan penanganan permasalahan. Kabupaten Padang Pariaman sangat berpeluang untuk bisa bersaing dengan wilayah sekitar. Peluang ini harus segera di tanggap secara seirius mengingat kabupaten dan kota sekitar Kabupaten Padang Pariaman berlomba-lomba untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing utamanya pada sektor industri dan pariwisata.

Yang saat ini menjadi persoalan sekaligus peluang adalah adanya Revolusi Industri 4.0, ketika potensi infrastruktur telah siap akan tetapi apabila dari pemerintah dalam manajemen tidak mampu untuk melayani secara cepat akan menghambat proses pembangunan. Begitupula dengan masyarakatnya yang belum siap juga akan menjadi kendala. Apalagi Revolusi Industri 4.0 adalah fase nyaris kehidupan kita telah tersentuh layanan digital. Ada tiga faktor utama pendorong Revolusi Digital yaitu perkembangan ponsel cerdas sebagai alat utama akses internet. Faktor kedua adalah *Internet of Things* (IoT). Pada 2016, hampir 18 miliar piranti berbasis internet telah saling terkoneksi yang mengakibatkan terciptanya konsep-konsep inovatif seperti *Smart Meter* atau *Smart Homes*. Faktor ketiga adalah Big Data yang didukung oleh kemampuan komputer melakukan analisis yang kompleks (*advance analytics*). Dan jika pemerintah dan masyarakat belum siap untuk menerima Revolusi Industri 4.0 maka kemungkinan akan terjadi perlambatan dan juga ketertinggalan dengan wilayah lain bahkan tidak mampu bersaing secara global.

Tidak dapat dipungkiri teknologi saat ini bagi kaum milenial menjadi suatu kebutuhan, akan tetapi seringkali teknologi belum di manfaatkan secara maksimal yang salah satunya bukan teknologi bukan hanya untuk sekedar berbagi informasi tetapi teknologi dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah harus menjamin ekonomi digital mampu mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya dan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat dan perekonomian nasional. ekonomi digital bukan hanya harus memberikan faedah dari sisi penerimaan negara, tapi juga nilai tambah ekonomi lain yang bisa dinikmati secara optimal oleh masyarakat khususnya Padang Pariaman, seperti laba, upah, lapangan kerja, dan kesinambungan sektor-sektor bisnis di dalamnya, dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga usaha skala besar. Isu revolusi digital memang menjadi topik hangat yang berkembang saat ini akan tetapi mengingat dalam implementasi pengembangan wilayah juga harus di imbangi dengan pembangunan struktur sosial sebagai pelaku dan juga dari unsur lingkungan sebagai wadah interaksinya juga harus di atur supaya berkelanjutan.

Setiap wilayah memiliki aturan/pedoman yang di gunakan sebagai dasar pembangunan akan tetapi kerap dalam dokumen tersebut pembahasannya sangat kompleks seperti halnya dokumen RPJMD. Dimana semua wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Padang Pariaman menerapkan RPJMD sebagai panduan utama dalam pembanangunan. Semua anggaran pembangunan selama 5 tahun di tentukan berdasarkan RPJMD.

Yang menjadi persoalan bahwa di dalam RPJMD program yang tercantum banyak memuat program rutinitas. Namun hal yang paling penting di dalam RPJMD sudah memiliki visi dan arah kebijakan pemerintah selama masa jabatan. Sektor-sektor mana yang akan mendapatkan tekanan pembangunan dan juga kabupaten mau di kembangkan ke arah mana itu sudah di rumuskan di dalam RPJMD. Oleh karena itu dengan inisiatif dari pemerintah pusat mengadakan Gerakan 100 Smart City untuk menstimulan dan mempercepat pembangunan daerah yang sudah ada di RPJMD.

Smart City merupakan dokumen yang bersifat trobosan untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan dokumen RPJMD, Smart City menjadi salah satu bagian/turunan dari RPJMD. Smart City berfungsi untuk menilai sejauh mana RPJMD di katakan smart dimana Kabupaten Padang Pariaman menjadi wilayah yang liveable dan berdaya saing. Kabupaten Padang Pariaman terpilih sebagai salah satu kabupaten yang mendapatkan pendampingan penyusunan Smart City oleh Kementerian KOMINFO. Di dalam pendampingan ini di harapkan semua OPD sebagai tim pelaksana Smart City harus berkolaborasi untuk mewujudkan 6 smart yang telah di tentukan yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.

Di dalam dokumen yang akan di susun selama masa pendampingan ini diharapkan akan melahirkan program-program prioritas dari masing-masing dimensi Smart City yang bertujuan untuk mewujudkan Padang Pariaman nyaman untuk di tinggali dan berdaya saing dengan kabupaten kota lainnya. Diharapkan pula program prioritas tidak hanya sebagai program dari satu OPD saja, dikatakan sebagai program yang cerdas apabila setiap layanan yang akan bekerja adalah sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu untuk program prioritas akan sangat bermanfaat apabila program di buat klaster-klaster pelayanan dalam satu sistem sebagai bangunan Smart City. Hal ini di rasa akan sangat bermanfaat di samping mudah melayani akan sangat efektif dan efisien dalam hal menekan waktu dan biaya operasional pelayanan.

B. TUJUAN MASTERPLAN

Adapun tujuan penyusunan dokumen Smart City Kabupaten/ Kota, adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan integrasi, sinkronasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Smart City di tingkat pusat dan daerah;
2. Mempercepat dan memaksimalkan potensi daerah untuk mampu bersaing secara global.
3. Menciptakan aksi berupa program dan kegiatan yang dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di lingkup pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
4. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD dalam dokumen perencanaan Smart City daerah;
5. Mendorong proses pengembangan Smart City yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

C. SASARAN

Sasaran dari dokumen Smart City Kabupaten/ Kota, adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen Masterplan Smart City yang komprehensif dan aplikatif.
2. Tersusunnya dokumen Masterplan implementasi Smart City program jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun) Kabupaten Batang.
3. Terlaksananya program pembangunan Smart City daerah sesuai dengan masterplan yang telah disusun termasuk program Quick Win dalam 1 tahun kedepan
4. Membantu pemerintah daerah dalam tata pamong (governance) dan tata kelola (manajemen) pengembangan Smart City sehingga dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

D. Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Pada Penyusunan Smart City Kabupaten Padang Pariaman



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa penyusunan masterplan Smart City sudah sesuai dengan rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 dan RPJPD Padang Pariaman 2005-2025

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-Goverment
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M/KOMINFO/11/2007 tentang Pemduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2011 tentang RPJPD Kab Padang Pariaman 2005 - 2025
20. Peraturan Daerah nomor 01 tahun 2016 tentang RPJMD Kab Padang Pariaman 2016 - 2021

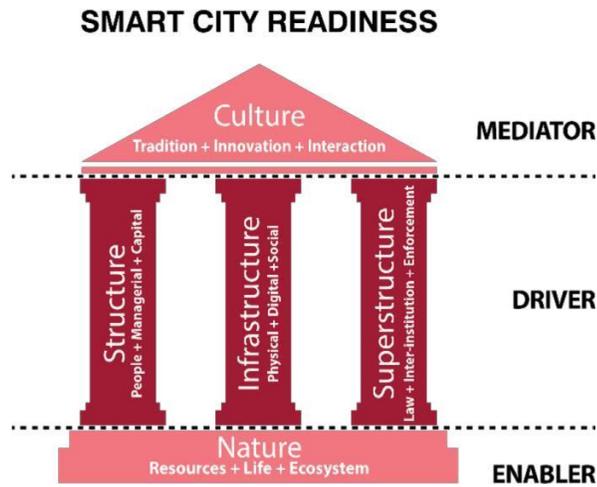
F. Kerangka Pikir Smart City

Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Istilah *smart* dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pandai; cakap”, “cerdik; banyak akal”, dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran” dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “*intelligent*”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Dalam membangun *Smart City*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

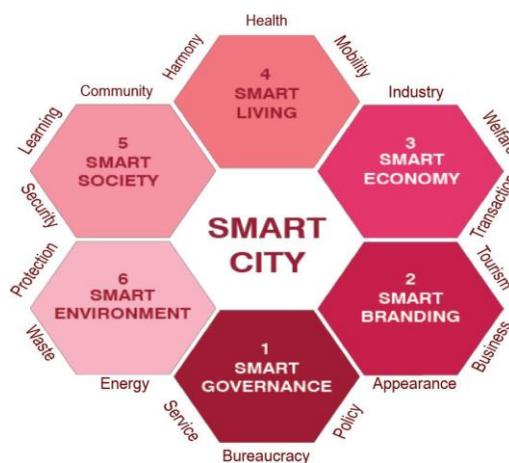
Gambar 1.2 Elemen smart Readiness



1. Struktur; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
2. Infrastruktur; pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
3. Suprastruktur; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

Amerika Serikat dan Eropa merupakan negara dan benua yang menjadi pelopor *Smart City* di dunia. IBM merupakan perusahaan yang mewadahi berdirinya *Smart City*, IBM membagi *Smart City* menjadi enam jenis. Keenam jenis pembagian *Smart City* adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *Smart City* itu sendiri.

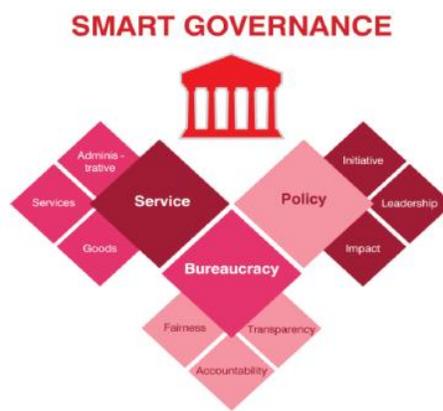
Gambar 1.3 Dimensi Smart City



1. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang

mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *businessprocess* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalumelakukan perbaikan.



Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

2. Smart Branding



Dimensi kedua dalam Smart City adalah Smart Branding, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam Smart City karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan brand value perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari Smart Branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

3. Smart Economy

Dimensi ketiga dalam Smart City adalah smart economy atau tata kelola



perekonomian yang pintar. Smart economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

Sasaran dari dimensi smart economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam smart economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

4. Smart Living



Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City. Sasaran dari Smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

5. Smart Society



Smart Society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari Smart Society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Sasaran dari Smart Society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam Smart Society, yaitu komunitas warga (community), ekosistem pembelajaran (learning), dan sistem keamanan (security).

6. Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah Smart City adalah pengelolaan lingkungan yang



pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari Smart Environment di dalam Smart City adalah untuk

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Sasaran dari Smart Environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

BAB II

VISI SMART CITY PADANG PARIAMAN

A. Visi Smart City Kabupaten Padang Pariaman

Analisis visi Smart City Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan meninjau keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang semestinya diacu, misalnya: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu melihat pula potensi dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Visi Padang Pariaman Smart City selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2028 yaitu:

“Terwujudnya Padang Pariaman baru, unggul, dan berkearifan lokal”

Visi di atas memiliki empat kata kunci penting yang pengertian sebagai berikut:

1. Baru diartikan sebagai suatu perubahan wajah, ruang, dan suasana Kabupaten Padang Pariaman. Baru juga berarti bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki destinasi baru untuk wisata dan investasi yang berkelanjutan, penataan kota yang nyaman dengan fasilitas-fasilitas ruang publik yang baru’
2. Unggul berarti cerdas, inovatif, dan berdaya saing. Unggul dalam hal pelayanan dan juga Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang unggul dimaknai sebagai birokrasi yang inovatif, serta warga yang pintar dan kreatif dengan tingkat literasi yang tinggi;
3. Berkearifan Lokal memiliki arti memegang nilai-nilai tradisi lokal, baik nilai religius maupun nilai adat dan tradisi minangkabau. Pembangunan destinasi, investasi, dan pelayanan akan memperhatikan nilai-nilai tersebut.

B. Tujuan dan Sasaran Smart City Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut (Permendagri No. 54 tahun 2010).

Adapun tujuan dan sasaran pada masing masing misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 diuraikan masing masing pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kab Padang Pariaman

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung	Meningkatkan perekonomian sektor	Meningkatnya Kontribusi Sektor Primer Thdp PDRB

Misi	Tujuan	Sasaran	
sektor primer dan jasa	primer dan jasa	Meningkatnya kesejahteraan petani	
		Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan	
		Meningkatnya mutu pendidikan	
	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga daerah	
		Meningkatnya akses kesehatan	
Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	
		Meningkatnya daya saing Wisata	
	Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	
	Terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya Kualitas pengawasan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup	
	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, dan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan tata ruang	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, dan transportasi	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan, perindustrian dan transportasi terhadap PDRB
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya jumlah investor
			Menurunnya jumlah penduduk miskin
Menurunnya tingkat pengangguran			
Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan cakupan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Meningkatnya tingkat pendapatan	
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	
Mewujudkan ketahanan bencana	Mewujudkan ketahanan bencana	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	
		Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	
		Meningkatnya sarana prasarana ramah bencana	

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ingin mewujudkan visi dan sasaran pembangunan Smart City melalui penetapan strategi pembangunan Smart City yang efektif. Penyusunan strategi pembangunan Smart City Kabupaten Padang Pariaman telah mempertimbangkan analisis masa depan, analisis kesiapan daerah, RPJMD, RPJMN, dan masukan berbagai pihak yang berkepentingan. Penyusunan strategi pembangunan Smart City dilakukan terhadap dimensi pembangunan Smart City.

dimensi Smart City meliputi smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment.

A. Smart Governance

Tujuan smart governance Kabupaten Padang Pariaman secara umum adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menciptakan efisiensi kebijakan publik. Tujuan dan sasaran tersebut diturunkan ke dalam beberapa strategi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mendorong ketercapaian tujuan dan sasaran smart governance adalah:

- Meningkatkan pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif;
- meningkatkan kualitas kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah.

B. Smart Branding

Sasaran smart branding Kabupaten Padang Pariaman adalah terwujudnya smart tourism branding dan smart business branding yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor pariwisata dan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman. Smart branding untuk pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman ditujukan untuk mendorong perwujudan salah satu tujuan kota di masa yang akan datang. Ada dua strategi yang digunakan dalam sasaran smart branding, yaitu:

- Mengembangkan Destinasi Wisata dan meningkatkan kompetensi peran pelaku wisata;
- Meningkatkan ekonomi kreatif yang sudah berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

C. Smart Economy

Strategi smart economy diperlukan untuk mewujudkan tujuan masa depan Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkannya sebagai pintu gerbang ekonomi Sumatera Barat. Tujuan tersebut diturunkan menjadi sasaran ke dalam sejumlah program yang di antaranya adalah peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif, Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan Tanaman Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan Peningkatan Kesejahteraan Petani. Berikut merupakan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran dari smart economy Kabupaten Padang Pariaman:

- Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan.

D. Smart Living

Dimensi smart living merupakan dimensi yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Dibutuhkan strategi untuk mencapai peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, dan untuk pananggulangan bencana yang cepat. Dua hal tersebut akan dicapai melalui strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
- Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat.

E. Smart Society

Aspek smart society menjadi aspek penting dalam pengembangan kota cerdas karena berkaitan dengan pengembangan kapasitas masyarakat selaku pengguna dari teknologi yang akan disediakan. Sasaran smart society Kabupaten Padang Pariamandiarahkan kepada mewujudkan pemerataan akses dan kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan. Adapun strategi yang akan digunakan untuk mencapainya adalah sebagai berikut:

- Menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman;
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarga sejahtera yang berwawasan kependudukan;
- Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

F. Smart Environment

Smart environment ada untuk mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan bersama teknologi sebagai pendorong dari pembangunan tersebut. Untuk mewujudkan smart environment, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki sasaran untuk meningkatkan tata kelola sampah dan limbah yang baik, mewujudkan tata kelola energi yang bertanggungjawab, dan terciptanya program proteksi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan strategi-strategi pembangunan Smart City di Kabupaten Padang Pariaman menurut elemen smart environment sebagai berikut:

- Meningkatkan prasarana dan sarana persampahan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah;
- Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati sebagai plasma nutfah dan kemerosotan ekosistem;
- Meningkatkan kebersihan dan penghijauan lingkungan;
- Meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

BAB IV

RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Rencana aksi Smart City adalah tindak lanjut dari program yang mendukung penerapan masterplan Smart City. Pelaksanaan rencana aksi bertujuan untuk merealisasikan visi dan strategi Smart City serta menjadi solusi atas problematika-problematika dengan jelas dan tepat sasaran. Rencana aksi Smart City terbagi menjadi 4 rencana, sebagai berikut:

1. Rencana pengembangan kebijakan dan kelembagaan Smart City;
2. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung Smart City;
3. Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung Smart City;
4. Rencana penguatan Sumber Daya Manusia melalui literasi Smart City.

1. Rencana Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City

Pengembangan kebijakan dan kelembagaan di Kabupaten Padang Pariaman melalui Smart City merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, inovatif, dan komunikatif. Oleh karena itu, kebutuhan teknologi dalam pengembangan kebijakan dan kelembagaan Smart City sangat diperlukan untuk mempermudah akses baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Berikut rencana-rencana yang

disusun untuk mendukung pengembangan kebijakan dan kelembagaan Smart City di Kabupaten Padang Pariaman:

- Penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Padang Pariaman;
- Penyusunan regulasi untuk mendukung implementasi masterplan Smart City baik berupa Peraturan Bupati maupun Surat keputusan Bupati;
- Membentuk tim kerja maupun tim teknis yang bertanggungjawab untuk memastikan implementasi rencana aksi masterplan Smart City Kabupaten Padang Pariaman;
- Menyusun *Standard Operating and Procedure* (SOP) terkait dengan implementasi seperti SOP tentang system tindak lanjut pemeriksaan, dan SOP tentang layanan konsultasi hukum;
- Menyusun MoU dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi Smart City Kabupaten Padang Pariaman, seperti dengan pihak penyedia jasa pembuatan aplikasi;
- Menyusun kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Smart City Kabupaten Padang Pariaman;
- Membuat aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung implementasi Smart City Kabupaten Padang Pariaman;
- Membentuk forum-forum atau komunitas di masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan, seperti membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Air Minum, dan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan.

2. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung Smart City

Rencana pembangunan infrastruktur pendukung Smart City merupakan rencana yang terdiri dari kebutuhan infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan program Smart City. Secara umum, infrastruktur yang dibutuhkan terdiri dari infrastruktur digital, infrastruktur fisik, dan infrastruktur sosial.

a. Infrastruktur Digital

Dalam pengembangan infrastruktur digital terdapat beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi diantaranya jaringan komputer, pusat data dan ketersediaan ruang kendali. Secara umum Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki jaringan internet yang telah menghubungkan seluruh OPD. Dalam hal ini, program yang masih dibutuhkan oleh Kabupaten Padang Pariaman diantaranya adalah:

- Pengembangan sarana prasarana pendukung server Kabupaten Padang Pariaman, seperti pengadaan komputer server, dan pembentukan server induk.
- Pengembangan konktivitas internet di unit-unit pendidikan
- Penambahan ruter dan peningkatan kuota crossing untukantisipasi jika terjadi kendala konktivitas;
- Menyediakan akses internet di kawasan taman.

b. Infrastruktur Fisik

Tidak hanya didukung dengan infrastruktur digital, untuk mewujudkan konsep Smart City juga diperlukan elemen fisik yang mendukung. Secara garis besar infrastruktur fisik yang diperlukan adalah kelancaran mobilisasi dari setiap wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Infrastruktur fisik yang perlu

dikembangkan dalam Smart City Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- Pengadaan sarana prasarana pendukung implementasi Smart City, seperti penyediaan komputer/ Laptop, dan alat komunikasi;
- Pengadaan alat transportasi untuk mendukung infrastruktur Smart City;
- Pembangunan gedung atau bangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- Pengembangan jaringan dan fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial yang perlu dikembangkan dalam Smart City Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- Pengembangan jalur transportasi baik yang menjadi jalan negara, provinsi, maupun kabupaten;
- Meningkatkan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas;
- Meningkatkan ketersediaan akses bagi pejalan kaki dengan menyediakan trotoar di bahu jalan;
- Membangun tracking area dan menyediakan sudut-sudut untuk selfie bagi masyarakat;
- Menyiapkan lahan untuk pembibitan tanaman bunga krisan dan tanaman bunga lokal.

3. Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung Smart City

Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung Smart City merupakan tindakan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan dan informasi bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki beberapa aplikasi, perlu dilakukan pengembangan dan penyesuaian dengan kondisi Kabupaten Padang Pariaman di masa depan. Berikut beberapa inisiasi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan aplikasi dan perangkat lunak pendukung Smart City:

- Pembuatan, pengadaan, dan pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung implementasi Smart City Kabupaten Padang Pariaman, seperti untuk pencatatan ibu hamil dan bayi yang baru lahir;
- Pembuatan dan pengembangan sistem database;
- Membangun website, dan sistem informasi untuk mendukung pemerintahan nagari, dan penyelenggaraan UKM;
- mengintegrasikan sistem informasi yang terkait dengan pelayanan publik di nagari;
- Pengembangan Aplikasi Lumbung Data menjadi Big Data yang terintegrasi (interopabilitas);
- Pembuatan Sistem Analisis Berita;
- Melakukan uji keamanan perangkat lunak yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengintegrasikan sistem e-lapor, call centre 112 dan COC
- Optimalisasi utilisasi Media Sosial untuk pengembangan ekonomi dan pemasaran produk-produk hasil pertanian dan peternakan masyarakat;

- Meningkatkan jaringan internet dan pengadaan sarana prasarana komunikasi berupa telepon;
- Menggunakan fasilitas *group Whatshaap* untuk pelaksanaan bank sampah.

4. Rencana penguatan Sumber Daya Manusia melalui literasi Smart City

Literasi digital adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam membuat, menemukan, dan mengomunikasikan konten digital secara masif, efisien, dan efektif. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam berliterasi digital sangat diperlukan agar program Smart City dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, untuk mewujudkan SDM yang berkapasitas tinggi perlu dilakukan inisiasi-inisiasi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), penguatan kapasitas dan skill kepada operator dan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan Nagari;
- Sosialisasi penggunaan aplikasi-aplikasi digital yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada masyarakat;
- Seri program literasi digital (dasar, menengah, advanced) kepada pelajar dan masyarakat;
- Pelatihan kepada UMKM
- Kordinasi dengan BPK dan BPKP untuk penguatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman;
- Memperbaharui database terkait dengan pusat-pusat wisata dan membuat kalender jadwal kegiatan pariwisata;
- Membuat media-media promosi dengan memasang stiker, menyebarkan pamflet, mengupload informasi di media sosial, serta memasang banner dan baliho di seluruh titik strategis di Kabupaten Padang Pariaman;

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Peta jalan pembangunan Smart City daerah merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan masterplan Smart City menjadi pelaksanaan pembangunan. Peta jalan pembangunan Smart City terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Peta Jalan Kesiapan Smart City: Peta jalan yang berisi timeline rencana aksi Smart City Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Peta Program dan Kegiatan Smart City : Peta yang berisi program dan kegiatan enam aspek Smart City.

Masing-masing peta jalan pembangunan Smart City akan disusun rentang waktunya menjadi empat (4) tahapan, yaitu:

- i. Permulaan/Inisiasi: Tahap awal pengembangan Smart City. Pengembangan ditujukan untuk mendorong kesiapan suatu kota dalam menerapkan Smart City.
- ii. Pengembangan: Tahap suatu kota telah memiliki kesiapan yang baik. Fokus utama dalam tahap ini adalah pengembangan sistem berbasis teknologi pada skala yang lebih luas.

- iii. Pendayagunaan: Tahap pengelolaan lebih lanjut dari pengembangan yang telah dilaksanakan pada tahap initial dan developing.
- iv. Penyempurnaan: Tahap penyempurnaan berbagai elemen, dimensi, dan aspek Smart City.

Gambar 5.1. Roadmap Pembangunan Smart City Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Citiasia Inc. dan Kemkominfo

Di samping peta jalan pembangunan, pada bagian ini juga disertai perincian rencana aksi dan program serta kegiatan Smart City yang dikelompokkan berdasarkan rentang waktu, yaitu:

1. Pembangunan jangka pendek, merupakan pembangunan Smart City dalam jangka waktu satu tahun ke depan (2019).
2. Pembangunan jangka menengah, merupakan pembangunan Smart City dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2020-2024).
3. Pembangunan jangka panjang, merupakan rencana pembangunan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan (2025-2028).

A. Kerangka Tahapan Pembangunan *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman

1. Kerangka Pembangunan Smart City Readiness Kabupaten Padang Pariaman

Dimensi Kesiapan <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
Suprastruktur		Membentuk tim kerja maupun tim teknis		
		Penyusunan regulasi untuk mendukung implementasi masterplan Smart City		
		Menyusun MoU dengan para pemangku kepentingan		
		Menyusun <i>Standard Operating and Procedure</i> (SOP) terkait dengan implementasi masterplan Smart City		
Infrastruktur	Pengembangan sarana prasarana pendukung server			
			Pengembangan konektivitas internet di unit-unit pendidikan	

Dimensi Kesiapan <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
		Menyediakan akses internet di kawasan taman		
			Membangun tracking area dan menyediakan sudut-sudut untuk selfie bagi masyarakat	
		Pengembangan jaringan dan fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
		Meningkatkan ketersediaan akses bagi pejalan kaki		
Aplikasi		Pembuatan, pengadaan, dan pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung implementasi Smart City	Pembuatan, pengadaan, dan pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung implementasi Smart City	
		pengembangan sistem database	pengembangan sistem database	
			Membangun website, dan sistem informasi untuk mendukung pemerintahan nagari, dan penyelenggaraan UKM;	

Dimensi Kesiapan <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
			mengintegrasikan sistem informasi yang terkait dengan pelayanan publik di nagari	
			integrasi sistem e-lapor, call centre 112 dan COC	
	Pengembangan aplikasi generik untuk mendukung proses manajemen internal dan layanan			
			Pembuatan Sistem Analisis Berita	
				Pengembangan Aplikasi Lumbung Data menjadi Big Data yang terintegrasi (interopobilitas);
Literasi	Pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), penguatan kapasitas dan skill kepada operator dan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan Nagari;	Pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), penguatan kapasitas dan skill kepada operator dan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan Nagari;		
		Sosialisasi penggunaan	Sosialisasi penggunaan	

Dimensi Kesiapan <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
		aplikasi-aplikasi digital yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada masyarakat;	aplikasi-aplikasi digital yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada masyarakat;	
		Menyelenggarakan event tahunan skala nasional dengan tema kelapa di lokasi kampung kelapa		
	Membuat media-media promosi dengan memasang stiker, menyebarkan pamflet, mengupload informasi di media sosial, serta memasang banner dan baliho di seluruh titik strategis	Membuat media-media promosi dengan memasang stiker, menyebarkan pamflet, mengupload informasi di media sosial, serta memasang banner dan baliho di seluruh titik strategis		
		Membuat spot ruang terbuka hijau tarok		
			Melakukan pelayanan kepegawaian melalui aplikasi simpeg	

Kerangka Pembangunan *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
<i>Smart Governance</i>	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
	Inisiasi pembentukan City Operation Centre (COC) Padang Pariaman	Pembangunan City Operation Centre (COC) Padang Pariaman Tahap I	Pembangunan City Operation Centre (COC) Padang Pariaman Tahap II	Pemantapan dan Pengembangan City Operation Centre (COC) Padang Pariaman
	Inisiasi Smart Nagari: Pembuatan portal dan system informasi desa (Nagari Digital) di 13 Nagari	Pengembangan Smart Nagari: Pembuatan portal dan system informasi desa, pariwisata nagari, pustaka nagari, taman digital, dan market place (Nagari Digital) di 50 Nagari,	Pengembangan Smart Nagari: Pembuatan portal dan system informasi desa, pariwisata nagari, pustaka nagari, taman digital, dan market place (Nagari Digital) di 50 Nagari,	Pemantapan dan pengembangan Smart Nagari: one village one product, industri rumah tangga berbasis nagari
	Pembuatan Sistem Pelaporan dan Pencatatat Kelahiran dan Kematian	Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pencatatat Kelahiran dan		

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
	(SiPakem)	Kematian (SiPakem)		
	Pembuatan Semen Padang PakYan (Sekali Menikah Dapat Segudang Paket Layanan)	Pengembangan Tahap I Semen Padang PakYan (Sekali Menikah Dapat Segudang Paket Layanan)	Pengembangan Tahap II Semen Padang PakYan (Sekali Menikah Dapat Segudang Paket Layanan)	
	Pembuatan SI-BIMO (Bisa Melayani On The Spot)	Pengembangan SI-BIMO (Bisa Melayani On The Spot)		
	Inisiasi pembuatan Si-Prei (Perekaman Data Sejak Dini)	Pengembangan Si-Prei (Perekaman Data Sejak Dini)		
		Pembangunan Pusat Informasi Investasi dan Perizinan Daerah (PURI INDAH)	Pengembangan Pusat Informasi Investasi dan Perizinan Daerah (PURI INDAH)	
		Pembangunan Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik	

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
		(SIMPEL) Terintegrasi dengan Kecamatan	(SIMPEL) Terintegrasi dengan Kecamatan	
		Pembangunan Portal rilis berita warta Padang Pariaman (Warta papa)		
	Pembangunan tahap I E-Planning terintegrasi	Pmbangunan tahap II E-Planning terintegrasi		
	Pembangunan Informasi E-Database	Pengembangan Informasi E- Database		
	Inisiasi pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Potensi Nagari Kabupaten Padang Pariaman (Simponi Papa)	Pengembangan Tahap I pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Potensi Nagari Kabupaten Padang	Pengembangan Tahap II pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Potensi Nagari Kabupaten Padang	

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
		Pariaman (Simponi Papa)	Pariaman (Simponi Papa)	
	Pengembangan Tahap I sistem administrasi perkantoran padang pariaman yang terintegrasi dengan e-agenda, e-metting room, e-SK layanan legal drafting. (SIAPKAN PAPA)	Pengembangan Tahap II sistem administrasi perkantoran padang pariaman yang terintegrasi dengan e-agenda, e-metting room, e-SK layanan legal drafting. (SIAPKAN PAPA)		
		Pengembangan tahap I TABOX PAKDE (Tapping Box terintegrasi dengan Sistem Pajak Daerah)	Pengembangan tahap II TABOX PAKDE (Tapping Box terintegrasi dengan Sistem Pajak Daerah)	
		Pembangunan SIPATU (Sistem Perbendaharaan		

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
		Terpadu)		
	Pembangunan sistem informasi kepegawaian daerah terintegrasi SIMPEG Terintegrasi dengan e-profil, e-Tpp (e-presensi, e-kinerja pegawai)	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah terintegrasi SIMPEG Terintegrasi dengan e-profil, e-Tpp (e-presensi, e-kinerja pegawai)		
	Pembangunan Aplikasi Audit, Evaluasi dan Reviu Kinerja Instansi Pemerintah (Kasir Jaim)	Pengembangan Aplikasi Audit, Evaluasi dan Reviu Kinerja Instansi Pemerintah (Kasir Jaim)		
		Pembangunan Sistem Pemantuan Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Temuan Kerugian Negara/	Pengembangan Sistem Pemantuan Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Temuan Kerugian Negara/	

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
		(Simantap Tilep)	(Simantap Tilep)	
		Mengatasi Masalah Kinerja Instansi Pemerintah/(Mama Kiper)	Mengatasi Masalah Kinerja Instansi Pemerintah/(Mama Kiper)	
	Layanan konsultasi hukum padang pariaman online (LAKONKU PAPA)	Layanan konsultasi hukum padang pariaman online (LAKONKU PAPA)		
	Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah			
			Integrasi e-lapor SPAN dengan Layanan 112 dan COC	
	Penataan Administrasi kependudukan			
		Portal rilis berita warta padang		

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
		pariaman Warta papa		
		Program Penataan Peraturan perundang- Undangan		
<i>Smart Branding</i>	Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		KLINIK LKPM (Konsultasi Layanan Investasi Untuk Kemudahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal		
	Perencanaan Revitalisasi tempat wisata ziarah Syekh Burhanuddin (masterplan)	Revitalisasi tempat wisata ziarah Syekh Burhanudin	Revitalisasi tempat wisata ziarah Syekh Burhanudin	
		Sentra Produksi, Destinasi, Industri Coklat Malibou	Sentra Produksi, Destinasi, Industri Coklat Malibou	Pemantapan Kampung Cokelat Malibou

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
<i>Smart Economy</i>	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif	penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif	penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif	
		Pengembangan Perbenihan		
		Peningkatan Kesejahteraan Petani		
			Peningkatan hasil produksi Peternakan	
			Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
			Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	
<i>Smart Living</i>		Ceria Taruih (Cegah Antrian dengan Antar Obat Sampai Rumah)		
		Bulat Sedap (Ibu Selamat Bayi Sehat Akta Didapat)		
		Taci Bahagia(Tampek Cuci Baju Pasien dan Keluarga)		
		Talago (Tampek Melayani Lansia manjadi Sehat dan Bahagia)		
	Pemberantasan penyakit menular			

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
				Pengembangan Tarok City sebagai pusat pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman
	Program upaya kesehatan masyarakat	Program upaya kesehatan masyarakat	Program upaya kesehatan masyarakat	
			TANGKAS AMAN. Mengkoordinasikan tentang kebencanaan sesuai SOP dan menindaklanjutinya ke Sekda/Bupati	
	Pengendalian dan pengaman LaluLintas.			
				PAPA SADAR BANA Call Center Kebencanaan 112
			SIMUNA (Sistem Informasi Penanggul	

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
			angan Bencana).	
			PATAKA membuat dan mengentrikan database kebencanaan yang lengkap dan komprehensif	
		Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelaksanaan Uji KIR Layanan Sistim Informasi Pakai Kartu (LASIP CARD)		
	Peningkatan Pelayanan Angkutan			
		Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari SPAM Jaringan Perpipaan	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari SPAM Jaringan Perpipaan	

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
		Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	
		Pemenuhan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Pemenuhan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	
	Pembangunan dan rehabilitas Jalan dan Jembatan	Pembangunan dan rehabilitas Jalan dan Jembatan		
<i>Smart Society</i>	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
				Please Care PAPA

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
		Lapau Emak (layanan Pengaduan Perempuan dan Anak)		
	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin melalui CAKAU (Cari Akseptor KB)			
	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB	
			Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Kopi darat	
			Pemanfaatan aplikasi DAGUTEK (Data Guru dan Tenaga	

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
			Kependidikan)	
				Penerapan Sistem PROTEKSI (Program Pengawasan Siswa Terpadu Berbasis Teknologi Informasi)
<i>Smart Environment</i>	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
	Sistem Manajemen Pelayanan Pengelolaan sampah dan Limbah B3 (SIMPELB3)			
	peningkatan pengendalian polusi Pengusjian emisi udara akibat aktifitas industri			
	Pelayanan			

Dimensi <i>Smart City</i>	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2019	2020-2021	2022-2024	2025-2028
	pencemaran dan kerusakan lingkungan (lamaran keling)			
	Pengelolaan dan pemeliharaan RTH	Pengelolaan dan pemeliharaan RTH	Pengelolaan dan pemeliharaan RTH	
				Kampung iklim dan kalpataru secara online
				Taman Ke hati Parit Malintang (TAMAN KAHATI PARINTANG)

Kertas Kerja Prioritas Utama Pembangunan Smart City

Prioritas Utama *Smart Governance* (Tata Kelola Birokrasi Pintar)

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
1.	Pembentukan	<i>Program</i> :	Terbangunannya	1.6 M	APBD	Dinas Kominfo	Penyatuan	Dinkes,	2019-

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	City Operation Centre (COC) Padang Pariaman	<i>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</i>	sebuah Comand Centre yang berfungsi sebagai Central Operation City pelayanan masyarakat terkait dengan Kesehatan, Bencana, Kebakaran, Lalu Lintas dan Kriminalitas				beberapa Call Centre pada satu nomor dan dengan sistem, proses tindak lanjut dari laporan dapat ditracking dan dimonitor perkembangan nya pada sebuah Flatform	RSUD, Puskesmas, BPBD, DPUPR, Dinsos PPA, Damkar, Dishub, Kepolisian dan	2024
2.	Smart Nagari - SID/Nagari - Free Wifi Area - Go Digital - Palanta Digital - PKBM - Pariwisata Nagari - Pustaka Nagari - Laskar Gizi - Marketpleace - IRT - One Vilage one product - Kampung KB - Nagari Sadar Hukum		Jumlah nagari yang telah menggunakan sistem informasi dan memiliki taman digital	206.000.000	APBD dan CSR	Dinas Kominfo	Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Nagari, Market Pleace dan Akses Free Wifi pada Taman Digital	Pemerintahan Nagari, DPMD, Swasta, Dinas Arpus, dan DLHKPP	2019-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
3.	Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian (SiPakem)	Program Penataan Administrasi kependudukan	Jumlah dan kecepatan layanan dokumen kependudukan dan capil Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Persentase data kematian dengan penyebab kematian	125.000.000	APBD/DAK	DINKES/DISDUKCAPIL	Inovasi ini adalah kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kesehatan yang melibatkan masyarakat, Wali Nagari, Bidan Desa, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Sawasta (Fasilitas Kesehatan), yang mencatatat kejadian mulai dari kehamilan sampai melahirkan dan kejadian kematian yang terjadi baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah	dinkes/disdukcapil/diskominfo	2019-2020
4.	Semen Padang PakYan (Sekali Menikah Dapat Segudang Paket)	Program Penataan Administrasi kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diberikan kepada pasangan yang baru	13.000.000	ABPD, DAK	Disdukcapil, KUA	Pelayanan yang diberikan bagi pasangan yang baru menikah, dimana bagi	Disdukcapil, KUA, Kominfo, camat, nagari	2019-2020

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Layanan)		menikah (berubah status)				masyarakat baru menikah akan menyebabkan perubahan status yang akan mendapatkan langsung KK baru, KK orang tua dan mertua serta KTP suami istri		
5.	SI-BIMO (Bisa Melayani On The Spot)	Program Penataan Administrasi kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diberikan kepada masyarakat di nagari	51.000.000	APBD	Disdukcapil	Kendaraan dinas yang dilengkapi dengan peralatan dan petugas pelayanan untuk memberikan pelayanan di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman langsung selesai di tempat untuk semua layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Disdukcapil, Kominfo	2019-2020
6.	Si-Prei (Perekaman	Program Penataan	Jumlah Perekaman dan	44.000.000	APBD	Disdukcapil	Pelayanan yang diberikan untuk	Disdukcapil, Disdik (SMA,	2019-2020

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Data Sejak Dini)	Administrasi kependudukan	Jumlah KTP yang diterbitkan bagi Wajib KTP Pemula, Jumlah Perekaman dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)				melakukan perekaman sejak dini dengan mempergunakan kendaraan dinas yang dilengkapi dengan alat perekaman, jaringan serta petugas pelayanan	SMP, SD), Diskominfo, DinsosP3A	
7.	Pusat Informasi Investasi dan Perizinan Daerah (PURI INDAH)		Terdata dan terintegrasi seluruh informasi terkait investasi dan perizinan daerah	150.000.000	APBD	DPMPTP	Melahirkan Sistem informasi yang berbentuk dashbord jadi seluruh informasi terkait investasi dan perizinan termasuk data mengenai perindustrian bisa didapat dan diakses secara langsung oleh yang membutuhkan	DISKOMINFO	2020-2024
8.	Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SIMPEL) Terintegrasi dengan		terintegrasinya sistem pelayanan (SIMPEL)ke seluruh kecamatan yang ada di kabupaten padang pariaman	100.000.000	APBD	DPMPTP	setiap perizinan yang merupakan kewenangan Kabupaten dan Maupun kewenangan kecamatan dapat	DISKOMINFO , KECAMATAN , PATEN KECAMATAN	2020-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Kecamatan						diintegrasikan dengan pelayanan PATEN di Kecamatan		
9.	Portal rilis berita warta Padang Pariaman (Warta papa)		Jumlah media massa yang mengakses portal Warta Papa	50.000.000	APBD	Bagian Humas	Untuk mempercepat dan memaksimalkan penyebaran informasi dg media kerjasama disediakan portal yang berisikan rilis berita, foto dan video yang dapat diambil oleh media tersebut.	Diskominfo	2020
10.	E-Planning terintegrasi	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aplikasi perencanaan yang terintegrasi (e-planning, e-budgeting, e-SPJ e-procurement, e-monev, e-SAKIP, e-Audit)	200.000.000	apbd	bapelitbangda	aplikasi Integrasi kinerja daerah mulai dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (eplanning, ebudgeting, eSPJ eprocurement, emonev, eSAKIP, eAudit)	diskominfo, setda bag organisasi, bag PUM, INSPEKTORAT	2019-2024
11.	Informasi E-	Program Pengembangan	Tersedianya Database	100.000.000	APBD	bapelitbangda	E-Database merupakan	KOMINFO	2019-2020

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Database/Lumbung Data	Data	Pembangunan Daerah secara elektronik.				aplikasi yang berisikan data pembangunan daerah yang bias diakses secara online oleh masyarakat.		
12.	Pengembangan Sistem Informasi Potensi Nagari Kabupaten Padang Pariaman (Simponi Papa)		SIMPONI PAPA(Sistim Informasi Potensi Nagari Padang Pariaman)	150.000.000	apbd	bapelitbangda	Data dan potensi nagari dapat dilihat dalam bentuk peta sehingga memudahkan pihak lain untuk melakukan perencanaan pembangunan pada nagari tersebut.	Dsikominfo/DPMD	2019-2024
13.	Pengembangan sistem administrasi perkantoran padang pariaman yang terintegrasi dengan e-agenda, e-metting room, e-SK layanan legal drafting.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang sudah menerapkan persuratan, agenda dan ruang rapat elektronik	154.000.000	ABPD dan CSR	SETDA BAG ORGANISASI	Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran pemerintahan kab padang pariaman yang terintegrasi	kominfo	2019-2021

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	(SIAPKAN PAPA)								
14.	TABOX PAKDE (Tapping Box terintegrasi dengan Sistem Pajak Daerah)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pemungutan Pajak melalui Tapping Box.	250.000.000.-	APBD DAN CSR	DPPKA	Selama ini pendataan potensi pemungutan pajak dilakukan secara manual. Agar lebih maksimal maka digunakan tapping box yg dapat merekam potensi pajak dan pemungutan secara realtime.	Dinas Koinfo, dan Bank Nagari	2020-2024
15.	SIPATU (Sistem Perbendaharaan Terpadu) Yang terintegrasi dg : - E-SPPD, Sistem Perencanaan Keuangan - Simda Gaji dan Aset.		Terpadunya Layanan Perbendaharaan yang terintegrasi (e-sppd, Simda Keuangan, Simda Gaji dan Simda Aset)	150.000.000.-	APBD	DPPKA	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah belum terintegrasi antara pembendaharaan dengan system lain spt Simda Aset, Simda Gaji dan e-Sppd sehingga penginputan spj, spm dan sp2d masih manual. Untuk itu perlu	Seluruh OPD dan Unit Kerja	2020-2021

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
							dilakukan integrasi antar system agar pelayanan pencairan keuangan lebih cepat dan data dapat tersimpan secara otomatis		
16.	Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah terintegrasi SIMPEG Terintegrasi dengan e-profil, e-Tpp (e-presensi,e-kinerja pegawai) ediklat, e-layanan pegawai (Cuti Tahunan, Karis, Karsu, Karpeg dll). Berbasis web dan android	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Presentase peningkatan layanan kepegawaian secara eletronik dan online.	200.000.000.-	APBD	BKPSDM	Pengembangan aplikasi Kepegawaian terintegrasi/SIMPEG meliputi: e-profil, Etp (e-presensi,ekinerja pegawai) ediklat, e-layanan (Cuti Tahunan, Karis, Karsu, Karpeg dll). Berbasis web dan android	INSPEKTORAT, KOMINFO, BPKD	2019-2021

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
17.	Pengembangan Aplikasi Audit, Evaluasi dan Reviu Kinerja Instansi Pemerintah (Kasir Jaim)	<i>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan /Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</i>	Terlaksananya layanan audit dan reviu kinerja secara online	150.000.000.-	APBD	Inspektorat	Pelaksanaan Audit SPJ dan Lakip yang selama ini dilakukan secara manual atau langsung, dengan pengembangan aplikasi e-audit maka layanan sudah dapat dilakukan secara online.	Seluruh OPD dan Unit Kerja	2021-2022
18.	Mengatasi Masalah Kinerja Instansi Pemerintah/ (Mama Kiper)	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian/ Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Peningkatan penanganan masalah kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah	75.000.000.-	APBD	Inspektorat	Kinerja ASN Padang Pariaman belum dapat dinilai secara elektronik sehingga banyak pelanggaran disiplin dan masalah-masalah yang terjadi. Untuk itu dibuatkan system yang dapat memonitor kinerja	Diskominfo, BKPSDM,BPK D dan Bagian Organisasi.	2019-2021

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
		KDH/Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan					ASN dan tempat konsultasi secara digital.		
19.	Layanan konsultasi hukum padang pariaman online (LAKONKU PAPA)	<i>Program Penataan Peraturan perundang-Undangan</i>	Tersedianya Aplikasi Layanan Konsultasi Hukum Secara Online di Website Pemda	80.000.000.-	APBD	SETDA Bag hukum	Aplikasi Layanan Konsultasi Hukum Secara Online di Website Pemda	Diskominfo	2019-2020

Prioritas Utama Smart Branding (Tata Kelola Pemasaran Daerah Pintar)

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
1.	Padang Pariaman Destination Tourism (PADATI)	<i>Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	Jumlah pengguna dan manfaat aplikasi berdampak terhadap masyarakat dengan adanya kemudahan akses wisata	100 Juta	APBD	DISPARPO RA	Aplikasi secara online untuk pemesanan sekaligus pembayaran paket destinasi, pemandu, atraksi budaya, kuliner dan informasi Pariwisata Padang Pariaman	Bumnag, Bank, CSR	2019-2024
2.	Pengembangan Paket Wisata Nagari	<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata</i>	Jumlah Kunjungan Wisatawan bertambah, Terbentuknya 7 Smart Nagari	1 Milyar	APBD/Dana Nagari	DISPARPO RA	Terintegrasi dan terjadwalnya, paket destinasi wisata dan event desa, sebagai program unggulan Pariwisata Padang Pariaman, dan bisa memesan lewat e-booking Traveloka	Pokdarwis, Nagari, Bumnag, Agent Travel, Perusahaan Swasta, Sanggar Seni dan Komunitas Budaya	2019-2024
3.	Pengembangan Calender of Event Pariwisata	<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata</i>	Jumlah Kegiatan Pariwisata yg dikembangkan menjadi sebuah even	2 m/tahun	APBN, APBD dan Sponsor	DISPARPO RA	Terjadwalnya even pariwisata yang sudah terjadwal secara kalender pariwisata	DPUPR, LH, Disdik	2020-2024
4.	Revitalisasi Makam Syech		Terbangunan dan tertatanya Sarana	22 Milyar	APBN dan APBD	Dinas PUPR	Peningkatan sarana dan	Dinas Pariwisata,	2019-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Burhanuddin		dan Prasarana Makam Syech Burhanuddin untuk kawasan wisata religious.				prasarana serta penataan kawasan agar lebih baik dan indah maka dilakukan revitalisasi dengan pembangunan sarana serta merelokasi bangunan yang tidak layak atau tidak tepat sesuai dengan masterplan.	Dinas Dagnakerkop dan UKM, Dinas Pendidikan, Pengelola Makam, Nagari.	
5.	Pembangunan Kawasan Agrowisata Kampung Kelapa		Terwujudnya Kawasan Kampung Kelapa di Padang Pariaman sebagai Destinasi Wisata.	2,5 Milyar	APBN dan APBD	Dinas Pertanian	Padang Pariaman sebagai daerah Penghasil Kelapa akan dibranding dengan membuat sebuah kawasan yang mengembangkan tanaman dan memproduksi berbagai jenis produk dari bahan baku kelapa.	DPMPTP, Disparpora, Disdagnakerkop UKM dan Bappelitbangda.	2021-2024

Prioritas Utama Smart Economy (Tata Kelola Ekonomi Daerah Pintar)

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
1.	PEDANG AKSI (Pencari Kerja datang AK.1 Siap)	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Bursa Kerja Online</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka menurun	20.000.000	APBD	Disdagnak erkop dan UKM	Untuk memudahkan pencari kerja mengetahui persyaratan pembuatan Kartu pencari kerja (AK.1) dan lowongan kerja dimana saja, di buatkan Aplikasinya dalam bentuk Aplikasi PEDATI AKSI	dis duk capil	2019-2021
2.	GERBANGKU (Gerakan Pengembangan UKM)	<i>Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif/ Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah</i>	Persentase usaha mikro yang berdaya saing	150.000.000	apbd/DAK	Disdagnak erkop dan UKM	Dengan telah dilakukannya pendataan bagi UKM dibantu dengan perizinan usaha, pemasaran dengan membuka galei, pengembangan centra-cera UKMpenjualan online, seperti	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	2020-2021

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
							pemanfaatna limbah kelapa sebagai souvenir dan cinderamata khas daerah padang pariaman, seperti mainan kunci rumah gadang dari batok kelapa, piring dari lidi, asbak rokok, tempat tisu, celengan, piala, lampu tidur, alas kaki dari sabut, dan lain-lain		
3.	Pelepasan Varietas Unggul Baru Kelapa dan Pinang Wangi yang merupakan komoditas asli Padang Pariaman	<i>Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan Tanaman/ Pertanian/ Perkebunan</i>	Terlepasnya Varietas Unggul Baru (VUB) Pinang Wangi dan Kelapa melalui Sidang Umum Kementerian Pertanian	200.000.000	APBD	Distan KP	Komoditas kelapa dan pinang wangi yang ada dipadang pariaman memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lain	BP2MB-PTP, Ditjen Bun dan balai penelitian perkebunan	2019-2022
4.	Pembangunan Kebun Induk Kelapa dan Penumbuhan	<i>Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan Tanaman</i>	Terbangunnya Kebun Induk dan Penangkar Bibit Kelapa	300.000.000	APBD	Distan KP	Untuk peremajaan kelapa dan memenuhi permintaan pasar	<i>Balai Benih dan Perguruan Tinggi</i>	2020-2022

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Penangkar Benih/Bibit Kelapa Sebagai Tindak Lanjut VUB	<i>Pertanian.</i>					terhadap bibit maka dibangun sebuah kebun induk sebagai tempat penelitian dan produksi bibit yang bersertifikat.		
5.	Pembangunan Kawasan Agrowisata “Kampung Kelapa”	<i>Peningkatan Kesejahteraan Petani</i>	Terbentuknya sebuah kawasan agrowisata kampung kelapa sebagai salah satu destinasi wisata.	1,5 M	DAK APBN	Distan KP	Kawasan Agrowisata yang menyediakan seluruh produk dari kelapa serta kehidupan masyarakat yang berseni dan berbudaya serba kelapa.	<i>Disparpora</i>	<i>2020-2024</i>
6.	Penumbuhan “Sustainable Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi”	<i>Peningkatan Kopetensi dan Kelembagaan Petani</i>	Jumlah kelompok-kelompok tani tangguh yang telah menggunakan teknologi tepat guna	150.000.000	DAKAPBN	Distan KP	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tani Modern yang memproduksi dan menguasai pemasaran melalui bekerjasama dengan distributor.	Disdagnakerkop dan UKM Kadin, Hippmi,	2021-2023
7.	Revitalisasi centra produksi	<i>Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran</i>	Terwujudnya Pusat Produksi Olahan Ikan	500.000.000.-	DAK APBN	DINAS PERIKANA	Makan dari bahan ikan perlu diolah dengan baik	Diaparpورا, Disdagnakerkop dan UKM	2019-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	perikanan modern sebagai amanetas pendukung wisata religi syeh burhanuddin	<i>Produk Perikanan</i>	Masyarakat yang tertata dan dikemas dengan baik sesuai dengan GMP dan SSOP				sehingga bias menjadi oleh-oleh dan makanan khas daerah yang digemari oleh Para Wisatawan khususnya di Kawasan Wisata Religius Makam Syech Burhanuddin		
8.	Pengembangan kawasan sentra perbenihan ikan gurami	<i>Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</i>	Jumlah Sentra Pembenihan Ikan Gurami yang dibangun.	750.000.000.-	DAK APBN	Dinas Perikanan	Sebagai penghasil ikan gurami terbesar di Provinsi Sumatera Barat maka untuk lebih meningkatkan hasil produksi benih maka dibangun sebuah kawasan khusus pembibitan benih ikan untuk mensuplai kebutuhan local dan Provinsi Sumatera Barat. Pemasaran Benih juga dilakukan secara online melalui aplikasi	Disdagnakerkop dan UKM	2019-2021

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
							smart fise.		
9.	Ekowisata dan Edukasi Green Talao Park	Ekowisata dan Edukasi Green Talao Park	Terbangunan kawasan wisata mangrove di Nagari Ulakan	1,35 Milyar	PIID (APBN)	TPK Nagari Ulakan	Hutan Mangrove di Nagari Ulakan yang luas dijadikan sebagai kawasan Eko Wisata dan Edukasi Green Talo Park. Dengan membangun tracking sepanjang 1,8 Km maka masyarakat dapat melihat hutan mangrove dari dekat yang dilengkapi dengan flora dan fauna.	DPMD, Disparpora, DLHKPP, DPUPR, Disdagnaker kop UKM dan Dinas Perikanan.	2019-2024

Prioritas Utama Smart Living (Tata Kelola Cara Hidup Pintar)

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
1.	Ceria Taruih (Cegah Antrian dengan Antar Obat Sampai Rumah)	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Ratio Antar Obat Pasien yang mendapatkan bantuan layanan Ceria Taruih	150.000.000	DAU	RSUD	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan inovasi cegah anytrian dengan antar obat sampai rumah	Wali nagari puskesmas	2019-2020
2.	Bulat Sedap (Ibu Selamat Bayi Sehat Akta Didapat)	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Ratio Pasien Yang Mendapatkan layanan Bulat Sedap (30) dalam 1 bulan	100.000.000	DAU	RSUD	Merupakan pelayanan kesehatan di kab padang pariaman khususnya membantu masy dalam membuat akta kelahiran bagi kel pasien di rawat inap perinatologi dan kebinanan	Dis Dukcapil	2019-2020
3.	Mensera (Menu Sarapan Sehat Berselera) untuk Penunggu	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Ratio Pasien yang mendapatkan layanan Mensera (30;300)	150.000.000	DAU	RSUD	Meningkatkan angka kunjungan rawat inap dan meningkatkan kualitas pelayanan	-	2019-2020

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Pasien								
4.	Taci Bahagia (Tampek Cuci Baju Pasien dan Keluarga)	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Ratio Pasien yang menggunakan jasa laundry wangi (30;300)	250.000.000	DAU	RSUD	Merupakan pelayanan kesehatan kpd masy	-	2019-2020
5.	SiPakem (Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan	Diketahui jumlah kelahiran, kematian dan penyebab kematian	350.000.000	APBD	dinas kesehatan	sipakem adalah pencacatan kelahiran dan kematian Pencatatan kelahiran aplikasinya menggunakan buku kohot ibu yang berfungsi untuk mengawal kelahiran sehat, sedangkan pencatatan kematian memakai Autopsi verbal	Dukcapil	2019-2024
6.	Gernis Papa (Gerakan Nikah Sehat Padang Pariaman)	Program pemberantasan penyakit menular	Menurunnyangka kejadian kasus HIV-AIDS	100.000.000	APBD	dinas kesehatan	Sebelum catin melakukan pemeriksaan HIV-AIDS di puskesmas, maka administrasi di	Diskominfo Kemenag Puskesmas KUA	2019-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
							KUA belum bisa dilanjutkan. Semua proses dilakukan secara manual, mulai dari pendaftaran sampai bukti telah melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan catin akan membawa bukti dari puskesmas ke KUA untuk dapat melanjutkan administrasi berikutnya dari KUA.		
7.	Laskar Nagari Peduli Pangan dan Gizi	Program upaya kesehatan masyarakat	Menurunkan angka stunting	250.000.000	APBD	dinas kesehatan	Pendampingan kader gizi kepada keluarga balita yang BGM, 2T, Gizi kurang dan Gizi Buruk. Data Balita diambil dari aplikasi E PPGM. Perkembangan balita akan di laporkan kader	PKK, BAZNAS, Camat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Nagari	2019-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
							ke TPG, TPG akan menindaklanjuti dan melaporkan ke Pengelola Gizi Dinkes. Pencatatan dan proses umpan balik dilakukan manual .		
8.	PAPA SADAR BANA Call Center Kebencanaan 112.. Menerima panggilan darurat bencana dari masyarakat di kab, Padang Pariaman secara cepat dan akurat sebagai dasar turun ke lapangan	PAPA SADAR BANA Call Center Kebencanaan 112.. Menerima panggilan darurat bencana dari masyarakat di kab, Padang Pariaman secara cepat dan akurat sebagai dasar turun ke lapangan	Mempermudahk n masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan bencana darurat dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait	300.000.0 00	DAU	BPBD	Masyarakat dapat menyampaikan langsung kejadian darurat atau bencana yang menimpa atau disekitarnya melalui panggilan telpon Call Center 112. Petugas Satgana akan merespon langsung panggilan tersebut menuju kelokasi kejadian.	DISKOMINFO DPUPR Dinsos Dinkes Kepolisian	2019- 2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
9.	PATAKA membuat dan mengentrikan database kebencanaan yang lengkap dan komprehensif	PATAKA membuat dan mengentrikan database kebencanaan yang lengkap dan komprehensif	Tersedianya Data Kebencanaan secara lengkap dan konfhensif.	150.000.000	APBD	BPBD	Data dan Informasi Kejadian Bencana sering lambat, simpang siur dan kurang update. Maka dengan Inovasi ini maka data dan informasi tersebut dapat dilihat perkembangannya secara realtime.	DISKOMINFO DPUPR Dinsos Dinkes Kepolisian	2019-2021
10.	TANGKAS AMAN. Mengkoordinasikan kebencanaan sesuai SOP dan menindaklanjuti serta melaporkan ke Sekda/Bupati	TANGKAS AMAN. Mengkoordinasikan kebencanaan sesuai SOP dan menindaklanjuti serta melaporkan ke Sekda/Bupati	Waktu Penanganan Bencana lebih cepat dan lebih terkoordinir.	300.000.000	APBD	BPBD	Tim Reaksi Cepat Tangkas Aman dapat mengkoordinasikan kejadian bencana dengan cepat melalui media teleconfren dan peralatan telekomunikasi lainnya.	DISKOMINFO DPUPR Dinsos Dinkes Kepolisian	2019-2024
11.	<i>(Smart PJU) dalam program Padang Pariman</i>	Program Pengendalian dan pengaman Lalin. dan	Persentase reaslisaasi smart pju dari Lampu Penerangan Jalan.	10.000.000.000	dau/dak	dishub	Pengelolaan Lampu Jalan yang lebih efektif dan efesien dg	PLN, DISKOMINFO	2019-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Bersinar Malam	<i>pembangunan lampu jalan</i>					menggunakan teknologi dan system informasi sehingga dpt memantau dan mengurangi beban pemda dlm pembayaran biaya lampu jalan.		
12.	Layanan Sistim Informasi Pakai Kartu (LASIP CARD)	<i>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelaksanan Uji KIR</i>	<i>Jumlah Layanan KIR mengunakan Kartu yang dilakukan</i>	<i>500.000.000</i>	<i>DAK</i>	<i>Dishub</i>	<i>Pelayanan KIR dapat memaki Kartu dengan menggunakan Sistem Informasi LASIP</i>	<i>Diskominfo Kepolisian</i>	<i>2020-2024</i>
13.	Pengadaan BUS Umum Pelayanan Angutan Umum Masal Rakyat. (PELAMAR)	<i>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.</i>	<i>Jumlah penumpang yang terlayani dengan Bus Massal</i>	<i>1,2 Milyar</i>	<i>DAK</i>	<i>Dishub</i>	<i>Melayani Tranportasi Masyarakat dengan biaya murah yang terintegrasi dari dan ke Ibukota Kabupaten.</i>	<i>Perum Damri</i>	<i>2020-2024</i>
14.	Pembuatan Perlintasan Sebidang Sistem	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah rambu-rambu pada perlintasan sebidang yang	1,5 Milyar	DAK	Dishub	Rambu-rambu perlintasan sebidang jalur KA dengan	Diskominfo PT.KA	2020-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Informasi Rambu-Rambu lalu lintas (SIRAMBU LALU)	Perhubungan	disediakan.				menggunakan plang otomatis memakai teknologi informasi dan tenaga surya dapat dilakukan secara otomatis.		
15.	SPAM Jaringan Perpipaan	<i>Program Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari</i>	<i>Jumlah sambungan rumah baru SPAM yang dibangun.</i>	<i>2,5 Milyar</i>	<i>DAK</i>	<i>PDAM</i>	<i>Penambahan jaringan pipa baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat diakomidir secara online oleh PDAM.</i>		

Prioritas Utama Smart Society (Tata Kelola Masyarakat Pintar)

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
1.	Penandaan Rumah Rakyat Miskin dengan sistem google map	<i>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan</i>	Terpantaunya alamat rumah rakyat miskin dan tersalurkannya bantuan dengan tepat	3 Milyar	APBN dan APBD	DINSOS P3A	dengan inovasi ini, bisa memberikan informasi lokasi - lokasi rumah rakyat miskin bagi csr - csr yang	CSR, Bapelitbangda, disdukcapil, BPKD, dinkes, dinas	2019-2020

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
		<i>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</i>					ingin membantu dan dapat mempresentasikan kepada perantau - perantau minang.	pendidikan, bpjs	
2.	Please Care Papa (Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang cepat akurat responsif dan efektif)		Terakomodirnya pengaduan dan layanan masalah masyarakat miskin dengan cepat	200.000.000	APBD	DINSOS P3A	inovasi ini, akan menampung pengaduan-pengaduan dan memberikan layanan terhadap masyarakat untuk di verifikasi ulang agar pendataan dan penyaluran bantuan pada KK miskin tepat sasaran	Bapelitbangda	2019-2024
3.	Lapau Emak (Layanan Pengaduan Perempuan dan Anak)		Jumlah layanan pengaduan Perempuan dan Anak yang ditindak lanjuti	150.000.000.	APBD	Dinsos P3A	Untuk memberikan layanan yang baik pada masyarakat khususnya pengaduan terhadap kekerasan perempuan dan anak maka disediakan ruangan yang representative,	Perguruan Tinggi, Kepolisian dan Kejaksaan.	2019-2020

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
							aman dan terjaga kerahasiannya serta pemberian pendampingan Psikolog		
4.	CAKAU (Cari Akseptor KB, Alakon tersedia dan terpenuhi, Kualitas Pelayanan ditingkatkan, Atasi komplikasi/drop out dan Unmetneed diturunkan)	<i>Keluarga Berencana/ Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin melalui</i>	Persentase Capaian Peserta KB Aktif	46.250,000	APBD	dppkbd	Sebuah Inovasi untuk aktif petugas mencari Akseptor KB, Alakon tersedia dan terpenuhi, Kualitas Pelayanan ditingkatkan, Atasi komplikasi/drop out dan Unmetneed diturunkan yang langsung kepada masyarakat.	Dinkes dan Puskesmas dan Bidan Desa	2019-2020
5.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR BERE-BERE (Bengkel GenRe Bereputasi)	<i>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</i>	Persentase Terbentuknya pusat pelayanan informasi dan Konseling KRR	44.750.000	apbd	dppkb	Bersama Dinas Pendidikan, Dinas Parawista, diberikan layanan konseling tentang Reproduksi dan KB kepada Siswa SMP, SMA dan Mahasiswa.	Dinkes, Disdikbud, Diparpora dan Duta Genre.	2019-2021

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
6.	SERGAB Kakap	Program : Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	220,000,000	apbd	dppkb	Inovasi serentak menggarab Kampung dengan melibatkan seluruh OPD, PPL KB, Kader KB Nagari untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam ber KB.	Seluruh OPD dan Petugas serta Kader KB Nagari.	2019-2020
7.	PROTEKSI (Program Pengawasan Siswa Terpadu Berbasis Teknologi Informasi)	Program : Penerapan Sistem PROTEKSI (Program Pengawasan Siswa Terpadu Berbasis Teknologi Informasi)	Persentase sekolah yang menerapkan system pemantauan aktifitas siswa disekolah dan pulang sekolah oleh orang tua.	250.000.000.-	DAK APBN	Disdikbud	Melalui inovasi ini, orang tua dapat memantau aktifitas anaknya mulai dari berangkat dari rumah-sekolah-pulang melalui aplikasi PROTEKSI. Sehingga dapat mengurangi tingkat kenakalan anak dan menghilangkan kekwatiran orang tua.	Diskominfo, Sekolah dan Aparat Keamanan.	2019-2020
8.	Pengembang		Tersedianya data	250.000.000	DAK APBN	Disdikbud	Untuk memantau	Diskominfo,	2019-2023

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	n Aplikasi DAGUTEK (Data Guru dan Tenaga Kependidikan)		guru d tenaga kependidikan dalam sebuah sistem	00			kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga pendidikan pada sebuah sekolah maka perlu ditangani dengan system yang terintegrasi.	Bapelitbangd a dan BKPSDM	
9.	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi E-Waspada	Program : Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi E-Waspada	Termonitornya aktifitas guru-guru dalam pelaksanaan tugas mengajar oleh Pengawas Sekolah.	75.000.000	APBD	Disdikbud	Aktifitas mengajar guru serta proses belajar dan mengajar disekolah dapat dipantau melalui aplikasi e-waspada, baik itu dari disiplin maupun aktifitas pengajaran yang dilakukan.	BKPSDM, Sekolah	2019-2020

Prioritas Utama Smart Environment (Tata Kelola Lingkungan Pintar)

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
1.	Bank sampah Padang Pariaman (Banksa PAPA)	<i>Prog Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>	Persentase Timbuan sampah yang dikelola	5.000.000.000	DAK	DLHPKPP	Pembuatan Bank Sampah, Pembuatan Pengelolaan Sampah, Percepatan Pembangunan TPA Regional	DPUPR, DINKES, Bapelitbangda	2020-2024
2.	Sistem Manajemen Pelayanan Pengelolaan sampah dan Limbah B3 (SIMPEL B3)		Jumlah sampah dan limbah B3 yang terlayani.	500.000.000	DAK	DLHKPP	Melalui Tim Terpadu dilakukan pengelolaan sampah dan limbah B3	DPUPR, Dinkes, Diskominfo	2020-2024
3.	Pelayanan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Lamaran Keling)	<i>Program peningkatan pengendalian polusi Pengujian emisi udara akibat aktifitas industri</i>	indek Kualitas Air	1.500.000.000	DAK	DLHPKPP	membuat pembagian wilayah pemeriksaan berdasarkan lokasi industri, sosialisasi tentang pencemaran mutu air, membuat kelompok masyarakat Peduli Sungai	Nagari, DPUPR, BWS, DPUPR	2020-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
4.	Pemeliharaan RTH Taman Ke hati Parit Malintang (TAMAN KAHATI PARINTANG)	<i>Program pengelolaan RTH Kegiatan</i>	<i>Tersedianya Fasilitas Umum di Taman dan Terpeliharanya dengan baik.</i>	450.000.000	APBD	DLHKPP	<i>Integrasi Taman Kantor Bupati dengan Kebun Binang, ,Jalan Tracking, Taman bunga, tempat selfi dan Taman Digital Free Wifi.</i>	<i>DPUPR Diskominfo Bagian Umum</i>	2019-2024
5.	Pembangunan Kawasan Terpadu Tarok	Pembangunan Kawasan Terpadu Tarok City	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City yang modern dan berwawasan lingkungan atau Green City.	12,5 Milyar	APBD	DPUPR	Pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City yang modern dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat.	DLHKPP Diskominfo	2019-2029

B. Kertas Kerja Prioritas Pendukung Pembangunan Smart City

Prioritas Pendukung Smart Governance (Tata Kelola Birokrasi Pintar)

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
1.	Pembangunan Sistem Informasi Telekomunikasi Intra Kantor (SiTIKA)		Terwujudnya layanan penghubung antar OPD dan Unit Kerja untuk VOICE, DATA, dan Video Confren	540.000.000	ABPD dan CSR	Dinas Kominfo	SiTIKA merupakan sebuah inovasi dalam memberikan layanan telpon gratis (voice), integrasi data, dan video teleconfren antar OPD, Kecamatan, Puskesmas, Sekolah dan Nagari	Seluruh OPD, Kecamatan dan Unit Kerja Pemda	2019-2022
2.	Pengembangan Media Analitik (MANTIAK)		Jumlah media massa dan media 67ocial yang terpantau	150.000.000	APBD	Dinas Kominfo	Pemantauan opini masyarakat terhadap pemerintah pada media massa dan media social	Bagian Humas	2019-2022
3.	Layanan Satu Data Online (LASADO)	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik	Jumlah Data yang diolah dan terpublikasi secara online	75.000.000	APBD	Dinas Kominfo	Melalui Aplikasi Lumbung Data, masyarakat dapat melihat, mengambil Data	Seluruh OPD	2019-2021

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
		Daerah					dan Informasi Statistik Sektoral secara online		
4.	Sertifikasi Eletronik dan Tanda Tangan Digital (SETANDAN)		Jumlah Sistem Informasi yang telah memiliki sertifikat eletronik dan menggunakan Tanda tangan Digital	150.000.000	APBD	Dinas Kominfo	Setiap sistem informasi akan dilakukan uji CSCU dan menggunakan tanda tangan digital	Seluruh OPD	2019-2021
5.	e-lapor SPAN yang terintegrasi dengan Layanan Call Center 112 dan City Operation Center (COC)		persentase aduan yang ditindak lanjuti	100.000.000	APBD	Setda Bag Humas	Apalikasi e-lapor SPAN yang disediakan oleh Kemenpan RB perlu diintegrasikan dengan Call Centre 112 dan COC agar laporan masyarakat tersebut dapat langsung ditangani oleh OPD terkait melalui commando pada COC.	kominfo	2020-2021
6.	GERAI DUKCAPIL	Program Penataan	Jumlah Gerai Dukcapil yang	140.000.000	APBD	Disdukcapil	Membangun unit pelayanan di	Disdukcapil, Kominfo,	2019-2020

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran Rp.	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
		Administrasi kependudukan	dibangun di nagari/kecamatan Jumlah KTP EL yang di kirim ke Sekolah yang bersangkutan sebagai hadiah/kado ulang tahun ke-17.				nagari/kecamatan untuk melayani masyarakat sehingga tidak harus ke Disdukcapil	camat, nagari	

Prioritas Pendukung Smart Branding (Tata Kelola Pemasaran Daerah Pintar)

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
1.	Konsultasi Layanan Investasi Untuk Kemudahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Klinik LKPM)		Klinik Pelayanan dan pendampingan pelaporan Kegiatan Penanaman Modal seluruh perusahaan	100.000.000	APBD	DPMPTP	Memberikan Pelayanan langsung, Pelayanan Pendampingan secara Mobile, dan pelayanan di ruangan khusus (klinik LKPM Online)	Perusahaan	2019-2021
2.	Pengembangan kampung		Menjadikan sentra cacao sebagai	250.000.000	APBD	DPMPTP	Menyediakan wahana dan	DINAS PARIWISATA	2022-2024

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
	Cokelat Malibou		kampung coklat yang berbasis ekonomi kreatif, wisata, agro (pertanian), Literasi dan studi tiru	00			wisata, ruang convesion, proses pengolahan coklat mulai dari pembibitan sampai pengolahan hasil coklat. Dengan menu serba coklat. Menjadi Literasi pengolahan coklat di Sumatera bagian Barat		

Prioritas Pendukung Smart Economy (Tata Kelola Ekonomi Daerah Pintar)

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
1.	Pengembangan perbenihan/p erbibitan (Padi Putih Papanai)	Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Tersedianya benih padi putih Papanai	500.000.000	APBD	Distan KP	Menjadikan Kab. Padang Pariaman sebagai penghasil sumber benih tanaman pangan (padi)	BPSP, BPTP dan Pemerintahan Nagari	2019-2023

No	Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Penjelasan Inovasi	Kerjasama	Tahun
2.	Peningkatan hasil produksi Peternakan	Peningkatan hasil produksi Peternakan melalui PAPA PRO 10.000 K	Jumlah produksi daging meningkat (10.000 ekor anak sapi lahir)	3,5 M	DAK APBN	Disnakkeswan	Memberikan bantuan Induk Sapi unggul pada Petani dengan pembinaan dan pemantauan secara langsung oleh petugas Penyuluh Peternak dan peralatan teknologi.	Dinas Pertanian KP, Unand	2019-2024
3.	Peningkatan hasil produksi Peternakan	Peningkatan hasil produksi Peternakan melalui kampung limosin	Jumlah Kampung Limosin yang Terbentuk.	2,5 M	DAK APBN	Disnakkeswan	Pembentukan Sebuah Kawasan Peternak Sapi Limosin yang dibina dan dipantau secara langsung oleh petugas Disnak Keswan. Dilakukan MoU dengan Pemerintahan Nagari setempat.	Dinas Pertanian, Unand, Nagari	2020-2022

BAB VI PROGRAM-PROGRAM QUICK WIN

A. SiPAKEM (SISTEM PELAPORAN DAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN)

Si-Pakem adalah sebuah sistem yang dibangun untuk memudahkan pelaporan kelahiran yang dimulai dari peristiwa kehamilan dan pelaporan kematian dengan penyebab kematian, yang digunakan oleh masyarakat, tenaga kesehatan, kepala desa, camat, dinas kesehatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Aplikasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidak akuratan data tentang pelaporan dan pencatatan kelahiran dan kematian di kabupaten Padang Pariaman sehingga pemerintah tidak mendapatkan data yang akurat tentang kelahiran dan kematian. Ketidak akuratan data ini berakibat pada tidak lancarnya pemantauan kesehatan ibu dan bayi terutama yang berisiko tinggi.

Sistem ini diinisiasi sejak tahun 2018 dimana saat itu pelaporan dilakukan secara manual dengan *form* yang menyulitkan dalam proses pencatatan. Kemudian dikembangkan menjadi system dengan pelaporan secara digital melalui aplikasi berbasis web dan android yang terintegrasi dengan data ware house kependudukan.

Beberapa stakeholder terlibat dalam inovasi ini diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai simpul koordinasi penyedia data, Dinas Kesehatan sebagai unit teknis yang mengontrol pencatatan kelahiran dan kematian, Puskesmas-puskesmas dan para bidan dibawahnya yang bertugas melakukan pencatatan mulai dari kehamilan, kelahiran, kematian serta melakukan autopsi verbal penyebab kematian, rumahsakit yang melaporkan peristiwa kematian yang terjadi dirumahsakit, Camat sebagai simpul koordinasi nagari-nagari, Wali Nagari (Kepala Desa) sebagai pelapor peristiwa kematian, Kepolisian yang melaporkan kematian karena kecelakaan dan masyarakat sebagai pelapor dan penerima layanan administrasi kependudukan dan layanan kesehatan.

Aplikasi siPakem dibangun oleh programmer yang dilatih di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pembangunan system melibatkan stakeholder sebagaimana diatas dalam mendalami bisnis prosesnya yang dianggarkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sistem yang dibangun terkoneksi dengan data kependudukan sehingga data yang dihasilkan dari pencatatan dan pelaporan akan akurat.

siPakem dibangun mulai dari perencanaan yang meliputi diskusi awal untuk kajian kebutuhan akan data, alur proses pelaporan dan pencatatan, system yang dibutuhkan serta biaya pembangunannya. Pada fase pelaksanaan, mulai dilakukan pembangunan system. Sistem yang dibangun disosialisasikan kepada stakeholder pelaksana dan masyarakat. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada semua *stakeholder* sesuai kewenangannya masing. Pelatihan yang diberikan saat ini meliputi pelatihan penggunaan system, baik oleh petugas maupun masyarakat. Selanjutnya juga diikuti dengan pelatihan cara melakukan autopsi verbal oleh para tenaga kesehatan.

Dengan melaksanakan siPakem dalam pelaporan dan pencatatan ini maka akan diperoleh manfaat diantaranya :

Bagi masyarakat; 1. Bagi ibu hamil, dapat mendeteksi secara dini potensi risiko tinggi terhadap kehamilan, 2. Bagi ibu melahirkan, dapat menjaga kondisi ibu pasca melahirkan, 3. Bagi bayi, pencatatan kohor bayi membantu pemantauan gizi dan

kesehatan bayi, 4, Bagi ahli waris dalam pencatatan kematian dapat membantu penerbitan dokumen pencatatan sipil, 5. Bagi penduduk, akan mempercepat dan mempermudah kepemilikan akta kelahiran dan kematian

Bagi Disdukcapil ;1. Tersedianya database kependudukan yang akurat terkait angka kelahiran dan kematian, 2. meningkatkan pelayanan akta kelahiran dan akta kematian.

Bagi Dinas Kesehatan akan memperoleh data *real time* tentang kehamilan, kelahiran serta kematian dengan penyebab kematiannya yang bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang kesehatan.

Sumberdaya yang digunakan dalam inovasi ini adalah :

1. Anggaran (APBD dan DAK) : 300 juta rupiah yang digunakan untuk rapat-rapat koordinasi dalam perencanaan, termasuk peningkatan sarana prasarana berupa pengadaan server dan kelengkapannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sumberdaya manusia yang terdiri dari petuas dinas Dukcapil sebanyak 10 orang, 25 orang tenaga kesehatan puskesmas, 252 orang bidan desa, 17 Camat dan 103 petugas pelayanan nagari (pelayanan) serta 10 dokter rumah sakit.
3. Sarana prasarana yang digunakan berupa server aplikasi siPakem, desktop dan scanner di desa untuk menjalankan aplikasi; gadget untuk melakukan autopsi verbal yang akan digunakan oleh bidan didesa.

Hal yang membuat system ini inovatif adalah :

1. Integrasi dan interoperabilitas data antara dinas kesehatan dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil,
2. Sinergi antar stakeholder untuk pelayanan yang lebih luas ; a. masyarakat sebagai pelapor dan menerima layanan, b. Walinagari/kepala desa yang membantu masyarakat dalam hal pelaporan kematian,
3. Layanan berbasis android yang mudah digunakan.

B. SMART NAGARI

Nagari adalah pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat atau setingkat Desa atau Kelurahan didaerah lainnya. Kabupate Padang Pariaman memiliki 103 Nagari.



Setiap nagari didesain memiliki kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan Teknologi Informatika Komputer berbasis Fiber Optic, kegiatan ekonomi produktif dan Inovatif, peningkatan pendidikan dan seni budaya masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan dan kesadaran hukum.

Smart Nagari ini diinisiasi pada tahun 2019 untuk mengatasi masalah prioritas yang terjadi di nagari terkait dengan pelayanan public. Dimana selama ini pelayanan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat dilakukan secara manual, sehingga lama, tidak efektif, tidak efisien serta terlalu birokratif yang menyulitkan.

Smart Nagari bukan sekadar pada transformasi teknologi, tapi yang lebih penting adalah upaya mendorong pengembangan nagari-nagari menjadi lebih baik. Ini yang mungkin belum banyak diperhatikan dalam peta Smart City pada umumnya yang hanya fokus pada problem masyarakat perkotaan.

Program Smart Nagari di Kabupaten Padang Pariaman mencakup beberapa sektor atau bidang. Setiap sektor ini dibina dan difasilitasi oleh OPD terkait. Adapun kriteria dari cakupan Smart Nagari tersebut adalah :

1. Pelayanan publik,

Smart Nagari atau Nagari Pintar Pelayanan Publiknya sudah berbasis TIK, pola manual telah ditinggalkan. Semua layanan administrasi persuratan memakai Sistem Informasi Nagari yang terdapat di Website Nagari. Beberapa jalur birokrasi dipangkas dan pelayanan bisa dilakukan dengan cepat. Kalau warga yang butuh surat yang perlu tanda tangan camat, tidak perlu ke kecamatan. Cukup di kantor nagari saja, karena sistem informasi sudah terintegrasi dengan kecamatan. Warga hemat waktu, hemat uang karena tak perlu ongkos ke kecamatan. Pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dulunya memakan waktu 6 hari, lewat TIK dipangkas waktunya menjadi 2 jam saja. Disamping itu juga, surat-surat yang selama ini dikeluarkan oleh OPD Kabupaten juga sudah bisa dicetak di Nagari karena sistem informasi yang digunakan OPD terintegrasi dan online dengan nagari. Contohnya Pengurusan Akta Kelahiran yang menggunakan Layanan Dukcapil Online. Juga di bidang perizinan akan dikembangkan pengurusan izin cukup sampai di nagari dengan menggunakan Aplikasi Simpel (Sistem Pelayanan Elektronik), masyarakat tidak perlu ke kantor Dinas Perizinan yang berada jauh di Kabupaten.

Secara offline pun layanan tetap dilakukan, khususnya persuratan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari. Layanan ini sangat penting karena mempercepat layanan yang sebelumnya memakan waktu 3 sampai 4 hari, sekarang cukup menunggu 30 menit saja dan dapat diambil langsung. Jumlah layanan persuratan melalui system ini sebanyak 34 jenis dan yang paling banyak dimintakan adalah jenis 1. Surat Keterangan Kurang Kurang Mampu, 2. Surat Keterangan Berlakukannya Baik, 3. Surat Keterangan Usaha, 4. Surat Pindah Domisili, dll.

2. Pemberdayaan ekonomi,

Untuk pemberdayaan ekonomi, Smart Nagari menjadikan "Aula Kantor Nagari" sebagai pusat ekonomi produktif melalui pengembangan berbagai jenis usaha yang difasilitasi pelatihannya oleh pemerintah daerah, seperti kerajinan tangan dan produk olahan pertanian/perikanan. Operator di nagari nanti juga yang akan menghubungkan ke situs belanja online pasanagari.padangparimankab.go.id untuk memfasilitasi pemasaran UMKM nagari.

3. Pelayanan kesehatan.

Untuk pelayanan kesehatan, aula Nagari menjadi jangkar bagi Posyandu yang ada sekaligus memudahkan warga miskin dalam memperoleh surat yang akan digunakan untuk pengobatan. Disamping itu dalam rangka peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dari sector gizi maka disetiap nagari telah dibentuk Laskar Gizi yang memantau sekaligus memberikan penyuluhan gizi masyarakat.

Nagari Smart juga telah memiliki petugas pelaporan kelahiran dan kematian penduduk dari Bidan Desa yang menggunakan aplikasi SiPakem dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan melaksanakan siPakem diperoleh manfaat diantaranya :

- Data *real time* tentang kehamilan, kelahiran serta kematian dengan penyebab kematian yang bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang kesehatan.
- Dapat mendeteksi secara dini potensi risiko tinggi terhadap kehamilan,
- Dapat menjaga kondisi ibu pasca melahirkan,
- Pencatatan kohor bayi membantu pemantauan gizi dan kesehatan bayi,
- Pencatatan kematian dapat membantu penerbitan dokumen pencatatan sipil,

4. Pengembangan pendidikan dan seni-budaya,

Sedangkan untuk pelayanan pendidikan, nagari menjadi pendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun melalui lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sebagai tenaga pengajar pada PKBM tersebut adalah "relawan pendidikan". Yaitu para alumnus baru perguruan tinggi, diarahkan ke nagari ini. Nagari juga harus mempunyai Perpustakaan Nagari.

Untuk pengembangan seni-budaya, "laga-laga" Nagari menjadi simpul bagi aktivitas seni warga. Sanggar-sanggar seni berlatih bersama,ajar Masyarakat (PKBM). Sebagai tenaga pengajar pada PKBM tersebut adalah "relawan n potensi dan minat warga setempat.

5. Peningkatan kapasitas SDM

Untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Nagari menyediakan aulanya untuk tempat pelatihan warga. Pelatihan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nagari setempat mulai pelatihan bahasa, keterampilan, tanggap bencana, mengaji, hingga Teknologi Informatika Komputer (TIK).

6. Integrasi pengentasan kemiskinan

Adapun untuk integrasi penanganan kemiskinan, program ini memudahkan warga miskin dalam mengurus segala keperluannya yang dijamin pemerintah. Perlu sistem yg dapat memonitor kondisi penduduk miskin "by name by adres" berbasisan Map. Rumah Tangga Miskin juga diberikan label sehingga mudah dipantau dan dideteksi perkembangan kehidupannya,

7. Informasi hukum.

Untuk informasi hukum, Smart Nagari mendorong warga melek hukum. "Contoh Penyuluhan hokum. Kekerasan terhadap anak dan saber pungli perlu disosialisasikan intensif ke masyarakat nagari, sehingga warga tahu harus melakukan apa ketika terjadi kekerasan terhadap anak dan juga mengetaskan pungli yang selama ini sudah membudaya ditengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2019, Sudah 4 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman memperoleh penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Nagari Sadar Hukum.

Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan publik dan mendapat dukungan dan pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Beberapa stakeholder terlibat dalam inovasi ini sebagai mitra Dinas Kominfo diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pertanian KP dan Bagian Hukum Setdakab.

Pembangunan sistem melibatkan stakeholder sebagaimana diatas dalam mendalami bisnis prosesnya dengan dukungan berbagai pihak seperti Universitas Andalas, Politeknik Negeri Padang dan Komunitas OpenSID. Sistem yang dibangun terkoneksi dengan data kependudukan sehingga data yang dihasilkan akurat dan realtime.

Untuk mendukung penggunaan aplikasi dan sistem informasi, maka Nagari juga diwajibkan menyediakan internet nirkabel alias WiFi gratis bagi warganya di tiap kantor nagari. Belanja langganan internet tersebut dianggarkan di setiap APBNag.ngana pelajar bisa memanfaatkan fasilitas nagari ini untuk menambah wawasannya.

Sumberdaya yang digunakan dalam program inovasi ini adalah :

1. Anggaran (APBD) : 200 juta rupiah yang digunakan untuk rapat-rapat koordinasi dalam perencanaan, termasuk peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan kelengkapannya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Disamping, masing-masing OPD juga menyediakan anggaran untuk kegiatan yang mendukung program Smart Nagari ini.
2. Sumberdaya manusia yang terdiri dari operator system di nagari sebanyak 130 orang, 24 orang petugas dari OPD terkait, 25 orang tenaga kesehatan puskesmas, 252 orang bidan desa, dan 17 Camat serta 10 dokter rumah sakit.
3. Sarana prasarana yang digunakan berupa server, aplikasi Sifo Nagari, siPakem, desktop dan scanner di desa untuk menjalankan aplikasi; gadget yang digunakan oleh bidan didesa.

Hal yang membuat program ini inovatif adalah :

1. Integrasi dan interoperabilitas data antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintahan Nagari dan Dinas Kesehatan.
2. Sinergi antar stakeholder untuk pelayanan yang lebih luas ; a. masyarakat sebagai pelapor dan menerima layanan, b. Walinagari/kepala desa, c. Puskesmas, d. Camat dan e. Kepala OPD.
3. Sebagian layanan berbasis android yang mudah digunakan.

C. PADATI

(PADANG PARIAMAN DESTINATION TOURISM)

Menciptakan kesan yang melekat di hati pengunjung ketika datang ke satu daerah butuh inovasi, kreativitas dan keramahan, apalagi dalam mengemas sektor pariwisata. Sebagaimana pendapat Skalogram Guttman, ada 4 faktor penentu daya tarik wisata yaitu (a) tingkat kemudahan pencapaian (b) tingkat kelengkapan jenis fasilitas wisata (c) tingkat pengelolaan potensi wisata (d) tingkat keanekaragaman aktivitas sehingga diperoleh hasil penilaian tiap faktor penentu daya tarik.

Simpulan dari hasil identifikasi berdasarkan daya tarik wisata yaitu diperlukannya upaya pengembangan pada faktor-faktor penentu daya tarik wisata, sehingga didapatkan pemilihan lokasi wisata untuk pengembangan pada faktor-faktor

penentu daya tarik wisata, sehingga didapatkan pemilihan lokasi wisata untuk pengembangan obyek wisata.

Sementara itu, Pariwisata di Padang Pariaman cukup banyak dan beragam, namun pengelolaannya masih belum maksimal dan cenderung dilakukan sendiri-sendiri. Sehingga wisatawan mengalami kesulitan dan mengeluarkan biaya tinggi (high cost) bila berwisata ke Padang Pariaman. Disamping itu, wisatawan juga tidak puas karena hanya dapat melihat beberapa objek wisata saja, disamping kesulitan transportasi menuju kesana.

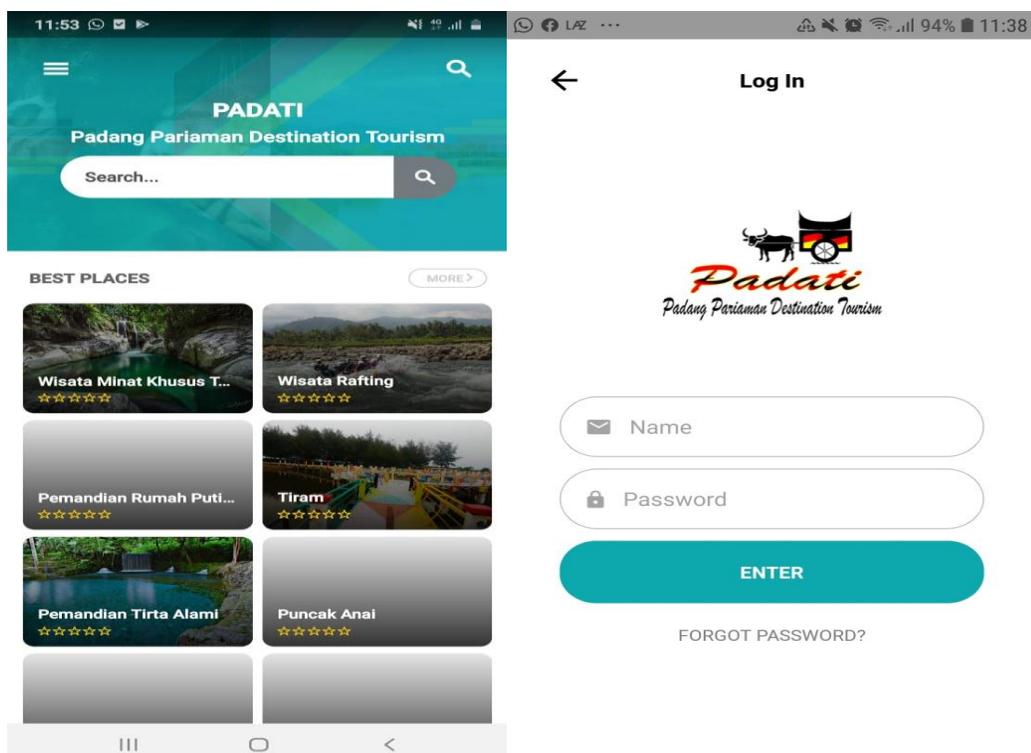
Merujuk pada hal tersebut, Padang Pariaman mulai mengembangkan konsep pariwisata terintegrasi yang dikenal dengan PADATI.

PADATI, Padang Pariaman Destination Tourism, merupakan aplikasi yang mempermudah wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata di Padang Pariaman. Aplikasi ini memuat informasi destinasi wisata, pemandu di destinasi, info event, pesan paket wisata, info kunjungan wisata, dan info kuliner.

Aplikasi ini memudahkan pengunjung dalam memesan paket wisata dan bisa menggunakan jasa pemandu secara online. Aplikasi juga memuat data kunjungan yang di perlukan para pemangku kepentingan, informasi event dan info kuliner khas Padang Pariaman beserta daftar list harganya.

Adapun paket destinasi wisata yang disediakan dan mendapat apresiasi serta banyak dikunjungi oleh wisatawan melalui Aplikasi PADATI adalah objek wisata Air terjun nyarai, Pemandian Rumah Putih, Pemandian Lubuak Bonta, Lubuk Alung Rafting, Pantai Tiram, Pantai Katapiang dan Air Terjun Sarasah. Disamping itu juga akan dikembangkan dengan paket-paket lain seperti : Pantai Arta Sungai Limau, Rumah Pohon, Air Terjun Baburai, Jembatan Lubuak Tano dan Pemandian Puncak Anai.

Padang Pariaman sebagai pintu gerbang Sumatera Barat melalui jalur Udara, sangat berpotensi menarik wisatawan secara langsung. Karena dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang terletak di Padang Pariaman, tidak terlalu jauh ke objek-objek wisata tersebut. Tentu ini lebih memudahkan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan.



Pada akhirnya diharapkan kunjungan ke Padang Pariaman meningkat karna mempermudah wisatawan dalam untuk berwisata ke Padang Pariaman.

Sistem PADATI ini diinisiasi pada tahun 2019 ini, dimana sebelumnya belum ada dan pengelolaan pariwisata masih dilakukan secara manual serta sendiri-sendiri sehingga menyulitkan wisatawan dalam kunjungan dan kurang diminati. Kemudian dibuat sebuah system informasi pariwisata dengan nama PADATI yang berisi informasi pariwisata, paket wisata, sarana transportasi serta tempat-tempat penginapan dan lokasi-lokasi kuliner. Aplikasi PADATI berbasis web dan android yang juga terintegrasi dengan informasi wisata nasional dan internasional.

Beberapa stakeholder terlibat dalam inovasi ini diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan serta Kelompok Sadar Wisata Padang Pariaman.

Dengan PADATI ini akan diperoleh manfaat diantaranya adalah peningkatan kunjungan wisata ke Padang Pariaman dan tentu juga akan meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan dan Restoran serta Pajak-pajak lainnya.

Sumberdaya yang digunakan dalam inovasi ini adalah :

4. Anggaran (APBD dan DAK) : 200 juta rupiah yang digunakan untuk rapat-rapat koordinasi dalam perencanaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, termasuk peningkatan sarana prasarana kantor PADATI yang dikelola oleh Forum Pokdarwis Padang Pariaman.

5. Sumberdaya manusia yang terdiri dari petugas Disparpora sebanyak 4 orang, 20 orang tenaga Kelompok Sadar Pariwisata, serta petugas yang disewa jasanya sebagai guide dan transportasi.

Hal yang membuat system ini inovatif adalah :

4. Sistemnya terintegrasi dan interoperabilitas data.

5. Sinergi antar stakeholder untuk pelayanan yang lebih luas ; Kelompok Sadar Wisata, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan UKM, Badan Usaha Perhotelan, Rumah Makan serta Pusat-pusat kuliner dan oleh-oleh.

6. Layanan berbasis android yang mudah digunakan.

BAB VII

PENUTUP

Masterplan Smart City Buku II dibuat sebagai dokumen arahan pembangunan smart city dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang akan menjadi bagian perencanaan dan peta jalan pembangunan smart city hingga tahun 2029, dan merupakan hasil dari analisis serta program-program smart city yang telah disajikan dalam buku I. Masterplan Smart City Kabupaten Padang Pariaman akan menjadi sebuah dokumen hidup (living document) yang akan terus berkembang dan diselaraskan dengan rencana-rencana pembangunan lain dalam agenda pembangunan, dan juga akan berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan

dan prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, serta perkembangan teknologi dan dunia.

Sebagai living document, Masterplan Kabupaten Padang Pariaman Smart City dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam melaksanakan proses pembangunan. Masterplan ini dihasilkan melalui analisis kondisi geografis, kesenjangan daerah, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian rangkuman dari dokumen perencanaan pembangunan yang telah diatur melalui dokumen RPJMD dan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIFKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002